

Dewi Aniaty • Aviani Santi
Baryono



PKn 3

Kelas IX SMP dan MTs



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Dewi Aniaty
Aviani Santi
Baryono

PKn 3

KELAS IX SMP dan MTs



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
dilindungi oleh Undang-Undang

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3

SMP dan MTs Kelas IX

Penulis : Dewi Aniaty
Aviani Santi
Baryono
Penelaah : Dadang Sundawa
Editor : Toni Kurnia
Desain Sampul : Iman Taufik
Sumber Gambar Cover : Foto Iman Budiman
Perwajahan : Kuswaya

370.114 7

DEW

DEWI Aniaty

p

**PKn 3 : Kelas IX SMP dan MTs / penulis Dewi Aniaty, Aviani Santi
Baryono ; editor, Toni Kurnia, . — Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2009
vi, 152 hlm. : ilus. ; 25 cm.**

Bibliografi : hlm. 146-147

Indeks

ISBN: 978-979-068-878-0 (no. jilid lengkap)

ISBN: 978-979-068-889-6

**1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Aviani Santi III. Baryono IV. Toni Kurnia**

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan
Nasional dari Penerbit PT Remaja Rosdakarya

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009

Diperbanyak oleh

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 200•, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kami dapat menyusun buku Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali buku yang menjadi sumber bagi pendidik ataupun peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam buku ini, proses pembelajaran menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia.

Buku ini juga mencoba mengaktualisasikan apa yang menjadi tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Akan tetapi, sebagai manusia kami sadar akan keterbatasan bahwa buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari rekan-rekan pendidik khususnya dan umumnya bagi para pembaca demi kesempurnaan buku ini.

Semoga buku Pendidikan Kewarganegaraan ini bermanfaat bagi peserta didik dan dapat membantu rekan-rekan pendidik di lapangan.

Selamat belajar, semoga berhasil

Bandung, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
<hr/>	
BAB I	
Bela Negara	1
A. Pentingnya Usaha Bela Negara	3
B. Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara	19
C. Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara	24
Rangkuman	26
Soal-Soal Latihan	28
<hr/>	
BAB II	
Otonomi Daerah	33
A. Pengertian Otonomi Daerah	33
B. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik di Daerah	46
Rangkuman	57
Soal-Soal Latihan	59
Soal-Soal Akhir Semester 1	67
<hr/>	
BAB III	
Globalisasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara	73
A. Makna Globalisasi Bagi Bangsa Indonesia	75
B. Politik Luar Negeri Indonesia di Era Global	79
C. Dampak Globalisasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	87
D. Sikap Selektif dan Cinta Tanah Air terhadap Pengaruh Globalisasi	92
Rangkuman	95
Soal-Soal Latihan	97

BAB IV	
Prestasi Diri	101
A. Prestasi Diri Bagi Keunggulan Bangsa	103
B. Potensi Diri untuk Berprestasi	106
C. Partisipasi Dalam Berbagai Kegiatan untuk Mewujudkan Prestasi Demi Keunggulan Bangsa	116
Rangkuman	122
Soal-Soal Latihan	123
Soal-Soal Akhir Semester Genap	127
Glosarium	137
Daftar Pustaka	146
Daftar Indeks	148

Bab I

Bela Negara

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan prinsip bela negara;
2. menjelaskan sistem pertahanan keamanan negara;
3. menjelaskan pendidikan pendahuluan bela negara;
4. mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam pembelaan negara;
5. memahami bentuk-bentuk usaha pembelaan negara;
6. berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara;
7. melaksanakan bentuk-bentuk usaha pembelaan negara dalam berbagai kehidupan.

PETA KONSEP



Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsanya. Mereka berjuang dengan mempertahankan jiwa dan raganya, demi membela bangsa dan negaranya. Mengapa mereka dapat bersikap demikian?

Pada awal pembahasan ini, akan diuraikan bagaimana pentingnya usaha bela negara, prinsip bela negara, sistem pertahanan negara, hak dan kewajiban bela negara hingga partisipasi warga negara dalam berbagai kehidupan.

A. Pentingnya Usaha Bela Negara

Sebagai warga negara yang baik sudah semestinya kita pahami bersama pentingnya usaha pembelaan negara bagi keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa. Hal ini sesuai dengan isi UURI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan memiliki kewajiban untuk membela bangsa dan negaranya.

1. Pentingnya Usaha Bela Negara

Setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta kerelaan berjuang dan berkorban bagi bangsa serta negara tanpa kenal menyerah.

a. Pengertian Bela Negara



7W0DGT: Tempo, 29 Desember - 4 Januari 2004

+CODCT#ete Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi setiap warga negara.

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Hal ini harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa serta negara.

Bela negara bagi bangsa Indonesia dapat diwujudkan secara obyektif dalam kecintaan terhadap negara dan bangsa. Dengan kata lain, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

c. Prinsip Bela Negara

Prinsip bela negara rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- 2) Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara tidak dapat dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Hal ini mengandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Dalam pembahasan tentang pertahanan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah suatu negara, tentunya tidak dapat terlepas dari pengertian, fungsi dan unsur-unsur yang terdapat dalam negara.

Negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan dan fungsi negara memiliki pengertian yang berbeda, tetapi sulit dipisahkan. Tujuan negara dalam setiap negara memiliki tujuan masing-masing, yang berupa suasana ideal yang diharapkannya. Sedangkan fungsi negara merupakan pengejawantahan dari tujuan negara yang telah ditetapkan, sehingga fungsi negara tersebut bersifat nyata.

Fungsi negara adalah sebagai pengatur kehidupan dalam negara demi tercapainya tujuan negara tersebut. Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang harus diupayakan oleh negara, antara lain:

- 1) Melaksanakan ketertiban untuk mencapai tujuan dan mencegah bentrokan-bentrokan yang mungkin terjadi dalam masyarakat, dimana negara bertindak sebagai stabilisator.
- 2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
- 3) Mengupayakan pertahanan dan menjaga kemungkinan adanya serangan dari luar serta melengkapi diri dengan peralatan pertahanan yang kuat dan canggih.
- 4) Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

KEGIATAN 1.1

Lakukan wawancara di lingkungan sekitarmu tentang usaha pembelaan negara, kemudian presentasikan di depan kelas untuk ditanggapi oleh siswa yang lain!

Sedangkan fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan dan melindungi seluruh rakyat dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional yang meliputi beberapa faktor:



7WODGT: Gatra, 19 Agustus 2000

+CODCI#etf TNI dengan persenjataan yang kuat merupakan salah satu faktor untuk mempertahankan dan melindungi seluruh rakyat dan wilayah nusantara.

- (a) Adanya kualitas pendidikan bangsa Indonesia yang memiliki keahlian baik teknologi maupun pengelolaannya, juga memiliki keberanian moral, mental, intelektual dan fisik.
 - (b) Memiliki persenjataan yang kuat dalam tubuh TNI/POLRI.
 - (c) Mempunyai sistem perekonomian yang mantap, dinamis dan berswasembada ekonomi, tanpa bergantung pada bantuan luar negeri.
 - (d) Adanya pendidikan agama yang intensif sehingga mampu membina mental dan moral yang kuat.
 - (e) Penanaman rasa nasionalisme yang sehat mengarah pada filsafat dan tradisi nasional. Di samping itu, nasionalisme dapat berfungsi mempersatukan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan melenyapkan dominasi asing dalam segala aspek kehidupan.
 - (f) Pemerintah dipegang atau dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kesetiaan, pengabdian yang tinggi serta mampu melindungi kepentingan seluruh rakyat dan menjunjung tinggi serta menghormati hak asasinya.
- 2) Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya.

- 3) Menyelenggarakan hubungan internasional, melalui hubungan diplomatik dalam berbagai aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Tujuan negara Indonesia dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan persamaan dan kemerdekaan.”

Suatu negara dapat berdiri tegak dan melaksanakan tujuannya apabila negara tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Syarat-syarat berdirinya suatu negara adalah harus memenuhi unsur konstitutif dan deklaratif. *Unsur Konstitutif* berarti bahwa dalam suatu negara haruslah memiliki unsur rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan *Unsur Deklaratif* berarti bahwa dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional yang bersifat formalitas suatu negara haruslah memperoleh pengakuan dari negara lain. Sifat formalitas disini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, undang-undang dasar, dan arti strategis untuk membina hubungan kerja sama, rasa penghormatan dan pengakuan kedaulatan dari negara lain.

Berikut akan kita uraikan unsur-unsur konstitutif dan deklaratif dalam suatu negara. Unsur konstitutif suatu negara antara lain:

- 1) Rakyat



7W0DGT: Tempo, 29 Februari 2004

+CODCI#etg Rakyat merupakan unsur terpenting dalam berdirinya suatu negara.

Unsur terpenting suatu negara adalah rakyat, karena rakyatlah yang pertama kali memiliki keinginan dan kehendak untuk membentuk negara. Kemudian rakyat ini pulalah yang merencanakan, merintis, mengendalikan dan menyelenggarakan pemerintahan negara.

Rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk dan patuh pada kekuasaan negaranya. Dalam suatu negara, rakyat dapat digolongkan menjadi:

- a) Penduduk dan bukan penduduk
Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara. Biasanya mereka lahir secara turun temurun,

menetap dan besar di wilayah negara tertentu. Sedangkan *bukan penduduk* adalah mereka yang berada dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu.

b) Warga negara dan bukan warga negara

Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu adalah anggota dari suatu negara, atau mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai warga negara atau dapat melalui proses naturalisasi. Sedangkan *bukan warga negara* adalah mereka yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun ia tunduk dan patuh pada pemerintah dimana ia berada.

c) Bangsa

Bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup dengan adanya kehendak bersama yang dilandasi oleh rasa persatuan, dan kesatuan tanah air, bahasa, dan cita-cita.

Dalam suatu bangsa, manusia menyadari semua keanekaragaman yang ada. Namun demikian, mereka menjunjung tinggi persamaan keturunan, wilayah, kesamaan politik, dan perasaan senasib sepenanggungan.

Friedrick Hertz seorang ilmuwan dari Jerman mengemukakan 4 (empat) unsur aspirasi setiap bangsa dalam bukunya *Nationality in History and Politics* yaitu:

- (1) Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, dan solidaritas.
- (2) Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negeri.
- (3) Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan. Contohnya, menjunjung tinggi budaya sendiri.
- (4) Keinginan untuk menonjol atau lebih unggul dari bangsa-bangsa lain dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise.

2) Wilayah

Wilayah suatu negara merupakan tempat berlindung bagi rakyat yang sekaligus menjadi tempat bagi pemerintah untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan. Wilayah negara itu meliputi:

a) Daratan

Wilayah daratan merupakan wilayah yang paling utama dan sangat penting perannya. Oleh karena wilayah daratan menjadi tempat kediaman bagi seluruh penghuni negara. Dengan demikian, diperlukan

adanya ketentuan yang lebih jelas dan tegas tentang letak wilayah daratan. Wilayah daratan ini dapat diketahui dengan melihat dan mengukur batas negara. Misalnya, setiap penghuni negara yang ada di wilayah Indonesia tidak dapat dengan seenaknya saja keluar masuk, melintas batas negara tanpa melalui aturan hukum tentang batas wilayah negara. Penghuni negara tersebut harus memenuhi ketentuan melalui dinas keimigrasian, karena akan mengganggu stabilitas negara lain apabila terdapat penghuni yang bukan penghuni negara tersebut.

Jadi, diperlukan adanya penetapan batas-batas wilayah suatu negara. Biasanya penetapan itu dilakukan melalui suatu perjanjian (*treaty atau agreement*) antara dua negara atau lebih, khususnya antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan. Untuk wilayah daratan, batas negara dapat terjadi dengan dua cara yaitu:

(1) Secara alamiah

Persetujuan ini terjadi karena belum dilakukan pengukuran batas negara secara tepat. Kemudian diambilah patokan-patokan alam, seperti pegunungan, sungai, hutan, dan danau. Contoh: perbatasan antara Tibet dan India yaitu Pegunungan Himalaya.



+CODCT# eth
Pegunungan Himalaya merupakan batas negara yang terjadi secara alamiah.

*WODGT: Negara dan Bangsa

(2) Secara buatan

Persetujuan ini melalui proses pengukuran yang dilakukan oleh dua negara atau lebih antara negara yang berbatasan. Biasanya berupa tanda batas berupa tugu atau bangunan tembok.

b) Lautan

Laut adalah bagian dari wilayah suatu negara, tetapi tidak semua negara memiliki wilayah ini. Contohnya seperti Afganistan, Nepal, Swiss, dan Luxemburg. Wilayah lautan ini dikenal dengan sebutan laut teritorial (*teritorial water, teritorial sea* atau *maritim belt*) adalah bagian dari perairan nasional yang berupa jalur laut di tepi pantai atau pesisir negara yang berada di bawah kedaulatan negara tersebut.

Pada awalnya, terdapat dua pandangan pokok tentang wilayah lautan, yaitu *Res Nullius* yang berarti konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Pandangan ini dikemukakan oleh John Sheldon dari Inggris dalam bukunya *More Clausum* atau *The Right Dominion of the Sea*. Pandangan yang kedua yaitu *Res Communis* yang beranggapan bahwa lautan itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini dikembangkan oleh ilmuwan dari Belanda pada tahun 1608, yaitu Hugo de Groot (Grotius) dalam bukunya *Mare Liberism* (laut bebas). Karena konsep ini, Grotius kemudian ditetapkan sebagai *Bapak Hukum Internasional*.

Dewasa ini menurut konsepsi umum yang sekarang berlaku demi menjamin keselamatan negara, setiap negara berhak menganggap bagian lautan tertentu yang berbatasan dengan daratan sebagai bagian wilayahnya (lautan teritorial). Masalah wilayah lautan ini telah memperoleh dasar hukum yaitu Konferensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB (*United Nations Convention on the Law of The Sea - UNCLOS*) di Jamaica. Dalam konferensi yang diadakan tanggal 10 Desember 1982, sebanyak 119 peserta dari 117 negara dan dua organisasi kebangsaan di dunia menandatangani kesepakatan wilayah lautan.

Dalam bentuk traktat multilateral, batas-batas laut dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Batas Laut Teritorial
Setiap negara memiliki kedaulatan atas laut berjarak sampai 12 mil yang diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.
- (2) Batas Zona Bersebelahan
Ditetapkan sejauh 12 mil laut dari luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai. Dalam wilayah laut ini negara pantai dapat mengambil tindakan serta menghukum pihak-pihak yang melanggar Undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi dan ketertiban negara.
- (3) Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Ditetapkan wilayah laut dari suatu negara pantai sejauh 200 mil laut diukur dari pantai. Di wilayah ini negara pantai yang bersangkutan berhak menggali dan mengolah kekayaan alam lautan serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Dalam wilayah ini pula negara-negara lain bebas melakukan pelayaran atau terbang di atas wilayah ini. Di samping itu, negara lain juga diperkenankan memasang alat kabel atau pipa di bawah lautannya. Apabila terdapat

nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam ZEE, maka negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap dan melakukan tindakan hukum terhadapnya.

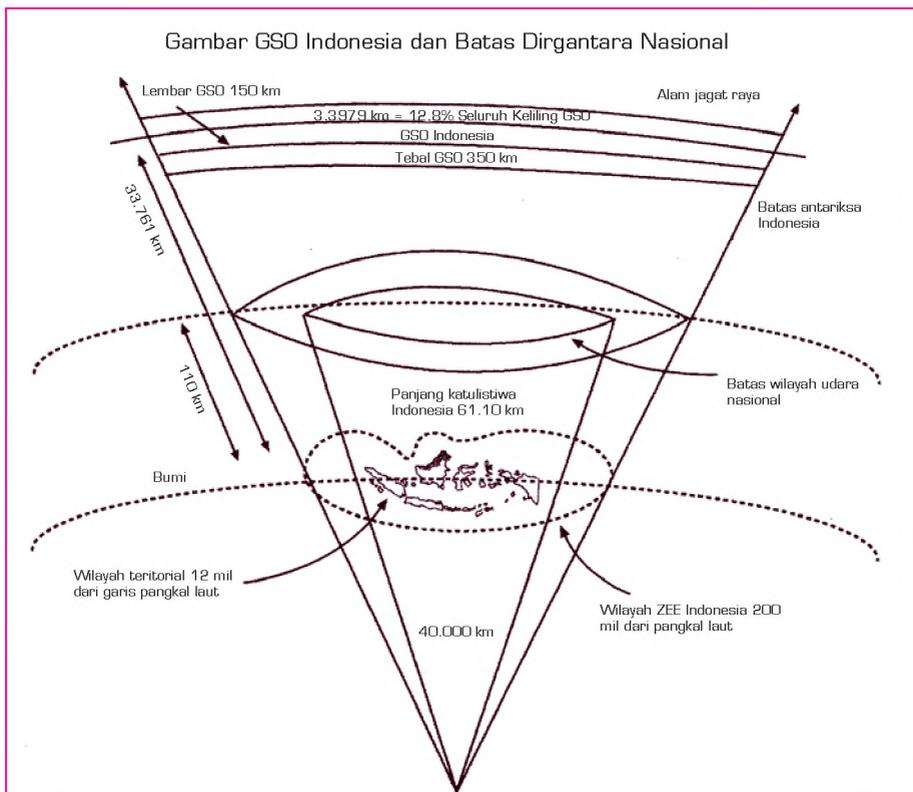
(4) Batas Landas Benua

Landas Benua yaitu wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut. Negara pantai yang bersangkutan dalam wilayah ini diperkenankan melakukan eksplorasi dan eksploitasi, dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

c) Udara

Keuntungan wilayah udara menurut Grotius menyatakan bahwa semua ruang di udara dimana saja merupakan wilayah yang bebas untuk siapa saja. Menurut Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya.

Indonesia, menurut Undang-undang No. 20 tahun 1982 menyatakan bahwa wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geostationernya adalah 33.761 km.



+CODCT#etit Batas dirgantara Indonesia

7WODGT: Pendidikan Kewarganegaraan

d) Wilayah ekstrateritorial

Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah tambahan selain tiga jenis wilayah negara. Ketentuan ini didasarkan pada kebiasaan dalam hukum internasional bahwa kapal-kapal yang berlayar di laut lepas dengan mengibarkan bendera suatu negara, maka diakui sebagai suatu wilayah negara pemilik kapal dan bendera tersebut. Terdapat asas *Shipis territory*, artinya sebagai wilayah suatu negara, maka kapal yang sedang berlayar dengan memasang bendera hukum negara asal dan tidak diperkenankan ada orang asing yang memasuki wilayah ini tanpa izin. Begitu pula dengan gedung perwakilan negara yang berada di wilayah negara lain. Gedung ini diakui sebagai wilayah suatu negara yang bebas dari pengawasan dan sensor terhadap setiap kegiatannya. Di daerah ini terdapat larangan bagi alat negara, seperti polisi dan pejabat kehakiman untuk masuk tanpa izin resmi pihak kedudukan negara bersangkutan.

e) Batas wilayah negara

Penentuan batas wilayah ini baik berupa daratan dan atau lautan perlu dibuat dalam bentuk perjanjian (traktat) bilateral dan multilateral.

Batas antara suatu negara dengan negara lainnya, dapat berupa:

- (1) Batas alam, seperti sungai, pegunungan, dan danau.
- (2) Batas buatan, seperti pagar kawat, pagar tembok, dan tiang.
- (3) Batas geofisika, berupa garis lintang.

Batas wilayah negara ini sangat mempunyai peranan penting bagi ketuhanan, keamanan dan kedaulatan suatu negara dalam segala bentuknya. Kepentingan ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam darat dan laut. Hal ini juga termasuk pengolahan penyelenggaraan pemerintahan negara serta kedudukan bagi penghuni negara yang bersangkutan.

3) Pemerintah yang berdaulat

Pemerintahan merupakan alat kelengkapan pemerintah yang melaksanakan fungsi negara. Pemerintah berdaulat dijadikan sebagai organ dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas penting dalam negara. Pemerintahan sebagai organ di dalam suatu negara dapat dibedakan ke dalam arti yang luas dan sempit.

Pemerintah dalam arti yang luas adalah keseluruhan kekuasaan yang ada di dalam negara, meliputi kekuasaan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan *pemerintah dalam arti yang sempit* adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri.

Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah mempunyai kekuatan yang mengikat ke dalam dan keluar. *Kekuasaan ke dalam* berarti kekuasaan pemerintah itu diakui dan berwibawa terhadap rakyatnya. Kedaulatan atau *kekuasaan keluar* berarti pemerintah negara tersebut memiliki kekuasaan yang bebas tidak terikat dan tidak memihak serta tunduk pada kekuasaan lain, serta ketentuan yang ada dalam negaranya. Dengan demikian, terdapat sikap saling menghormati kekuasaan negara satu dengan negara lain, tanpa turut campur dalam urusan dalam negeri dan negara lain.

Sedangkan unsur deklaratif suatu negara yaitu memperoleh pengakuan dari negara lain. Hal ini sangat diperlukan sebagai suatu pernyataan dalam tata hubungan internasional. Adanya status negara yang ingin melakukan hubungan diplomatik. Suatu negara membutuhkan pengakuan dari negara lain, disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain:

- a. Adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup negara terhadap intervensi yang datang dari dalam maupun dari luar.
- b. Ketentuan hukum alam yang tidak dapat dihindari bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain.

Dengan demikian, kita sebagai bangsa dan negara yang utuh perlulah kiranya membentengi diri dengan segala potensi yang kita miliki. Hal ini termasuk peranan warga negaranya dalam menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.

2. Mempertahankan Keutuhan dan Kedaulatan Negara Kesatuan RI

Usaha pertahanan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara dengan asas kemandirian.

Mengapa usaha pertahanan keutuhan dan kedaulatan NKRI dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia? Apa alasannya?

Berikut akan diuraikan alasan mengapa warga negara harus ikut serta dalam upaya bela negara.

a. Latar Belakang Sejarah

Kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, meraih kemerdekaan itu diperlukan keberanian perjuangan, pengorbanan rela berkorban dan rasa cinta pada tanah air dan bangsa.

Rakyat Indonesia pada saat itu dengan penuh kesadaran mau membela tanah airnya. Mereka mengusir penjajah walau dengan persenjataan amat sederhana, tetap bertekad bulat dengan satu tujuan “merdeka”. Sekalipun pengorbanan yang mereka lakukan mempertaruhkan nyawa, harta, dan segala yang mereka miliki.



170821: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno - Hatta. Sejak itu pula awal perjuangan bangsa untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan.

Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan puncak perjuangan bangsa, melainkan langkah awal perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Sebagai generasi muda penerus bangsa, hendaklah kiranya dapat meneladani dan menyikapi perjuangan kemerdekaan tersebut. Cara yang dilakukan dengan upaya bela negara sebagai tonggak utama kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Kelangsungan hidup bangsa dapat terjamin melalui pendekatan ketahanan dan kemampuan bangsa untuk menghalau segala bentuk hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan. Baik ancaman yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri.

Perjuangan tidak berhenti sampai disini, tetapi tetap berlangsung melalui usaha pembelaan negara yang dilakukan seluruh komponen bangsa hingga saat ini demi mewujudkan cita-cita proklamasi. Dengan demikian, pengorbanan para pahlawan bangsa tidaklah sia-sia apabila perjuangannya dihargai dan dihormati oleh para penerus bangsa. Terutama penghormatan khususnya dilakukan kalian sebagai pelajar Indonesia dan rakyat Indonesia pada umumnya.

b. Kedudukan Geografis dan Geostrategis Indonesia

Negara Indonesia terletak di wilayah Asia Tenggara yang merupakan rangkaian gugus kepulauan. Indonesia juga memiliki beribu pulau dan secara geografis wilayah Indonesia terletak antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta antara dua samudera yakni Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Letak seperti ini menempatkan Indonesia pada posisi yang amat strategis dalam tata hubungan internasional. Dengan demikian, Indonesia dituntut untuk mampu mempertahankan kedudukan strategis ini. Ini berguna untuk meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangsa dari rongrongan bangsa lain.

c. Kondisi Demografis Indonesia

Kondisi demografis merupakan gambaran penduduk Indonesia. Kondisi ini menjadikan Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menyikapinya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk atau rakyat Indonesia adalah kekayaan bangsa, yang patut dihargai keberadaannya. Di samping itu, penduduk juga sebagai lapisan awal modal dasar bangsa dalam proses pelaksanaan pembangunan. Tanpa penduduk mustahil pembangunan dapat terselenggara dengan baik. Pembangunan dapat terlaksana melalui pendekatan ketahanan nasional. Artinya penduduk beserta permasalahan yang ada di dalamnya perlu menjadi perhatian pemerintah, agar tidak menimbulkan permasalahan baru yang dapat mengancam kestabilan nasional. Kerja sama yang baik antara penduduk dengan pemerintah beserta aparat-aparat lainnya, seperti TNI atau POLRI diharapkan mampu menghalau kerawanan yang ditimbulkan dari permasalahan penduduk.

Saat ini Indonesia sudah cukup banyak dihadapkan pada permasalahan penduduknya, termasuk permasalahan ketenagakerjaan, tingkat pengangguran yang cukup tinggi, profil pendidikan penduduk beserta komponen pertumbuhannya. Hal ini perlu kita cermati bersama agar permasalahan yang ada tidak meluas, sehingga tidak mengganggu proses upaya pertahanan dan keamanan bangsa.

d. Potensi Sumber Daya Alam

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Baik itu berupa potensi lahan beserta isinya, perairan/laut yang cukup luas maupun kandungan yang tersimpan di dalam perut bumi Indonesia.

Wilayah Indonesia yang luas ini, banyak menyimpan potensi dan keragaman yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa

Indonesia harus memiliki kewaspadaan dan kemampuan untuk mengamankan serta mendayagunakan seluruh potensi alam tersebut untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia.

e. Perkembangan IPTEK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil budaya yang menjadi penopang kehidupan manusia. Penerapan IPTEK dewasa ini telah berkembang di segala bidang dengan sangat pesat.

Perkembangan IPTEK membawa perubahan kehidupan manusia dari masa ke masa. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang terlibat dalam perkembangan IPTEK dipandang perlu lebih cermat dan sigap untuk dapat menerima perubahan secara selektif.

Sebagai contoh perkembangan IPTEK di bidang transportasi. Baik darat laut, dan udara makin meluas serta intensif terjadi interaksi sosial antardaerah antarkawasan, bahkan antarnegara. Hal ini secara positif lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai dampak perkembangan, kemajuan dan pemanfaatan transportasi. Namun, kita tetap harus waspada dengan kemajuan di bidang transportasi ini. Oleh karena kemajuan di bidang ini, menjadi lahan empuk bagi sebagian orang yang memanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang negatif. Misalnya penyelundupan barang terlarang, obat-obatan terlarang narkoba, terorisme, dokumen terlarang, kejahatan nasional maupun internasional, migran gelap, dan pengedaran senjata. Ancaman seperti ini sangat kompleks dan rumit. Namun, kita tetap harus mengatasi dengan berbagai cara termasuk keterlibatan masyarakat.

Jadi, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan berbagai bentuk dan upaya yang dilakukan untuk dapat tetap menjaga keutuhan dan ketahanan negara. Baik dalam situasi dan kondisi apapun termasuk perkembangan IPTEK. Usaha pertahanan negara dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

Tujuan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sedangkan fungsi pertahanan negara untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

Bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya tentu akan selalu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, bangsa Indonesia harus memiliki kondisi bangsa yang dinamis, meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi (Ketahanan Nasionalisme).



TWODCT: Panji Masyarakat 17 November 2000

+CODCT#etk Beredarnya narkotika dan obat-obatan terlarang dapat merusak moral serta budaya bangsa.

Ketahanan nasionalisme berisi tentang keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari dalam dan dari luar. Ini dilakukan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Hakikat ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman dari luar yang berbentuk perusakan moral dan budaya bangsa, seperti peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Potensi ancaman luar lainnya adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol. Sedangkan ancaman dari dalam dapat berbentuk pemberontakan, perpecahan atau pertentangan antar-suku bangsa yang dapat menimbulkan gejolak nasional. Semua potensi ancaman tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan ketahanan nasional melalui berbagai cara, antara lain:

- 1) Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat. Ini dilakukan agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia.
- 2) Upaya peningkatan rasa cinta tanah air (patriotisme) melalui pemahaman dan penghayatan sejarah perjuangan bangsa.
- 3) Kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kecintaan terhadap tanah air serta menanamkan semangat juang untuk membela negara, bangsa dan tanah air. Di samping itu, untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi nasional dan UUD 1945 sebagai landasan berbangsa dan bernegara.
- 4) Untuk menghadapi potensi agresi bersenjata dari luar, selain menggunakan unsur kekuatan TNI, tentu saja kita dapat menggunakan unsur rakyat terlatih sesuai dengan sistem pertahanan nasional. Dengan doktrin ini, diharapkan bangsa Indonesia mampu mengidentifikasi berbagai masalah nasional. Hal ini termasuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap keamanan negara guna menghadapinya dengan tindakan yang perlu dilakukan.
- 5) Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dengan demikian, tidak menimbulkan rasa saling mencurigai satu dengan yang lain dalam menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Negara

Keamanan dan ketertiban negara merupakan syarat utama pendukung terwujudnya masyarakat yang madani, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri dilakukan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Ini sesuai dengan peraturan perundangan yaitu UU No. 2 Tahun 2002.



7W0DGT: Tempo, 14 Agustus 2005

+CODCT#et1 Kepolisian berfungsi untuk memelihara ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta terbinanya ketentuan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

a. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok kepolisian adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas kesehariannya kepolisian juga memiliki wewenang secara umum, antara lain:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam bidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Melalui fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang dinamis sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Tujuan Pembangunan nasional dapat terselenggara dengan baik ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat. Hal ini tentunya dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk gangguan, ancaman, hambatan dan tantangan yang dapat meresahkan masyarakat.

KEGIATAN 1.2

Untuk mengetahui apakah kalian memahami pentingnya usaha bela negara? Diskusikan dengan temanmu bagaimana usaha mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI!

B. Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara

Sebagai warga negara yang ingin negaranya tetap berdiri kokoh di tengah kuatnya arus globalisasi, apa yang harus kita lakukan? Sebelum diuraikan bentuk-bentuk usaha pembelaan negara, terlebih dahulu akan dibahas tentang hak dan kewajiban bela negara.

1. Hak dan Kewajiban Bela Negara

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui:

- a) Pendidikan kewarganegaraan
Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara.
- b) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
- c) Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib.
- d) Pengabdian sesuai dengan profesi
Pengabdian secara profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Kewajiban bela negara tercantum dalam UUD 1945, yaitu:

- a) Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa "*Setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara*". Maksudnya rakyatnya sebagai warga negara harus selalu siaga dalam usaha untuk membela bangsa dan negara.
- b) Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa "*Tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*". Maksudnya adalah bahwa setiap orang harus menjaga pertahanan dan setiap warga negara mampu menjaga keamanan agar tidak terjadi keresahan di masyarakat.

2. Contoh-contoh Bentuk Bela Negara

Ada beberapa contoh tindakan yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan upaya bela negara. Hal ini merupakan wujud kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.

a. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara untuk Menanamkan Jiwa dan Semangat Nasional

Dalam upaya kesadaran bela negara pemerintah telah menetapkan peraturan tentang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Pada tahap awal dilakukan secara terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran dari kurikulum pendidikan. Namun tidak merupakan mata pelajaran tersendiri. Kita perlu memahami bahwa PPBN bukan pendidikan kemiliteran, tetapi merupakan penanaman jiwa dan semangat nasional, penanaman jiwa patriot, dan penanaman jiwa militansi bagi pembangunan bangsa.

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam sistem pendidikan nasional, maka penyelenggaraannya harus tunduk pada undang-undang yang mengatur tentang pendidikan nasional. Undang-undang ini yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dilaksanakan melalui pendidikan formal dan non-formal.

Adapun tujuan dari PPBN adalah mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki sikap, tekad dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Sikap ini dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya warga negara yang mengerti, memahami, menghayati, serta meyakini untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara dengan memiliki ciri-ciri:

- 1) Cinta tanah air.
- 2) Sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
- 3) Yakin akan kesaktian Pancasila.
- 4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
- 5) Memiliki kemampuan awal bela negara.

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara ini diharapkan dapat kembali menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme seluruh warga negara Indonesia. Hal ini pada akhirnya dapat memperkokoh keutuhan NKRI.

b. Sistem Pertahanan Keamanan Negara

Menurut Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Sistem pertahanan keamanan negara ini dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh tata laku warga negara Indonesia yang mencerminkan

jiwa, semangat, mentalitas, tindakan dan perbuatan yang baik. Tata laku warga negara ini akan melahirkan identitas jati diri bangsa yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan. Hal ini akan menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air sehingga menciptakan nasionalisme yang kuat. Dengan demikian, mampu meningkatkan ketahanan nasional.

Dengan pendekatan ketahanan nasional tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan nasional. Pada hakikatnya, *ketahanan nasional* adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Jadi, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional, menghalau dan menindaklanjuti secara efektif segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang ada, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat fisik maupun non-fisik. Perwujudan ketahanan nasional meliputi hal-hal berikut:

- 1) *Ketahanan ideologi* adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Di samping itu, kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
- 2) *Ketahanan politik* adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mengandung kemampuan memelihara stabilitas yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.
- 3) *Ketahanan ekonomi* adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berasaskan Pancasila. Hal ini mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
- 4) *Ketahanan sosial budaya* adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman serta bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, membentuk kehidupan masyarakat Indonesia yang rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang. Kemampuan lain utamanya yaitu dapat menangkal budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

- 5) *Ketahanan pertahanan keamanan* adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat. Hal ini mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya. Di samping itu, adanya kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

P E N G A Y A A N

Ada dua ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan Indonesia, yaitu:

1. Ancaman dan gangguan dari dalam negeri, di antaranya:
 - a. Pemberontakan bersenjata dalam negeri.
 - b. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat.
 - c. Meningkatnya kriminalitas.
 - d. Tindakan KKN.
 - e. Subversi (gerakan atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang).
 - f. Kegiatan gerombolan pengacau.
 - g. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI.
 - h. Aksi radikalisme yang berlatar belakang etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila.
 - i. Konflik antarsuku, agama maupun ras/keturunan dalam skala luas.
 - j. Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.
2. Ancaman dan gangguan dari luar negeri, di antaranya:
 - a. Terorisme internasional.
 - b. Kejahatan lintas negara.
 - c. Kegiatan imigran gelap.
 - d. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
 - e. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
 - f. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan informasi rahasia militer.
 - g. Penjajahan oleh bangsa lain.

c. Kekuatan Pertahanan Keamanan Negara

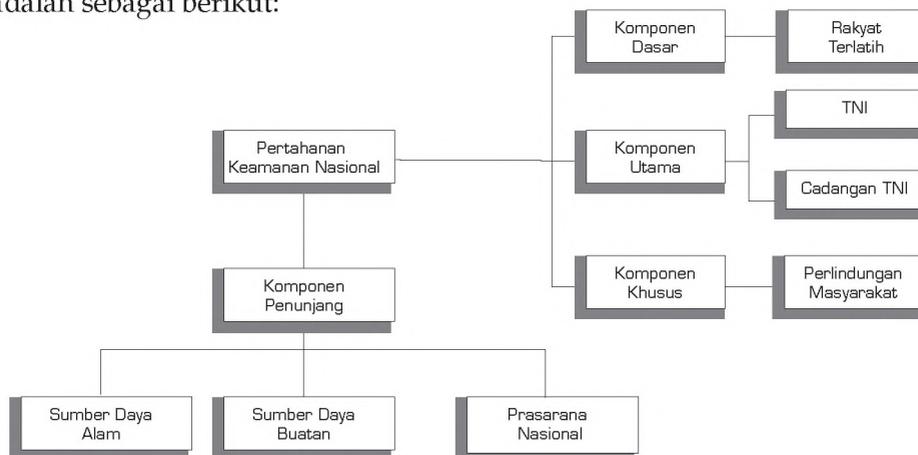


7W0D0T: Tempo, 28 Maret - 3 April 2005

+CODCT#etm Apabila ada ancaman terhadap negara dan bangsa, TNI merupakan komponen utama untuk menghadapi ancaman tersebut.

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Hal ini telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat cadangan komponen utama. Sedangkan komponen pen-

dukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama serta komponen cadangan. Komponen-komponen sistem pertahanan negara ini diatur dengan undang-undang. Apabila digambarkan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:



&CICE#ete Komponen-komponen sistem pertahanan negara

KEGIATAN 1.3

Buatlah pada kertas kerjamu kliping tentang bentuk-bentuk usaha pembelaan negara! Berikan komentar atau ulasan secara berkelompok!

C. Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara

Sebagai warga negara yang cinta terhadap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentulah kita perlu mengembangkan kesadaran untuk turut serta dalam upaya bela negara. Berikut ini bentuk-bentuk partisipasi warga negara.

1. Bentuk Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Bentuk partisipasi warga negara dalam bela negara dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut uraiannya.

a. Bentuk Partisipasi Bela Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat

Upaya bela negara yang dilakukan setiap warga negara Indonesia dapat beragam bentuknya, antara lain:

- 1) Turut serta dalam keterlibatan sebagai Rakyat Terlatih yang berfungsi menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat.
- 2) Apabila keadaan ekonomi nasional telah pulih dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan diadakannya wajib militer bagi warga negara yang telah memenuhi syarat, seperti yang banyak dilakukan di negara-negara maju. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan cadangan Tentara Nasional Indonesia selama waktu yang telah ditentukan.



7WOD3T: Tempo, 29 Desember 2002

- 3) Turut serta dalam mobilisasi umum apabila diperlukan, seperti dalam keadaan darurat baik perang, bencana alam atau keadaan lainnya.

+CODCT#eten Pendidikan agama baik formal maupun non-formal di kalangan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menangkal pengaruh budaya asing.

- 4) Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa. Dengan jalan lebih bertaqwa kepada Allah melalui ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

b. Bentuk Partisipasi Bela Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Sekarang ini kesadaran bela negara perlu benar-benar ditanamkan guna menangkal berbagai potensi ancaman. Dalam kehidupan bernegara upaya bela negara dapat dilakukan dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan integritas kepribadian bangsa. Contoh meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan semangat kekeluargaan.
- 2) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati inti demokrasi di Indonesia.
- 3) Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian tulus kepada masyarakat.
- 4) Berperan aktif memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata.
- 5) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan menjunjung tinggi pengakuan hak asasi manusia.



7WODGT: Tempo, 6 Mei 2001

+CODXT#etee Berkarya nyata untuk bangsa dan negara merupakan salah satu upaya warga negara dalam bela negara.

Seluruh komponen bangsa harus berperan dan berpartisipasi aktif dalam melakukan tindakan bela negara. Oleh karena itu, berbagai potensi konflik baik yang datangnya dari dalam atau dari luar yang dapat mengganggu keamanan dan keutuhan bangsa serta negara dapat diatasi semaksimal mungkin atau bahkan dilenyapkan dari muka bumi pertiwi.

Seluruh rakyat Indonesia harus sadar akan tanggung jawabnya, sadar akan hak dan kewajibannya. Di samping itu, sadar akan peranannya sebagai partisipan yang turut secara aktif dan kreatif dalam pembangunan bangsanya.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang dilaksanakan secara adil dan merata. Ini merupakan unsur terpenting membangun kesadaran bangsa dalam upaya mempertahankan keutuhan dan kekuatan bangsa.

Wujud ketahanan, keutuhan dan keamanan negara tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat Indonesia. Kondisi tersebut memiliki kemampuan bangsa dalam memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara, mengamankan pembangunan serta mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Ketahanan pertahanan dan keamanan nasional merupakan keuletan serta ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapan dan kesiagaan bangsa serta upaya bela negara rakyat Indonesia. Hal ini menjadi perjuangan rakyat semesta, dimana seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, kepolisian disusun dan dikerahkan secara terpimpin, terorganisir, terintegrasi dan terkoordinasi. Ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci

1. Bela negara
2. Prinsip bela negara
3. Tujuan negara
4. Fungsi negara
5. Unsur negara
6. Unsur konstitutif
7. Unsur deklaratif
8. Penduduk
9. Rakyat
10. Warga negara
11. Bangsa
12. Wilayah
13. Pemerintah
14. Negara kesatuan
15. Kedaulatan
16. Pertahanan negara
17. Ketahanan negara
18. Ketahanan nasional
19. Nasionalisme
20. Patriotisme
21. Keamanan negara
22. Ketertiban negara
23. Hak bela negara
24. Kewajiban bela negara
25. Wawasan nusantara
26. Partisipasi

RANGKUMAN

1. *Upaya bela negara* adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan.
3. *Negara* adalah suatu organisasi sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
4. Tujuan Negara Kesatuan RI dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: "*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan perdamaian dunia, berdasarkan persamaan dan kemerdekaan.*"
5. *Unsur Konstitutif* berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.
6. *Unsur Deklaratif* berarti bahwa dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional yang bersifat formalitas, yang ditunjukkan dengan adanya tujuan negara, undang-undang dasar, dan arti strategis untuk membina hubungan kerja sama dan penghormatan serta pengakuan kedaulatan dari negara lain.
7. Usaha pertahanan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan RI dilatarbelakangi oleh kesamaan sejarah, kedudukan geografis dan geostrategis, kondisi demografis bangsa Indonesia, potensi sumber daya alamnya serta perkembangan IPTEK.
8. *Ketahanan Nasional* adalah keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam dan dari luar. Ketahanan Nasional dilakukan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
9. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri dilakukan melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian.
10. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
11. Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Menegakkan hukum.
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

12. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan kewarganegaraan.
 - b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
 - c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib.
 - d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
 13. Dasar hukum pelaksanaan kewajiban bela negara diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan pasal 30 ayat (1) dan juga diatur dalam UU RI No. 3 Tahun 2002.
 14. Kewajiban warga negara dalam upaya bela negara memiliki ciri-ciri, antara lain:
 - a. Cinta Tanah Air.
 - b. Sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
 - c. Yakin akan kesaktian Pancasila.
 - d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
 - e. Memiliki kemampuan awal bela negara.
 15. Sistem pertahanan keamanan negara Indonesia dilakukan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Sistem ini menekankan rakyat berserta seluruh kemampuannya untuk melaksanakan upaya pertahanan dan keamanan negara secara fisik ataupun nonfisik dengan TNI sebagai kekuatan intinya.
 16. Kekuatan pertahanan keamanan negara menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
-

Soal-Soal Latihan

A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

1. Perhatikan pernyataan berikut ini!
 - 1) Adanya wilayah.
 - 2) Adanya undang-undang dasar.
 - 3) Adanya pengakuan dan penghormatan dari negara lain.
 - 4) Adanya pemerintahan yang berdaulat.
 - 5) Adanya hubungan kerja sama dengan negara lain.

Yang merupakan unsur deklaratif berdirinya suatu negara adalah ditunjukkan oleh nomor

- a. 1, 2, dan 3
 - b. 2, 3, dan 5
 - c. 3, 4, dan 5
 - d. 1, 4, dan 5
2. Syarat penting yang harus dipenuhi oleh negara yang ingin melakukan hubungan diplomatik adalah
- a. merdeka
 - b. rakyat
 - c. pemerintah yang daulat
 - d. undang-undang
3. Fungsi negara sebagai pengatur kehidupan dalam suatu negara demi tercapainya
- a. hukum negara
 - b. politik negara
 - c. tujuan negara
 - d. ideologi negara
4. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pernyataan ini merupakan
- a. tujuan bela negara
 - b. prinsip bela negara
 - c. hakikat bela negara
 - d. modal dasar bela negara
5. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1. Penduduk
 2. Warga negara
 3. Bukan penduduk
 4. Penghuni negara
 5. Bukan warga negara
- Pernyataan di atas merupakan pembelaan rakyat berdasarkan hubungan dengan pemerintah negaranya, ditunjukkan oleh pasangan nomor
- a. 1, 3, dan 5
 - b. 2, 4, dan 5
 - c. 1, 3, dan 4
 - d. 1, 2, dan 5
6. Berikut yang merupakan unsur-unsur terbentuknya suatu negara adalah
- a. adanya persamaan keturunan, kesamaan tujuan dan cita-cita serta sepenanggungan
 - b. adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat
 - c. adanya pengakuan *de facto* dan *de Jure*
 - d. terdapatnya tujuan dan cita-cita, hukum dasar tertulis, dan pengakuan penuh dari seluruh rakyat
7. Penetapan batas-batas wilayah suatu negara dilakukan melalui
- a. intervensi negara lain
 - b. perjanjian
 - c. kehendak sendiri
 - d. dukungan dari negara lain

8. Batas negara belum dilakukan pengukuran batas-batasnya secara tepat. Kemudian diambilah patokan-patokan alam. Batas negara seperti ini merupakan batas negara secara
 - a. spontan
 - b. buatan
 - c. alamiah
 - d. kesepakatan pengakuan
9. Batas negara yang memiliki kedaulatan atas laut berjarak hingga 12 mil laut dari garis lurus pantainya disebut
 - a. Batas Landas Continen
 - b. batas ZEE
 - c. Batas Zona Bersebelahan
 - d. Batas Laut Teritorial
10. Yang *bukan* merupakan hak negara pantai dalam batas ZEE adalah
 - a. nelayan asing menangkap ikan dalam wilayah ZEE
 - b. menggali dan mengolah kekayaan alam lautan
 - c. melakukan kegiatan ekonomi tertentu
 - d. negara diperkenankan memasang alat kabel atau pipa di bawah lautannya
11. Penentuan batas wilayah suatu negara baik daratan dan atau lautan dibuat dalam bentuk
 - a. traktat
 - b. dokrin
 - c. agresi
 - d. invasi
12. Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara diatur dalam UUD 1945 pasal
 - a. 26 dan 27
 - b. 27 dan 29
 - c. 27 dan 30
 - d. 28 dan 30
13. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui
 - a. pengabdian sesuai dengan profesi
 - b. wajib militer untuk setiap warga negara tanpa kecuali
 - c. turut menjadi informan asing
 - d. turut serta dalam upaya intervensi negara lain
14. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara bertujuan mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki jiwa
 - a. nasionalisme, individualisme, dan patriotisme
 - b. individualisme, patriotisme, dan chauvinisme
 - c. nasionalisme, patriotisme, dan Pancasila
 - d. individualisme, patriotisme, dan Pancasila

15. Alat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok menegakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahnya adalah
 - a. TNI
 - b. POLRI
 - c. Presiden
 - d. MPR

16. Yang *bukan* merupakan alat utama pertahanan keamanan nasional adalah
 - a. TNI
 - b. Rakyat Terlatih
 - c. cadangan TNI
 - d. POLRI

17. Tujuan keterlibatan warga negara sebagai rakyat terlatih yaitu
 - a. memberikan pembekalan mental spiritual warga negaranya
 - b. turut serta dalam mobilisasi
 - c. meningkatkan pendapatan individu
 - d. menjaga ketertiban, keamanan dan melindungi masyarakat

18. Keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa merupakan inti dari
 - a. hakikat ketahanan nasional
 - b. konsepsi ketahanan nasional
 - c. asas ketahanan nasional
 - d. wawasan nusantara

19. Sistem pertahanan keamanan di Indonesia adalah
 - a. ketahanan nasional
 - b. pertahanan keamanan rakyat semesta
 - c. disiplin nasional
 - d. stabilitas nasional yang dinamis

20. Yang merupakan bentuk bela negara secara non-fisik adalah
 - a. turut serta sebagai rakyat terlatih
 - b. turut serta pelatihan dasar kemiliteran
 - c. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku
 - d. meningkatkan pengabdian sebagai prajurit TNI

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar pada buku tulismu!

1. Jelaskan prinsip bela negara menurut pendapatmu, jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi Indonesia!
2. Jelaskanlah arti penting partisipasi warga negara dalam upaya bela negara!

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan usaha bela negara?
4. Sebutkan unsur konstitutif berdirinya suatu negara!
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perwujudan wawasan nusantara sebagai satu pertahanan keamanan!
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara!
7. Sebutkan contoh-contoh bentuk bela negara yang dapat kalian lakukan sebagai seorang pelajar!
8. Sebutkan dan jelaskan sistem pertahanan keamanan Indonesia!
9. Sebutkan bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!
10. Jelaskan peranan POLRI dalam upaya bela negara di Indonesia!

C. Tes Unjuk Kerja

1. Lakukan studi kepustakaan pengamatan melalui media massa terhadap perilaku bela negara warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salin dan isilah tabel di bawah ini pada buku tulismu! Kemudian simpulkan hasil pengamatanmu!

No.	Nama	Urutan perilaku			
		Fisik	Non-Fisik	Bermasyarakat	Bernegara

2. Diskusikanlah bersama teman-temanmu tentang upaya dan partisipasi bela negara yang telah kalian lakukan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Tulislah pada buku tulismu hasil diskusi kalian ke dalam bentuk laporan tertulis!

Bab II

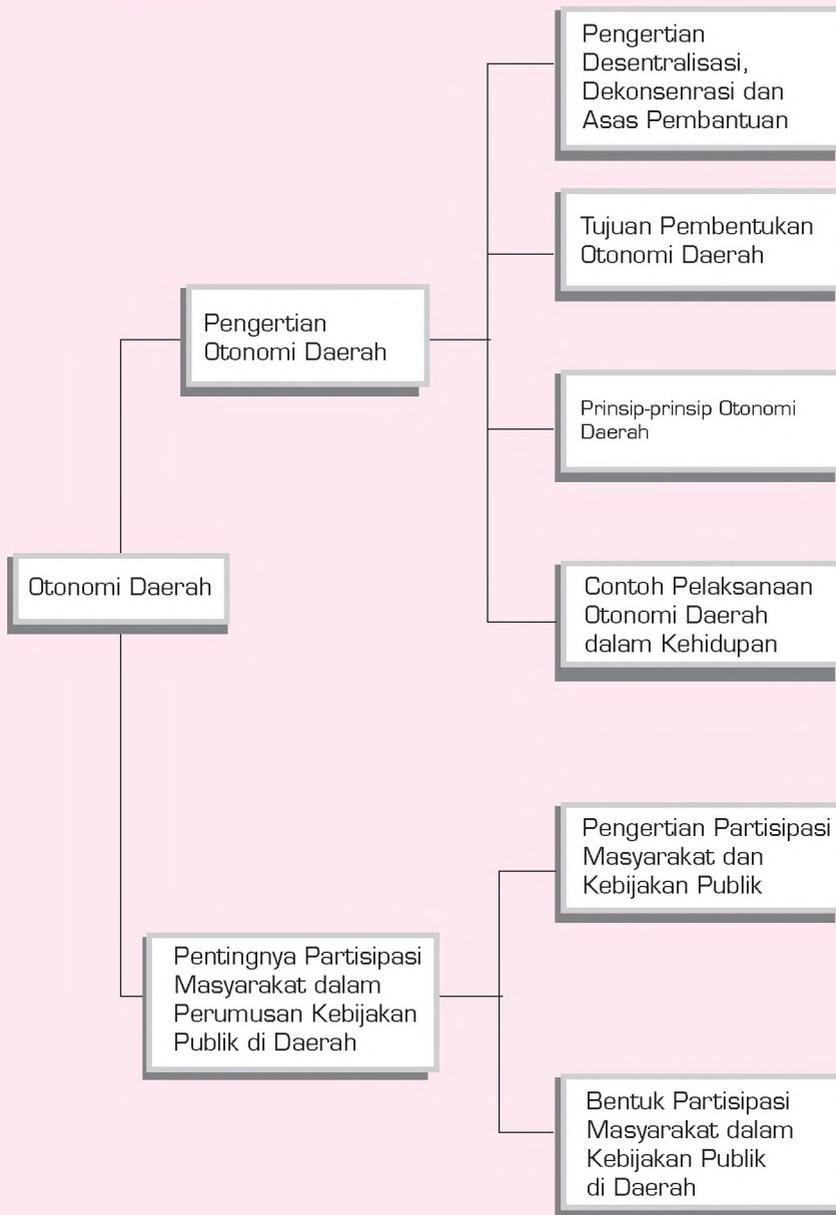
Otonomi Daerah

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan pengertian prinsip dan tujuan pembentukan otonomi daerah;
2. memahami kewenangan daerah otonom;
3. memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan politik;
4. menunjukkan contoh bentuk-bentuk kebijakan publik di daerah;
5. memberikan contoh partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah dan perumusan kebijakan publik di daerah;
6. Siswa mampu menjelaskan akibat/konsekuensi bila tidak ada partisipasi dalam perumusan/pelaksanaan kebijakan publik.

PETA KONSEP



Otonomi Daerah memberikan peluang yang optimal bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kepemimpinan yang terbuka dari segenap penyelenggara pemerintahan daerah merupakan salah satu syarat bagi berkembangnya pembangunan dan pemerintahan yang demokratis. Salah satu keterbukaan dalam kepemimpinan pemerintah daerah, adanya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.



7KODG33 Tempo, Januari-Februari 2004
+CODCT#ftet Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik.

Keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan meliputi berbagai bidang yaitu politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk tercapainya pelaksanaan yang lebih optimal atas kegiatan-kegiatan itu, maka perlu adanya suatu kebijakan publik yang memuat pendapat rakyat dan pendapat para pejabat negara yang mewakili rakyat.

Dasar hukum otonomi daerah adalah Undang-Undang RI No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 ini merupakan undang-undang pemerintahan daerah yang dibuat berdasarkan pasal 18 UUD 1945.

Pengertian otonomi daerah, pentingnya partisipasi dan proaktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, serta langkah-langkah aktif dalam memecahkan masalah berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah akan kita pelajari dalam uraian berikut ini.

A. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *auto* artinya sendiri, sedangkan *nomos* artinya undang-undang. Jadi, otonomi artinya undang-undang sendiri (*Zelfwetgeving*; dikutip: Drs. Djam'an Djajoeki, M.Pd. 1999. *Sistem Pemerintahan di Daerah*. hal. 7. Jurusan PMPKn. FPIPS, IKIP Bandung). Di Indonesia otonomi mengandung arti perundangan (*regeling*) dan pemerintahan (*bestuur*). Dengan diberikannya hak dan kekuasaan perundang-undangan serta pemerintahan kepada daerah otonomi (seperti provinsi, kabupaten/kota) diharapkan daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Misalnya, membentuk peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan UUD atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Daerah otonom disebut juga daerah. *Daerah* ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melihat luas/batas-batas rumah tangga suatu daerah, dapat ditinjau dari dua sudut yaitu:

1. *Sudut materi* maksudnya isi dan luas rumah tangga daerah tersebut tergantung dari sistem rumah tangga yang digunakan. Menurut The Liang Gie dan Van der Pot, isi dan luasnya rumah tangga daerah meliputi:
 - a. *Rumah tangga secara materiil*: adanya pembagian kewenangan/tugas secara rinci antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tegas dalam undang-undang pembentukannya.
 - b. *Rumah tangga secara formal*: tidak terdapatnya perbedaan (baik sifat maupun urusan) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah otonom. Setiap kesatuan masyarakat hukum dapat mengerjakannya. Pembagian tugas didasarkan pada pertimbangan rasional dan praktis sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.
2. *Sudut teritorium* maksudnya luas kekuasaan otonomi suatu daerah terbatas pada luas wilayahnya saja. Jadi, di luar batas wilayahnya, daerah otonom tidak mempunyai kekuasaan meskipun terhadap penduduk sendiri.

1. Pengertian Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Asas Pembantuan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan *asas otonomi* dan *tugas pembantuan*.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

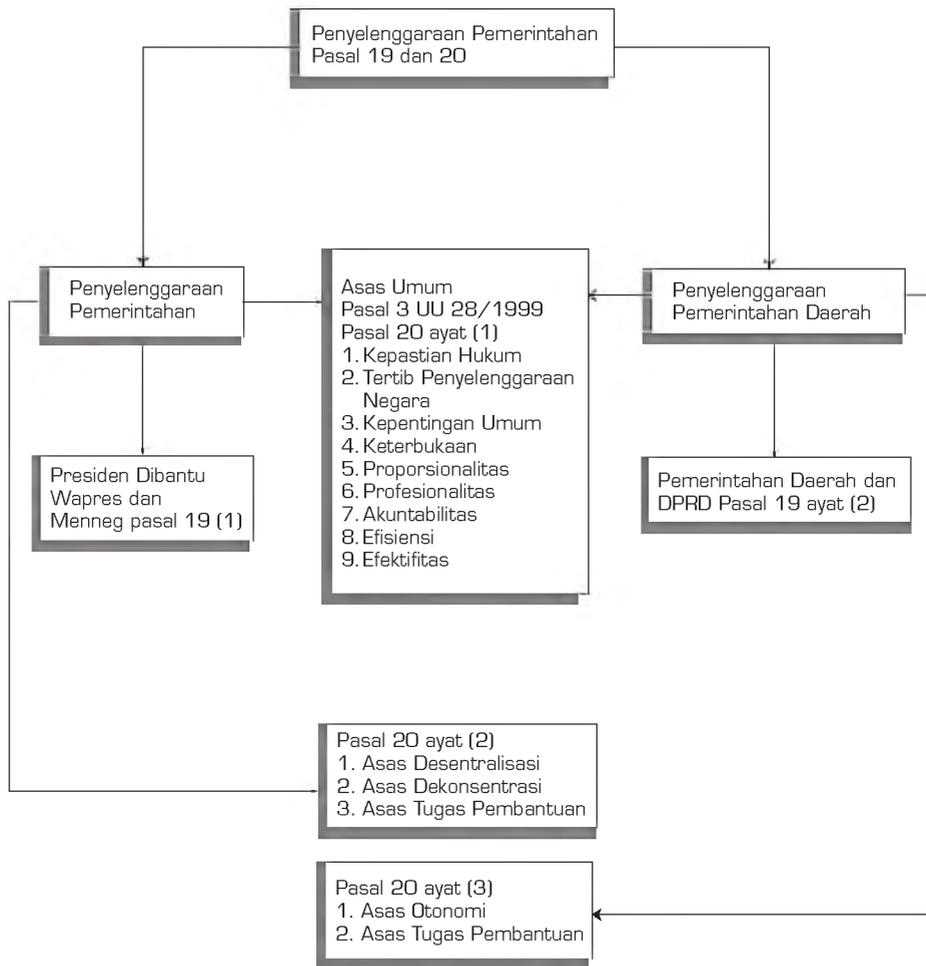
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas pembantuan adalah penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu dari:

- a. Pemerintah kepada daerah dan/atau desa.

- b. Pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa.
- c. Pemerintah kabupaten/kota kepada desa.

Pemerintahan daerah yang ingin dikembangkan dewasa ini bertumpu pada nilai demokratisasi, pemberdayaan, dan pelayanan. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya. Dengan demikian, seluruh potensi dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dikembangkan.



7W0D9Zu | Widiarta, 2005 halaman 34

Asas Penyelenggaraan pemerintahan menurut UU No. 32 Tahun 2004 (tentang Pemerintahan Daerah).

Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengacu kepada UUD 1945, dan Undang-undang. Isi pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai berikut.

Pasal 18:

Ayat (1) berbunyi, *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang.”*

Ayat (2) berbunyi, *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

Ayat (3) berbunyi, *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”*

Ayat (4) berbunyi, *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”*

Ayat (5) berbunyi, *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”*

Ayat (6) berbunyi, *“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”*

Pasal 18A:

Ayat (1) berbunyi, *“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”*

Ayat (2) berbunyi, *“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”*

Pasal 18B:

Ayat (1) berbunyi, *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”*

Ayat (2) berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."



7W002511 Swara Otonomi, Desember 2003

+CODCT# fte
Pembangunan sarana jalan merangsang tumbuhnya perekonomian daerah secara efektif dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi daerah.

Asas desentralisasi dan otonomi dapat memacu keterlibatan masyarakat dalam proses pencarian fakta dan data lapangan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, untuk kemajuan daerahnya. Demikian pula keterlibatan pemerintah daerah sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan yang efektif dan sesuai dengan tuntutan partisipasi masyarakat lokal.

2. Tujuan Pembentukan Otonomi Daerah

Terbitnya Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah wujud nyata reformasi dalam sektor pemerintahan demokratis. Inilah yang menjadi tuntutan aspirasi masyarakat Indonesia dewasa ini. Dengan kebijakan ini diharapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab mampu memberdayakan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dilaksanakan secara lebih aspiratif, partisipatif, dan demokratis bersama seluruh unsur kekuatan masyarakat di daerah.

Kebijakan otonomi daerah diharapkan akan mampu memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi, dan keanekaragaman daerah.

a. Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintah daerah. Daerah-daerah ini berwenang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah (daerah yang bersandingan) atau pemekaran suatu daerah menjadi dua/lebih daerah.

Daerah tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain.

Pemerintah daerah terdiri dari gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat daerah lainnya. Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.

Perangkat daerah lainnya menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, terdiri atas:

- 1) Sekretariat daerah propinsi dipimpin oleh Sekretaris daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wakilkota.
- 2) Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Dinas daerah ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang diangkat oleh kepala daerah.
- 3) Lembaga teknis daerah propinsi yang dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Misalnya : Badan Penelitian dan Pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan

b. Kewenangan dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah



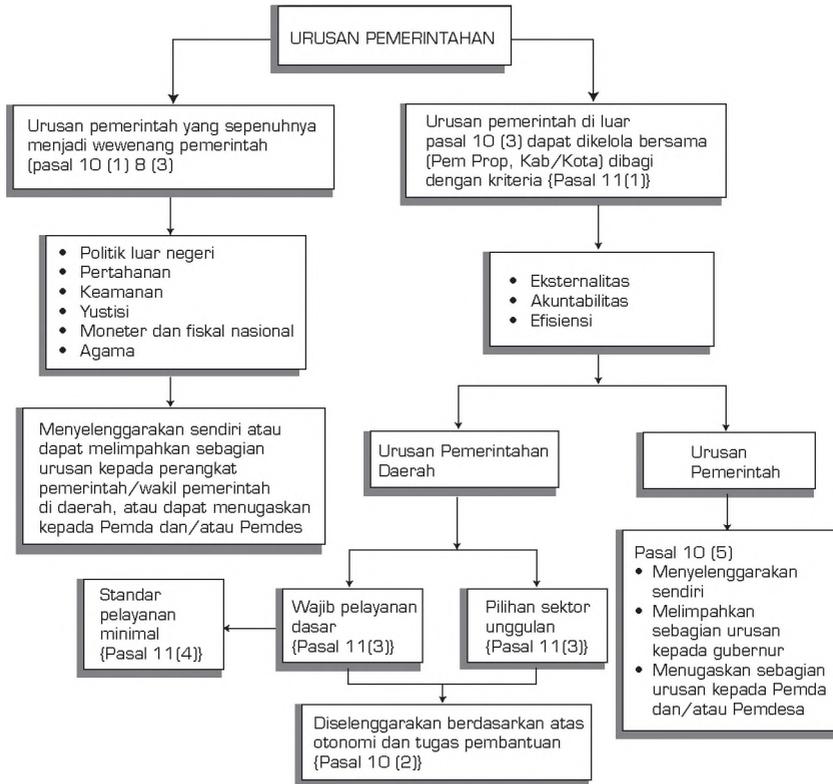
TWODGTV Tempo: 1 - 7 Agustus 2005

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.

+CODCT#ftf# Mengadakan pendidikan dasar merupakan urusan wajib pemerintahan daerah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi:

- 1) *Urusan wajib* adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, misalnya pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal dan prasarana lingkungan dasar.
- 2) *Urusan pilihan* adalah urusan yang terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.



7W06DGTU / Widiarta, 2005 halaman 23

Urusan Pemerintahan Daerah.

/GVGTCPICP:

- Eksternalitas** : pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
- Akuntabilitas** : pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih dekat/langsung dengan dampak dari urusan yang ditangani tersebut.
- Efisiensi** : bila suatu urusan yang penanganannya lebih berdaya guna dilaksanakan oleh strata pemerintahan tertentu, maka strata pemerintahan itulah yang lebih tepat untuk menangani urusan pemerintahan.

Beberapa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 dan pasal 14 UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, intinya meliputi:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- 2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- 5) Penanganan bidang kesehatan.
- 6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
- 7) Penanggulangan masalah sosial.
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- 9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- 10) Pengendalian lingkungan hidup.
- 11) Pelayanan pertanahan.
- 12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal.
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.



TWODGT: Tempo, Desember-Januari 2003

+CODCT#ftg Tambang batu bara di Provinsi Kalimantan Timur. Ini merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya nasional.

Daerah berwenang pula mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang tersedia di wilayahnya. Di samping itu, daerah bertanggung jawab dalam memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wilayah daerah provinsi terdiri atas wilayah darat dan laut. Kewenangan daerah di wilayah laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut. Kewenangan daerah di wilayah darat meliputi pengaturan

kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegakkan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, dan bantuan penegakkan keamanan serta kedaulatan negara.

Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan sumber dana, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan

kewenangan yang diserahkan tersebut. Selanjutnya Pemda dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan memberi kemudahan-kemudahan berupa:

- 1) Penyediaan sarana prasarana.
- 2) Dana stimulan.
- 3) Pemberian modal usaha.
- 4) Bantuan teknis.
- 5) Keringanan biaya.
- 6) Percepatan pemberian izin.

Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sendiri. Untuk itu pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang antara lain:

- 1) Pendapatan asli daerah yang terdiri dari:
 - a) Hasil pajak daerah.
 - b) Hasil retribusi daerah.
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - e) Dana perimbangan
- 2) Dana bagi hasil (bersumber dari pajak dan sumber daya alam) terdiri dari:
 - a) Dana alokasi umum.
 - b) Dana alokasi khusus.
- 3) Pinjaman daerah
- 4) Lain-lain pendapatan

Peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu mencapai tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah ialah untuk mewujudkan kesejahteraan keadilan masyarakat dan meringankan beban masyarakat. Segala permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan menjadi masukan dan perbaikan bagi pemerintah dan perundang-undangan otonomi.

3. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam otonomi daerah, yaitu:

- a. *Prinsip otonomi seluas-luasnya* artinya daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-undang (misalnya selain bidang-bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama).
- b. *Prinsip otonomi nyata* adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah.

- c. *Prinsip otonomi bertanggung jawab* adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

4. Contoh Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam kenyataan hidup sehari-hari kita dapat melakukan langkah-langkah aktif berkaitan dengan otonomi daerah. Berikut berbagai perilaku yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah.

a. Di Lingkungan Keluarga

Contoh pelaksanaan otonomi daerah (otda) dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, di antaranya:



WODGT: 50 Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia

Kita diberi kepercayaan oleh orang tua untuk belajar, mengatur uang dan lain-lain. Ini merupakan pelaksanaan otda dalam kehidupan keluarga.

- 1) Menyelesaikan semua persoalan keluarga secara musyawarah untuk mencapai keputusan sebaik-baiknya demi kepentingan keluarga. Segenap anggota keluarga melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab.
- 2) Anak-anak dalam suatu keluarga diberi kepercayaan oleh orang tua untuk belajar. Mereka juga diberi kepercayaan untuk mengatur keperluannya sesuai dengan uang yang diterima dari orang tuanya.
- 3) Orang tua memberi keleluasaan kepada putra dan menantunya untuk menyelesaikan persoalan dan mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Di Lingkungan Sekolah

Contoh pelaksanaan otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, di antaranya:

- 1) Dengan manajemen berbasis sekolah, guru maupun sekolah masing-masing memiliki hak otonom untuk mengembangkan kualitas pendidikan. Akan tetapi, hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolahnya masing-masing.



7WODGT: Profil Provinsi Republik Indonesia

+CODCT#fti Hak otonomi untuk mengembangkan kualitas pendidikan. Ini tergantung juga pada kreatifitas siswa, situasi, dan kondisi sekolah masing-masing.

- 2) Para siswa di kelas, melalui bimbingan wali kelas melaksanakan program sekolah sesuai dengan kemampuan masing-masing kelas. Misalnya, dalam pengaturan jadwal piket kelas, perencanaan acara kelas, dan penataan ruang kelas, diserahkan sepenuhnya kepada kreatifitas siswa.
- 3) OSIS tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. OSIS juga mempersiapkan pengkaderan bagi para siswa dengan pelatihan kepemimpinan, keterampilan, dan tanggung jawab.

c. Di Lingkungan Masyarakat

Contoh pelaksanaan otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, di antaranya:



7WODGT: 2-8 Agustus 2004

+CODCT#ftj Setiap partai politik berusaha menegakkan demokrasi Pancasila dan menampung berbagai aspirasi masyarakat. Inilah pelaksanaan otda dalam lingkungan masyarakat.

- 1) Beberapa organisasi masyarakat berperan penting dalam menampung berbagai aspirasi masyarakat.
- 2) Setiap partai politik berusaha memajukan masing-masing partainya dalam menegakkan demokrasi Pancasila dan aspirasi rakyat. Hal ini dijalankan sesuai dengan fungsi partai politik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik.
- 3) Masyarakat di tingkat RT atau RW melaksanakan program yang dicanangkan pemerintah desa/kelurahan sesuai dengan kemampuan warga setempat. Misalnya dalam penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan, program PKK dan penataan pembangunan, serta lingkungan hidup.

- 4) Karang Taruna menjadi sarana bagi para pemuda untuk menampung dan menyalurkan bakat dan aspirasi mereka.

d. Media Masa

Contoh pelaksanaan otonomi daerah pada media massa, di antaranya:

- 1) Media massa cetak maupun elektronik menampung suara pembaca atau dialog interaktif. Ini dilakukan untuk mendapat tanggapan dari pihak terkait sehingga masalah-masalah dapat segera diselesaikan.
- 2) Media massa menjadi sarana penyampaian informasi tentang pembangunan daerah bagi masyarakat.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat

Di samping sebagai penyalur aspirasi masyarakat, LSM mengawasi kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dalam pembangunan.

Peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu mencapai tujuan otonomi daerah. *Tujuan otonomi daerah* adalah mewujudkan kesejahteraan keadilan masyarakat dan meringankan beban masyarakat. Segala permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan menjadi masukan bagi pemerintah dan perbaikan perundang-undangan otonomi daerah di masa mendatang.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Daerah



TWODGT: Tempo, 25 Juni 2006

+CODCT#ftk Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam proses perumusan, pembuatan, dan pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan publik dalam perumusannya tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Mengapa demikian? Karena dengan peran aktif masyarakat, maka proses perumusan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah mencapai cita-cita masyarakat Indonesia yang adil makmur, sejahtera materil dan spirituil. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik ini tidak tampak, maka mustahil keberadaan dan pelaksanaan produk hukum yang baru dapat terwujud dengan baik.

Untuk lebih memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, marilah kita pelajari uraian berikut ini.

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Publik

a. Partisipasi Masyarakat (*Social Participation*)

Partisipasi menurut Davis diartikan sebagai keterlibatan emosi dan mental seseorang dalam situasi kelompok yang memberinya semangat untuk mendukung tujuan-tujuan kelompok dan turut serta bertanggung jawab kepada kelompok.

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah dan memiliki aturan untuk mencapai tujuan bersama.

Istilah partisipasi masyarakat muncul dalam persyaratan kepemimpinan yang terbuka (*open management*) suatu pemerintahan demokratis. Dalam kegiatan ini, maka *partisipasi masyarakat* ialah ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan.

b. Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Kebijakan publik ialah tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kata *publik* dalam kebijakan publik menegaskan bahwa keputusan pribadi atau kelompok yang berakibat bagi publik (umum) belum tentu dikatakan sebagai suatu kebijakan publik.

Menurut A. Hoogerwerf ada dua unsur yang membedakan apakah suatu kebijakan itu dapat disebut sebagai kebijakan publik atau kebijakan individu/kelompok, yaitu:

- 1) Kebijakan publik mengenai langsung atau tidak langsung semua anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu.
- 2) Kebijakan publik mengikat bagi anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu. Oleh karena kebijakan publik mengikat, maka selalu timbul pertanyaan apa yang menjadi ukuran kebijakan itu.

Thomas R. Dye menyatakan bahwa suatu kebijakan tidak dapat menjadi kebijakan publik bila tanpa dirumuskan, disahkan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, serta yudikatif.

Beberapa keputusan kebijakan yang tidak dikategorikan kepada kebijakan publik, misalnya keputusan-keputusan pengangkatan pejabat

secara rutin atau promosi-promosi yang tidak berdasarkan keahlian dan kemampuan. Pengangkatan ataupun promosi tersebut hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan pejabat yang lebih tinggi.

James E. Anderson dalam bukunya *Public Policy Making*, menyampaikan lima hal yang bisa dikategorikan ke dalam kebijakan publik. Inti dari buku tersebut adalah:

- 1) *Kebijakan substantif/prosedur* adalah kebijakan yang menekankan pada pokok masalah/pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Kebijakan substantif misalnya kebijakan politik luar negeri, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan sebagainya. Kebijakan prosedural misalnya prosedur pembuatan undang-undang (sebagai perwujudan kebijakan publik) perpajakan yang melibatkan beberapa pihak dalam perumusannya.
- 2) *Kebijakan-kebijakan distributif, redistributif, regulator (pembatasan/pelarangan) dan pembatasan bagi sekelompok orang*. Kebijakan/keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk, individu, kelompok, perusahaan atau masyarakat tertentu. Misalnya, pemberian fasilitas "tax holiday" bagi perusahaan yang baru berdiri, kebijakan tentang pemberian subsidi pada badan-badan usaha yang berprestasi, dan kebijakan berobat gratis bila terjadi wabah penyakit menular.

Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memindahkan pengalokasian kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak antar-kelas atau kelompok. Misalnya kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum, kebijakan untuk pemberian dana sosial, dan sebagainya.

Kebijakan regulator (regulatory policies) adalah kebijakan tentang pelarangan/pembatasan perbuatan bagi seseorang atau sekelompok orang. Misalnya kebijakan yang melarang penggunaan senjata api tanpa surat-surat yang sah, kebijakan tentang pembatasan penjualan obat-obatan jenis tertentu secara bebas dan sebagainya.

Kebijakan pembatasan bagi sekelompok orang (self regulatory) adalah pembebasan/pengawasan perbuatan pada masalah tertentu bagi sekelompok orang. Misalnya kebijakan tentang pemberian izin kerja, mengemudi kendaraan bermotor, dan sebagainya.

- 3) *Kebijakan material dan simbolik*
Kebijakan material adalah kebijakan tentang pengalokasian sumber material yang nyata bagi penerimanya. Misalnya, kebijakan pemerintah daerah untuk menyediakan perumahan murah bagi warganya, kebijakan yang mewajibkan majikan membayar upah minimum bagi pekerja (buruh)-nya.



+CODCT#ft1 Salah satu contoh kebijakan material, yaitu kebijakan pemerintah daerah yang mewajibkan pengusaha/majikan membayar upah minimum bagi pekerja.

7W0E6T: Tempo, Desember-Januari 2001

Kebijakan simbolik adalah kebijakan yang tidak bersifat memaksa karena hanya memiliki dampak yang relatif kecil bagi masyarakat. Jadi, kebijakan itu lebih bersifat simbolik, misalnya kebijakan yang melarang setiap orang berjalan di atas rumput di taman kota.

- 4) Kebijakan barang-barang kolektif dan barang-barang pribadi
Kebijakan barang-barang kolektif dan barang-barang pribadi adalah kebijakan tentang pelayanan dan penyediaan barang-barang kepentingan orang banyak dan untuk kepentingan perorangan. Kebijakan barang kolektif (*collective goods policies*), misalnya pengadaan kebutuhan bahan-bahan pokok sehari-hari. Sedangkan kebijakan barang-barang kepentingan perorangan (*private goods policies*), misalnya kebijakan berupa penyediaan perumahan, tempat hiburan, sarana kesehatan, dan sebagainya.
- 5) Kebijakan liberal dan konservatif
Kebijakan liberal dan konservatif adalah kebijakan yang menganjurkan pemerintah untuk mengadakan perubahan sosial dan melarang adanya perubahan sosial. Contoh kebijakan liberal, misalnya kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan/kelemahan dalam peraturan-peraturan sosial, kebijakan untuk meningkatkan program ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan konservatif, misalnya kebijakan yang mempertahankan peraturan sosial yang sudah ada.

Dari beberapa pandangan di atas, maka pengertian *kebijakan publik* adalah suatu cara pemerintah yang telah disepakati bersama untuk memenuhi tanggung jawabnya, seperti melindungi hak-hak individu warga negara, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Munculnya kebijakan publik tersebut di atas disebabkan oleh beberapa masalah di antaranya:

- 1) Terdapatnya peraturan hukum yang tidak berjalan dengan baik.
- 2) Peraturan hukum yang ada tidak ditegakkan.
- 3) Belum adanya peraturan hukum yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu.

Sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk mengemukakan masalah-masalah masyarakat, bangsa, negara, dan internasional kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masyarakat Indonesia pun berhak mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh aparat pemerintah berkenaan dengan semua masalah tersebut.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah

Untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, masyarakat perlu terlebih dahulu mengetahui dan mengkaji masalah-masalah yang terjadi dalam pemerintahannya. Masalah yang muncul dapat diketahui dari politikus, informasi media, kelompok warga, atau lembaga-lembaga pemerintahan.

Bentuk partisipasi yang efektif dari warga negara ialah dengan mengetahui badan pemerintahan mana yang bertanggung jawab untuk mengubah, melaksanakan atau membuat kebijakan publik tersebut. Misalnya, menurut UU No.25 Tahun 2004 pasal (1), musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antarpelaku dalam menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat meminta lembaga-lembaga pemerintahan daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang diturunkan dari ketentuan undang-undang pemerintah pusat. Atau, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten membuat kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Sebagai bagian dari proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, lembaga-lembaga pemerintah harus menentukan, apakah suatu kebijakan baru bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kebijakan yang ada.

Kebijakan publik terdapat dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan dan menegakkan hukum. Berikut contoh kebijakan publik dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya:

- a. Departemen Pendidikan Nasional bertanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan perilaku dan disiplin siswa. Sedangkan guru dan pimpinan sekolah wajib melaksanakan kebijakan-kebijakan ini.

- b. DPR bertanggung jawab membuat peraturan lalu lintas. Sedangkan petugas kepolisian lalu lintas menjalankan peraturan ini.
- c. Pemerintah daerah membuat kebijakan-kebijakan tentang larangan penjualan minuman keras di tempat umum tertentu, misalnya dekat sekolah. Polisi pamong praja atau petugas ketertiban umum kota dan aparat terkait harus menegakkan kebijakan ini.

Masyarakat perlu memahami peran utama pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai salah satu bagian dari proses pembuatan kebijakan publik. Dalam pengambilan keputusan yang demokratis, maka perlu adanya persetujuan dan partisipasi masyarakat yang akan diperintah dalam pemerintahan tersebut.

Keseluruhan proses merumuskan kebijakan publik meliputi:

- a. Pengumpulan dan analisis data.
- b. Menguji akibat-akibat dari tindakan alternatif.
- c. Mengumpulkan dukungan bagi usulan-usulan alternatif.
- d. Menyepakati suatu bentuk tindakan yang tepat bagi penyelesaian suatu masalah.
- e. Masyarakat berusaha meyakinkan pemerintah atau lembaga pemerintahan terkait untuk menyetujuinya.
- f. Pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati pemerintah.

Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dalam kegiatan-kegiatan berikut ini.

a. Proses Pengambilan Keputusan

Warga negara dapat melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dengan cara-cara, antara lain:

- 1) Menghadiri pertemuan-pertemuan publik.
- 2) Menulis surat atau menelpon kepada wakil rakyat dan kepada harian surat kabar.
- 3) Memantau usulan kebijakan yang bersumber dari berbagai pihak.
- 4) Ikut berdemonstrasi dengan memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Membujuk warga lain untuk mendukung suatu alternatif tertentu yang memenuhi rasa keadilan dan menjunjung nilai-nilai luhur.
- 6) Melakukan penelitian.
- 7) Menyampaikan usulan kebijakan.
- 8) Memberi kesaksian pada dengar pendapat publik.

b. Memperbaiki Kualitas Kebijakan Publik

Kebijakan publik akan efektif bila dilaksanakan dan bermanfaat bagi anggota-anggota masyarakat. Artinya ada kesesuaian antara tindakan masyarakat dengan kehendak pemerintah atau negara sebagai lembaga yang mengesahkan kebijakan publik. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan publik harus cukup berkualitas.

Beberapa faktor yang dapat memperbaiki kualitas kebijakan publik, antara lain:

- 1) Kebijakan-kebijakan yang diambil, melalui suatu proses mempertimbangkan alternatif implikasi pelaksanaannya.
- 2) Penyempurnaan bagi sistem informasi yang berguna bagi pembentuk kebijakan publik. Hal ini meliputi unit-unit penelitian dan pengembangan, statistik, bank data dan lembaga-lembaga pemikiran yang bebas, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah.
- 3) Menganalisis pertimbangan ekonomi dalam pembentukan kebijakan pembangunan.
- 4) Kebijakan jangka panjang guna menghindari krisis yang terkait dengan perkembangan dunia.
- 5) Peka terhadap kebutuhan nyata masyarakat, terutama masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah dan tidak vokal.



TWODGT: Tempo, 3 Oktober 2004

+CODCT#ftm Apabila dalam membuat kebijakan publik peran dan aspirasi masyarakat dikesampingkan, maka yang terjadi masyarakat akan menolak kebijakan tersebut.

Untuk mencapai kualitas kebijakan publik seperti diuraikan di atas, perlu dukungan masyarakat dalam proses perumusannya. Bila masyarakat tidak berperan dalam perumusan dan proses pembentukan kebijakan publik, maka konsekuensinya adalah masyarakat harus menerima setiap kebijakan yang sudah diputuskan. Dengan demikian, masyarakat harus menerima kebijakan tersebut sekalipun yang diputuskan tersebut dianggapnya kurang berkualitas, atau sebagian keputusan kurang memenuhi aspirasi dan kepentingan publik.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa masyarakat belum optimal berperan dalam proses perumusan kebijakan publik? Ada beberapa pertimbangan, antara lain karena faktor-faktor:

- 1) Sikap sebagian masyarakat yang acuh tak acuh, tidak peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi dan memerlukan pemecahan bersama.
- 2) Masyarakat lainnya sudah berpartisipasi, tetapi barangkali aspirasi mereka tidak diterima atau belum segera ditindaklanjuti.
- 3) Lembaga yang mengesahkan kebijakan publik belum menerapkan semangat demokrasi, masih bertindak otoriter terhadap kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan berpartisipasi.
- 4) Pemerintah belum optimal memasyarakatkan budaya berpartisipasi dalam kebijakan publik kepada masyarakat.
- 5) Belum semua dunia pendidikan mengoptimalkan sistem pendidikan demokratis dalam pembelajaran kebijakan publik bagi siswa-siswanya.

c. Memahami Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Bagi para pembuat kebijakan publik perlu kiranya memahami pendapat Dror tentang 12 ciri yang terdapat dalam pembuatan kebijakan publik, yang intinya adalah:

- 1) Bersifat kompleks artinya proses pembuatan kebijakan publik terdiri dari banyak komponen.
- 2) Prosesnya bersifat dinamis artinya merupakan kegiatan yang berkesinambungan dalam suatu struktur dan berubah sepanjang waktu. Agar berkesinambungan pembuatan kebijakan publik memerlukan masukan dan motivasi yang sifatnya berkesinambungan.
- 3) Komponen-komponen yang beragam (berlipat ganda) dipengaruhi oleh jenis isu, waktu, karakter masyarakat setempat, dan struktur politik dari masing-masing sistem politik.
- 4) Peran masing-masing substruktur berbeda dalam memberikan sumbangan terhadap kebijakan publik. Misalnya, untuk alam demokrasi barat, lembaga perwakilan rakyat umumnya peka terhadap pendapat umum dan kelompok penekan, namun memiliki tingkat keahlian yang

rendah/sedang dalam keputusan-keputusannya. Hal yang sebaliknya terjadi pada dinas pemerintah yang dipilih berdasarkan kemampuan, tidak peka terhadap pendapat umum dan kelompok penekan, tetapi mahir dalam keputusan-keputusannya.

- 5) Memutuskan artinya membuat kebijakan publik pada dasarnya merupakan jenis tindakan pengambilan keputusan, yang memerlukan tindakan hati-hati.
- 6) Sebagai pedoman umum artinya kebijakan publik merupakan bentuk petunjuk umum, bukan berupa instruksi yang rinci, untuk melakukan tindakan tertentu.
- 7) Untuk mengambil tindakan artinya pembuatan keputusan dapat berakibat diambilnya tindakan tertentu yang menimbulkan perubahan tertentu pada si pembuat keputusan. Misalnya kebijakan publik tidak hanya untuk pihak lain, tetapi juga untuk aparat yang membuat kebijakan tersebut.
- 8) Diarahkan pada masa depan disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan baru sehingga menempuh kebijakan yang hasilnya belum dapat diramalkan.
- 9) Terutama dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, sebagian kecil oleh lembaga-lembaga swasta.
- 10) Secara formal dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk memenuhi kepentingan umum (*public interest*).
- 11) Apa yang tercermin dalam kepentingan umum berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan publik.
- 12) Dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin, dengan mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai dan akibat-akibat yang tidak dikehendaki serta mencapai manfaat yang maksimal dengan biaya yang lebih sedikit.

d. Menemukan dan Merumuskan Secara Benar Permasalahan Kebijakan

Para pembuat kebijakan harus mampu menemukan permasalahan kebijakan dan merumuskannya secara benar. Oleh karena keberhasilan dan kegagalan dalam perumusan ini akan berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan selanjutnya. Dengan demikian, tugas ini bukanlah tugas yang ringan, dalam kenyataannya akan sangat memerlukan peran serta masyarakat.

Bila tidak ada partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, maka konsekuensinya bagi para pembuat kebijakan, antara lain:

- 1) Para pembuat kebijakan tidak menghasilkan kebijakan yang optimal, karena tidak didukung oleh data, kehendak dan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
- 2) Para pembuat kebijakan dianggap belum menjalankan demokrasi sepenuhnya karena belum berhasil menampung aspirasi masyarakat. Mengapa aspirasi masyarakat tidak berhasil tertampung/ditanggapi? Ada dua faktor penyebab yaitu:
 - a) Para pembuat kebijakan/pemerintah bersikap otoriter atau tidak terbuka terhadap masukan masyarakat.
 - b) Keinginan masyarakat yang tidak rasional dan tidak disesuaikan dengan kemampuan para pelaksana kebijakan.
- 3) Para pembuat kebijakan akan memperoleh kesulitan untuk menerapkan hasil kebijakannya di lapangan karena tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

e. Menyampaikan Permasalahan Kebijakan Publik Kepada Pembuat Kebijakan

Melihat konsekuensi yang cukup berat bagi para pembuat kebijakan, maka masyarakat perlu berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat berupa penyampaian permasalahan kebijakan publik akan dijadikan masukan bagi agenda pemerintah oleh para pembuat kebijakan.

Masalah yang sudah masuk ke dalam agenda pemerintah merupakan bahan pertimbangan/pemikiran yang serius bagi para pembuat kebijakan. Masyarakat hendaknya mengetahui beberapa hal yang bisa menyebabkan permasalahan kebijakannya dapat masuk ke agenda pemerintah. Menurut Anderson ada lima faktor yang menyebabkan permasalahan kebijakan masuk ke dalam agenda pemerintah yaitu:

- 1) Bila terjadi ancaman terhadap keseimbangan kelompok sehingga kelompok tersebut menuntut pemerintah untuk mengatasinya.
- 2) Kepemimpinan politik yang memperhatikan problema umum, menyebarluaskan dan mengusulkan usaha-usaha pemecahannya.
- 3) Peristiwa/krisis luar biasa karena menarik perhatian masyarakat luas dan para pembuat kebijakan untuk memperhatikannya dengan seksama.
- 4) Gerakan-gerakan protes dan kekerasan.
- 5) Masalah-masalah khusus atau isu-isu politis.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah melalui peran serta warga masyarakat

dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah. Masyarakat akan berpartisipasi bilamana memahami peran pemerintah pusat maupun daerah sebagai pembuat kebijakan publik. Proses perumusan kebijakan publik yang dilakukan para pembuat kebijakan, melalui langkah-langkah berikut, di antaranya:

- 1) Mencari dan menentukan identitas permasalahan secara benar.
- 2) Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan kebijakan.
- 3) Memasukkan rumusan permasalahan kebijakan ke dalam agenda pemerintah.
- 4) Mengembangkan serangkaian tindakan untuk pemecahan masalah.
- 5) Mengajukan usulan kebijakan untuk memperoleh pengesahan dari lembaga legislatif.

Setelah satu kebijakan publik disahkan dalam bentuk hukum/peraturan perundangan, maka kebijakan publik itu bersifat mengikat. Mengikat bagi masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan publik yang sudah disahkan harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

PENGAYAAN

Dengan diberlakukannya otonomi daerah semestinya tidak ada kebijakan yang selalu terpusat kepada pemerintah pusat. Misalnya:

1. Pendapat Andi Mallarangeng bahwa *"Pada masa orde baru penentuan gubernur hingga bupati mutlak kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya berwenang sebatas mengajukan nama calon, yang menetapkan hanyalah pemerintah pusat. Sebagai contoh gubernur terpilih Riau Ismail Suko tidak segera dilantik oleh Presiden karena tidak ada kecocokan antara Presiden dengan DPRD, Presiden memiliki calon kuat selain Ismail Suko. Demikian pula pada masa pemerintahan Abdrrahman Wahid, pelantikan Bupati Sampang terlambat satu tahun; dan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, presiden tampak enggan melantik gubernur pilihan DPRD. Dari contoh-contoh ini masih tampak belum adanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah di bidang politik, antara lain dalam menetapkan pemimpin. Salah satu peran rakyat yang dapat dilakukan dalam menentukan pemimpin daerahnya diantaranya rakyat menyampaikan aspirasinya kepada presiden melalui DPR."* (Galamedia, 12 Juni 2003)

2. Pendapat Dr. Ira Primiana Sagir, S.E., M.T. bahwa “Kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dalam kepemilikan sumber daya alam misalnya tampak dalam bagi hasil minyak bumi yang menetapkan 65% untuk pusat dan 15% untuk daerah (dari porsi daerah ditetapkan 3% ke provinsi, 6% ke daerah pemilik sumber daya alam dan 6% untuk dibagi rata antara kabupaten lain dalam provinsi yang bersangkutan). Bila dilihat lebih jauh, Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 (yang memerinci angka dan rumus dana perimbangan yang tertuang dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1999) belum memuat perhitungan secara rinci pembagian hasil untuk BUMN di daerah. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan melibatkan partisipasi masyarakat di daerah, misalnya dengan cara penjualan saham BUMN ke daerah, sehingga daerah turut memiliki potensi yang ada di daerahnya. Sebagai contoh Pemda Bangka yang meminta hak 25% saham timah yang saat ini tercatat 65% dikuasai Pemerintah, 10% dikuasai publik”. (Pikiran Rakyat, 21 Januari 2003, halaman 18).

Kata Kunci

1. Otonomi daerah
2. Daerah otonom
3. Desentralisasi
4. Dekonsentrasi
5. Asas pembantuan
(medebewind)
6. Prinsip otonomi
7. Kebijakan publik
8. Partisipasi masyarakat
9. Pemerintah daerah

RANGKUMAN

1. Otonomi (dari bahasa Yunani, *auto* = sendiri, *nomos* = perundangan) artinya perundangan sendiri.
2. *Daerah otonom* (daerah) ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. *Otonomi daerah* ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan dalam pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. *Desentralisasi* ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Dekonsentrasi* adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
7. Tugas pembantuan (*medebewind*) ialah penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu dari:
 - a. Pemerintah kepada daerah dan/atau desa.
 - b. Pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa.
 - c. Pemerintah kabupaten/kota kepada desa.
8. Tujuan pembentukan otonomi daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitasnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah dapat dilaksanakan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bernegara.
9. Prinsip-prinsip otonomi daerah:
 - a. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya adalah daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-undang.
 - b. Prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah.
 - c. Prinsip otonomi bertanggung jawab adalah penyelenggaraan otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.
10. *Kebijakan publik* adalah tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan melibatkan partisipasi masyarakat.
11. James E. Anderson dalam *Public Policy Making* menetapkan lima hal yang dikategorikan sebagai kebijakan publik yaitu:
 - a. Kebijakan substantif/prosedur.
 - b. Kebijakan-kebijakan distributif, redistributif, regulator, *self regulator*.
 - c. Kebijakan material dan simbolik.

- d. Kebijakan barang-barang kolektif dan pribadi.
 - e. Kebijakan liberal dan konservatif.
12. Bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah meliputi kegiatan:
- a. Proses pengambilan keputusan.
 - b. Memperbaiki kualitas kebijakan publik.
 - c. Memahami proses pembuatan kebijakan publik.
 - d. Menemukan dan merumuskan secara benar permasalahan kebijakan.
 - e. Menyampaikan permasalahan kebijakan publik kepada pembuat kebijakan.
13. Proses perumusan kebijakan publik oleh para pembuat kebijakan melalui langkah-langkah berikut, di antaranya:
- a. Mencari dan menentukan identitas permasalahan secara benar.
 - b. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan kebijakan.
 - c. Memasukkan rumusan permasalahan kebijakan kedalam agenda pemerintah.
 - d. Mengembangkan serangkaian tindakan untuk pemecahan masalah.
 - e. Mengajukan usulan kebijakan untuk memperoleh pengesahan dari lembaga legislatif.

Soal-Soal Latihan

A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

1. Kewenangan daerah otonomi untuk dapat mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri disebut . . .
 - a. otonomi daerah
 - b. kewenangan daerah
 - c. daerah otonom
 - d. daerah
2. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri adalah
 - a. otonomi daerah
 - b. daerah
 - c. kewenangan daerah
 - d. daerah otonom
3. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai
 - a. peraturan daerah otonom
 - b. aspek demokrasi
 - c. wilayah administrasi
 - d. badan otorita

4. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan
 - a. provinsi
 - b. daerah otonom
 - c. wilayah administrasi
 - d. daerah kota

5. Pelaksanaan otonomi daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.
 - a. 5 Tahun 1998
 - b. 9 Tahun 1998
 - c. 39 Tahun 1999
 - d. 32 Tahun 2004

6. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah
 - a. kepala daerah dan wakil kepala daerah
 - b. kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis lainnya
 - c. kepala daerah dan perangkat daerah
 - d. perangkat daerah lain seperti camat dan lurah

7. Sejumlah kebijakan publik tertulis dalam
 - a. Pancasila
 - b. UUD 1945
 - c. Peraturan perundang-undangan
 - d. Kebijakan umum

8. Proses perumusan undang-undang perpajakan yang melibatkan beberapa pihak, dapat dikategorikan ke dalam bentuk kebijakan publik
 - a. substantif
 - b. prosedural
 - c. distributif
 - d. liberal

9. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik antara lain
 - a. berusaha meyakinkan pemerintah yang terkait kebijakan tersebut untuk menyetujuinya
 - b. menulis surat kepada wakil rakyat
 - c. ikut berdemonstrasi
 - d. memberi kesaksian dalam dengar pendapat publik

10. Konsekuensi bagi masyarakat bila tidak berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik, antara lain
 - a. masyarakat harus menerima kebijakan tersebut apapun resikonya, menguntungkan ataupun tidak menguntungkan baginya
 - b. memungkinkan munculnya penyelewengan-penyelewengan
 - c. masyarakat menjadi apatis/acuh
 - d. masyarakat belum bersikap demokratis

11. Kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan sekolah, misalnya. . . .
 - a. para siswa dan ketua murid melaksanakan kebersihan kelas sesuai dengan jadwal piket yang berlaku
 - b. siswa membuat silabus mata pelajaran
 - c. OSIS menyusun jadwal pelajaran
 - d. siswa mengatur keperluan uang dari orang tua untuk membantu pekerjaan orang tuanya

12. Penataan lingkungan hidup dan fasilitas umum merupakan salah satu contoh pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan
 - a. keluarga
 - b. masyarakat
 - c. lembaga swadaya masyarakat
 - d. sekolah

13. Yang termasuk pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ialah
 - a. bagi hasil pajak
 - b. pajak daerah
 - c. pinjaman daerah
 - d. dana alokasi khusus

14. Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih
 - a. secara demokratis
 - b. sesuai undang-undang
 - c. secara langsung oleh rakyat
 - d. dicalonkan oleh DPRD I dan II

15. Seluruh bidang pemerintahan adalah kewenangan daerah, *kecuali*
 - a. politik luar negeri, hankam, moneter, fiskal, dan agama
 - b. memilih kepala daerah
 - c. membuat peraturan daerah
 - d. menetapkan APBD

16. Contoh pelaksanaan *asas medebewind* (tugas pembantuan) ialah
 - a. pelaksanaan transmigrasi, GNOTA, dan KB
 - b. pemilihan gubernur
 - c. penetapan pajak
 - d. penentuan APBD

17. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam
 - a. UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004
 - b. UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004
 - c. UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004
 - d. UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2004

18. Kerja sama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
 - a. menetapkan peraturan daerah
 - b. menetapkan kepala daerah
 - c. pengangkatan perangkat daerah
 - d. pengaturan terhadap peraturan daerah

19. Kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dalam kepemilikan sumber daya alam, misalnya tampak dalam
 - a. bagi hasil minyak bumi 65% untuk pusat dan 15% untuk daerah
 - b. ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000
 - c. daerah tidak memiliki sumber daya alam sama sekali, karena diserahkan seluruhnya kepada pemerintah pusat
 - d. dijualnya sumber daya alam kepada pihak asing

20. Penyelenggaraan otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Pernyataan ini merupakan prinsip otonomi dalam arti
 - a. seluas-luasnya
 - b. nyata
 - c. bertanggung jawab
 - d. untuh

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar pada buku tulismu!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan daerah otonomi!
2. Uraikanlah prinsip-prinsip otonomi daerah!
3. Sebutkan maksud dan tujuan otonomi daerah!
4. Sebutkan dua contoh hasil kebijakan publik di Indonesia!
5. Sebutkan tiga sumber penerimaan atau pendapatan daerah!
6. Jelaskan beserta contoh tentang lima hal yang bisa dikategorikan ke dalam kebijakan publik menurut James E. Anderson!
7. Berikan satu contoh partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik!
8. Apa konsekuensi yang akan diterima masyarakat bila masyarakat tidak berpartisipasi dalam kebijakan publik?
9. Mengapa partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik sangat penting pada masa otonomi daerah dewasa ini?
10. Berikanlah satu contoh kebijakan pemerintah daerah di tempat Anda, mengenai larangan penjualan minuman keras di dekat sekolah!

C. Tes Unjuk Kerja dan Portofolio

1. Bandingkanlah, kemudian diskusikan dengan temanmu, perbedaan pelaksanaan pemerintahan daerah di tempatmu dengan sistem otonomi daerah dan pelaksanaan pemerintahan sebelum diberlakukan otonomi daerah!

Tempat: Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi/Sumber informasi dari:

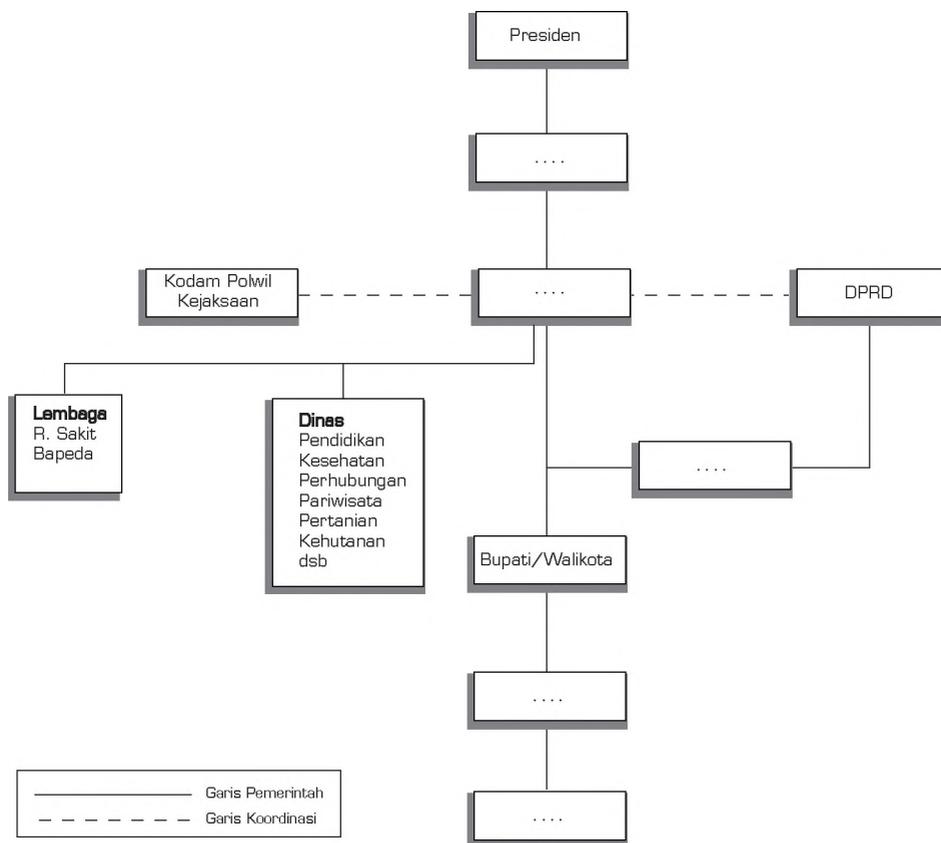
No.	Kebijakan	Otda	Pra-Otda
1.	Susunan dan pembentukan daerah		
2.	Kewenangan daerah		
3.	Bentuk dan susunan pemerintahan daerah		
4.	Kewenangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah setempat		
5.	Prinsip-prinsip penyelenggaraan daerah		
6.	Sumber-sumber penerimaan/pendapatan daerah		
7.	Perimbangan keuangan		
8.	Tugas dan kewajiban pemerintah daerah		

2. Lakukanlah pengamatan di lingkungan masyarakat sekitarmu (RW, Kelurahan, dan Kecamatan) mengenai masalah kepentingan publik yang memerlukan perhatian serius, baik dari masyarakat atau pemerintah. Lakukanlah bersama kelasmu, dan atas petunjuk guru perhatikan hal-hal berikut ini.
 - a. Bagilah satu kelas menjadi empat kelompok dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - 1) Kelompok I: mengidentifikasi masalah kebijakan publik di masyarakat (menjelaskan masalah). Langkah-langkah kelompok I:
 - a) Memilih satu masalah dari beberapa masalah yang kalian temukan di masyarakat secara demokratis.
 - b) Kelompok membuat rancangan format identifikasi masalah, format wawancara, dan format sumber belajar cetak maupun elektronik (radio, TV, internet). Format-format ini berguna sebagai bahan pegangan kelompok untuk pengamatan di masyarakat. Format-format tersebut memuat, antara lain:
 - (1) Alasan pentingnya masalah tersebut.

- (2) Tingkat atau lembaga pemerintahan yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut.
 - (3) Kebijakan pemerintah yang sudah ada berkaitan dengan masalah tersebut.
 - (4) Hal-hal yang perlu diganti, diubah atau diperbaiki dari kebijakan pemerintah tersebut.
 - (5) Keuntungan dan kekurangan dari kebijakan itu.
 - (6) Pro dan kontra dari masyarakat tentang kebijakan yang sudah ada dan usaha-usaha mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
 - (7) Sumber informasi untuk mengetahui masalah ini.
 - (8) Lokasi.
 - (9) Masalah-masalah lain di masyarakat yang perlu dikaji oleh kelompok.
- c) Melaporkan hasil diskusi kelompok I, hal wawancara dan berbagai sumber belajar, di depan kelas dan melakukan diskusi kelas.
- d) Membuat rangkuman masalah yang ditulis pada buku tulismu dilengkapi kliping data/fakta.
- 2) Kelompok II: memilih masalah untuk kajian kelas (mengkaji kebijakan alternatif). Langkah-langkah kelompok II:
- a) Bertanya kepada kelompok I tentang hal-hal yang sudah ditemukan/ dipelajari oleh kelompok I.
 - b) Menentukan masalah yang paling mendesak untuk segera dipecahkan.
 - c) Membagi tugas antar-anggota kelompok untuk mencari informasi berkaitan dengan pilihan masalah yang sudah ditentukan dari berbagai sumber. (Pergunakan format kelompok I)
 - d) Lakukan studi kepustakaan dan diskusi dengan orang tua atau para pakar tentang masalah tersebut. Rancanglah hal-hal yang akan ditanyakan terlebih dahulu oleh kelompok.
 - e) Rangkumlah beberapa kebijakan alternatif, kemudian tulislah pada buku tulismu keuntungan dan kerugian dari kebijakan alternatif tersebut (dari siswa/kelompok).
 - f) Buatlah grafik, peta, foto, gambar, judul surat kabar, tabel statistik, dan sebagainya pada buku tulismu. Identifikasi sumber informasi yang telah digunakan kelompok.
 - g) Membuat rangkuman informasi dan kebijakan alternatif secara tertulis pada buku tulismu.
- 3) Kelompok III: mengumpulkan informasi masalah yang akan dikaji (mengusulkan alternatif untuk mengatasi masalah). Langkah-langkah kelompok III:

- a) Menentukan sumber-sumber yang akan dihubungi (misalnya perpustakaan, penerbit surat kabar, pakar, organisasi kemasyarakatan/kelompok kepentingan, kantor legislatif, lembaga pemerintah, internet) sesuai dengan masalah yang sedang kalian pelajari.
 - b) Menghubungi/mengunjungi berbagai sumber melalui telepon, membuat janji wawancara atau melalui surat.
 - c) Bagilah anggota kelompok/kelas untuk menghubungi salah satu sumber informasi yang digambarkan. Buatlah terlebih dahulu rancangan format untuk wawancara, surat atau dokumentasi, yang berisi:
 - (1) Sumber informasi (nama, gelar, organisasi, alamat, telepon, penerbit, pengarang, tanggal penerbitan).
 - (2) Informasi tentang keseriusan masalah tersebut di masyarakat.
 - (3) Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut.
 - (4) Silang pendapat di masyarakat tentang masalah itu.
 - (5) Pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap masalah tersebut, keuntungan/kerugian dari posisi mereka dan usaha mempengaruhi pemerintah agar mengajak mereka berkenaan dengan masalah tersebut.
 - (6) Usulan kebijakan dari kelompok, keuntungan dan kerugiannya, serta konstitusional atau inkonstitusional.
 - (7) Menentukan pihak mana (pemerintah) yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang diusulkan.
 - d) Membuat rangkuman tertulis pada buku tulismu tentang bukti-bukti dukungan atas usulan kebijakan melalui grafik, gambar, publikasi pemerintah, peta, tabel, kartun politik, ilustrasi dan sebagainya.
 - e) Mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas untuk memperoleh dukungan dan kesepakatan kelas atas kebijakan alternatif pemecahan masalah yang diusulkan.
- 4) Kelompok IV: membuat rencana tindakan. Langkah-langkah kelompok IV:
- a) Menggambarkan/mendesripsikan rencana-rencana tindakan dan dukungan pada individu/kelompok dalam masyarakat terhadap rencana yang diusulkan.
 - b) Mengenal kelompok di masyarakat yang menentang rencana yang diusulkan. Kemudian menjelaskan cara meyakinkan kelompok masyarakat untuk mendukung rencana tindakan yang diusulkan.
 - c) Menggambarkan dengan singkat lembaga pemerintah yang mendukung rencana tindakan yang diusulkan.
 - d) Mengidentifikasi orang-orang/pemerintah yang mungkin menentang rencana tindakan yang diusulkan.

- e) Menyajikan rencana tindakan melalui grafik, foto, lukisan, kartun, politik, judul surat kabar, tabel statistik dan ilustrasi lainnya.
 - f) Mengidentifikasi sumber informasi yang telah digunakan kelompok.
 - b. Buatlah hasil pekerjaan empat kelompok tersebut dalam bentuk empat dokumentasi dan empat panel atau poster untuk bahan penyajian portofolio di kelas dipimpin oleh guru pembimbing dan beberapa guru lain sebagai dewan juri.
3. Lakukanlah studi kepustakaan atau pengamatan ke bagian 'informasi' di Pemda setempat. Salin dan isilah kolom bagan struktur/susunan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah berikut pada buku tulismu!





Soal-Soal Akhir Semester 1

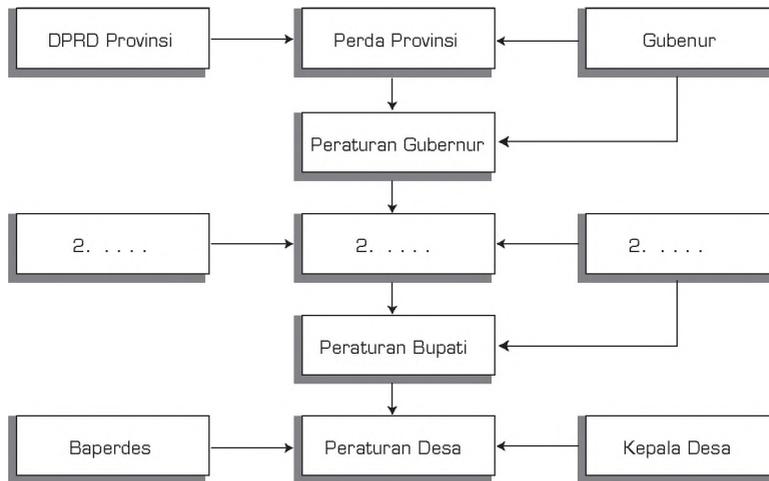
A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

- Contoh pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan masyarakat ialah
 - menyelesaikan persoalan keluarga secara musyawarah
 - manajemen berbasis sekolah
 - masyarakat RT/RW menjalankan program pemerintah sesuai kemampuan warga setempat
 - LSM mengawasi kebijakan pemerintah
- Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
 - kota atau kabupaten
 - kecamatan
 - kelurahan
 - wilayah RW/RT
- Mengembangkan serangkaian tindakan untuk pemecahan masalah merupakan usaha pembuat kebijakan dalam
 - merumuskan kebijakan publik
 - melaksanakan kebijakan publik
 - menemukan masalah
 - meningkatkan kualitas kebijakan
- Proses pembuatan kebijakan publik terdiri dari banyak komponen artinya dalam pembuatan kebijakan publik itu bersifat
 - dinamis
 - kompleks
 - memutuskan
 - beragam
- Dalam proses pengambilan keputusan, warga negara dapat berpartisipasi dalam bentuk
 - menyampaikan usulan kebijakan
 - mengumpulkan data
 - menguji akibat tindakan alternatif
 - mempertimbangkan alternatif
- Pengadaan kebutuhan bahan pokok sehari-hari merupakan kategori kebijakan publik dalam bentuk
 - kebijakan barang kolektif
 - kebijakan liberal
 - kebijakan material
 - kebijakan substantif
- Tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah disebut
 - kebijakan pemerintah
 - kebijakan publik
 - keputusan pemerintah
 - kebijakan individu

8. Daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan UU, merupakan prinsip otonomi dalam arti
 - a. seluas-luasnya
 - b. nyata
 - c. bertanggung jawab
 - d. kewenangan
9. Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dikenal dengan pendekatan
 - a. eksternalitas
 - b. akuntabilitas
 - c. efisiensi
 - d. bertanggung jawab
10. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut
 - a. desentralisasi
 - b. dekonsentrasi
 - c. *medebewind*
 - d. otonomi
11. Menurut kodratnya manusia memiliki sifat sebagai
 - a. makhluk pribadi
 - b. makhluk sosial
 - c. makhluk religius
 - d. makhluk pribadi dan sosial
12. Berikut ini merupakan contoh kebijakan publik, *kecuali*
 - a. Depdiknas bertanggung jawab membuat peraturan kedisiplinan siswa
 - b. DPR membuat aturan berlalu lintas
 - c. Pemda membuat aturan larangan penjualan minuman keras di muka umum
 - d. keputusan pengangkatan pejabat tidak atas dasar keahlian
13. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan antara lain dengan cara
 - a. menulis surat di surat kabar atau menelpon wakil rakyat
 - b. melaksanakan kebijakan pemerintah
 - c. peka terhadap kebutuhan masyarakat
 - d. peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi
14. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, maka pemerintah daerah berhak menetapkan
 - a. peraturan daerah
 - b. intruksi gubernur
 - c. keputusan gubernur
 - d. keputusan walikota
15. Tujuan otonomi daerah ialah untuk
 - a. membangun sarana fisik daerah
 - b. mendayagunakan prakarsa kepala daerah
 - c. mewujudkan kesejahteraan, keadilan masyarakat dan meringankan beban masyarakat
 - d. meningkatkan anggaran daerah

16. Kebijakan politik luar negeri dapat dikategorikan kedalam bentuk kebijakan
- substantif
 - distributif
 - simbolik
 - konservatif

17. Perhatikan bagan berikut!



Kotak kosong pada no.2 adalah

- DPRD - Perda - Walikota
 - DPRD Kabupaten/Kota - Perda - Bupati/Walikota
 - DPRD - Perbupati - Kabupaten
 - DPR - Presiden - Peraturan Presiden
18. Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan publik ialah untuk. . . .
- harga diri bangsa dan negara
 - kewibawaan pemerintah
 - kelengkapan hidup bernegara
 - kesejahteraan bangsa
19. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- Penataan kelas oleh siswa.
 - Anak-anak diberi kepercayaan untuk belajar oleh orang tuanya.
 - Masyarakat RT/RW melaksanakan program pemerintah sesuai kemampuan warga setempat.
 - Setiap sekolah memiliki hak otonomi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Dari pernyataan di atas yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh nomor
- 1 dan 2
 - 1 dan 4
 - 2 dan 3
 - 2 dan 4

20. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Mengumpulkan dukungan bagi usulan-usulan alternatif.
 - 2) Menguji akibat-akibat dari tindakan alternatif.
 - 3) Pengumpulan dan analisis data.
 - 4) Pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati pemerintah.
 - 5) Menyetujui suatu bentuk tindakan yang tepat bagi penyelesaian suatu masalah.
 - 6) Masyarakat berusaha meyakinkan pemerintah atau lembaga pemerintahan terkait untuk menyetujuinya.
- Dari pernyataan di atas tahapan proses merumuskan kebijakan publik ditunjukkan dengan urutan nomor
- a. 1-2-3-4-5-6
 - b. 3-2-1-5-6-4
 - c. 3-5-1-2-4-6
 - d. 4-5-6-1-2-3
21. Yang *bukan* merupakan objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan adalah
- a. politik dan strategi nasional
 - b. hak dan kewajiban warga negara
 - c. ketahanan nasional
 - d. wawasan nusantara
22. Konsepsi tentang wilayah lautan yang menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki adalah
- a. *mare clausum*
 - b. *res communis*
 - c. *res nullius*
 - d. Zona Ekonomi Eksklusif
23. Landasan ideal ketahanan nasional adalah
- a. Pancasila
 - b. UUD 1945
 - c. GBHN
 - d. Tap MPR
24. Hakikat ketahanan nasional adalah
- a. mengembangkan nilai-nilai nasional
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban bangsa
 - c. meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa
 - d. mengembangkan kekuatan dan ketangguhan masyarakat
25. Berikut ini yang *bukan* merupakan asas-asas ketahanan nasional adalah
- a. asas mandiri
 - b. asas menyeluruh
 - c. asas mawas kedalam dan keluar
 - d. asas kekeluargaan
26. Untuk menghadapi kemungkinan invasi kekuatan militer asing, bangsa Indonesia akan menghadapinya dalam bentuk
- a. perang gerilya
 - b. perlawanan rakyat semesta
 - c. perlawanan rakyat terlatih
 - d. perang revolusioner

27. Indonesia terancam oleh sikap disintegrasi bangsa apabila negara dalam keadaan bahaya yang sesungguhnya. Hal ini merupakan kondisi darurat bangsa secara
- hukum
 - militer
 - sipil
 - objektif
28. Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai garis batas seluas
- 100 mil
 - 200 mil
 - 300 mil
 - 400 mil
29. Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dari perairan laut disebut
- zona teritorial
 - ZEE
 - zona kontinen
 - zona bersebelahan
30. Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah adalah sifat
- luwes
 - dinamis
 - mandiri
 - percaya diri
31. Jiwa nasionalisme dapat dipupuk dengan cara sederhana, antara lain
- menolak pinjaman luar negeri
 - mencintai produk dalam negeri
 - melakukan proteksi terhadap produksi dalam negeri
 - melarang investasi asing
32. Unsur deklaratif berdirinya suatu bangsa adalah adanya
- rakyat
 - pemerintah yang berdaulat
 - pengakuan dari negara lain
 - wilayah
33. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- Menentang segala bentuk penjajahan.
 - Cinta perdamaian, kemerdekaan dan kedaulatan.
 - Keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara.
 - Upaya setengah hati dalam menegakkan HAM.
 - Bentuk pertahanan bersifat klasikal.
- Yang merupakan prinsip dasar yang dianut Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah ditunjukkan oleh nomor
- 1, 2, dan 3
 - 1, 3, dan 5
 - 2, 3, dan 5
 - 2, 3, dan 4

34. Dasar hukum pelaksanaan pertahanan negara adalah
- UU RI Nomor 2 Tahun 1989
 - UU RI Nomor 2 Tahun 2002
 - UU RI Nomor 3 Tahun 2002
 - UU RI Nomor 3 Tahun 2003
35. Partisipasi upaya bela negara seorang pelajar dapat diwujudkan antara lain
- menciptakan kerukunan dan keharmonisan keluarga
 - memperdalam iman, takwa, dan ilmu pengetahuan teknologi
 - mewujudkan ketenteraman dan kedamaian masyarakat
 - turut serta dalam wajib militer
36. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- Adanya satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah negara.
 - Kekuasaan menentukan konsistensi negara bagian sendiri.
 - Hanya terdapat satu badan perwakilan.
 - Pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah.
 - Kekuasaan untuk menentukan badan perwakilan rakyatnya sendiri.
- Pernyataan yang merupakan ciri dari bentuk negara kesatuan adalah
- 1, 2, dan 3
 - 1, 3, dan 4
 - 1, 2, dan 4
 - 2, 4, dan 5
37. Secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Pernyataan ini merupakan salah satu perwujudan sikap wawasan nusantara sebagai satu kesatuan
- politik
 - ekonomi
 - sosial budaya
 - pertahanan dan keamanan
38. Orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara dan telah memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku disebut
- warga negara asing
 - penduduk negara
 - masyarakat negara
 - warga masyarakat
39. Komponen kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah
- TNI
 - Polri
 - Rakyat
 - Pemerintah
40. Menurut UU tentang pertahanan negara di Indonesia upaya bela negara, selain merupakan kewajiban dasar manusia, juga merupakan
- cita-cita luhur bangsa
 - solidaritas tertinggi di masyarakat
 - tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - kehormatan tertinggi bagi setiap warga negara

Bab III

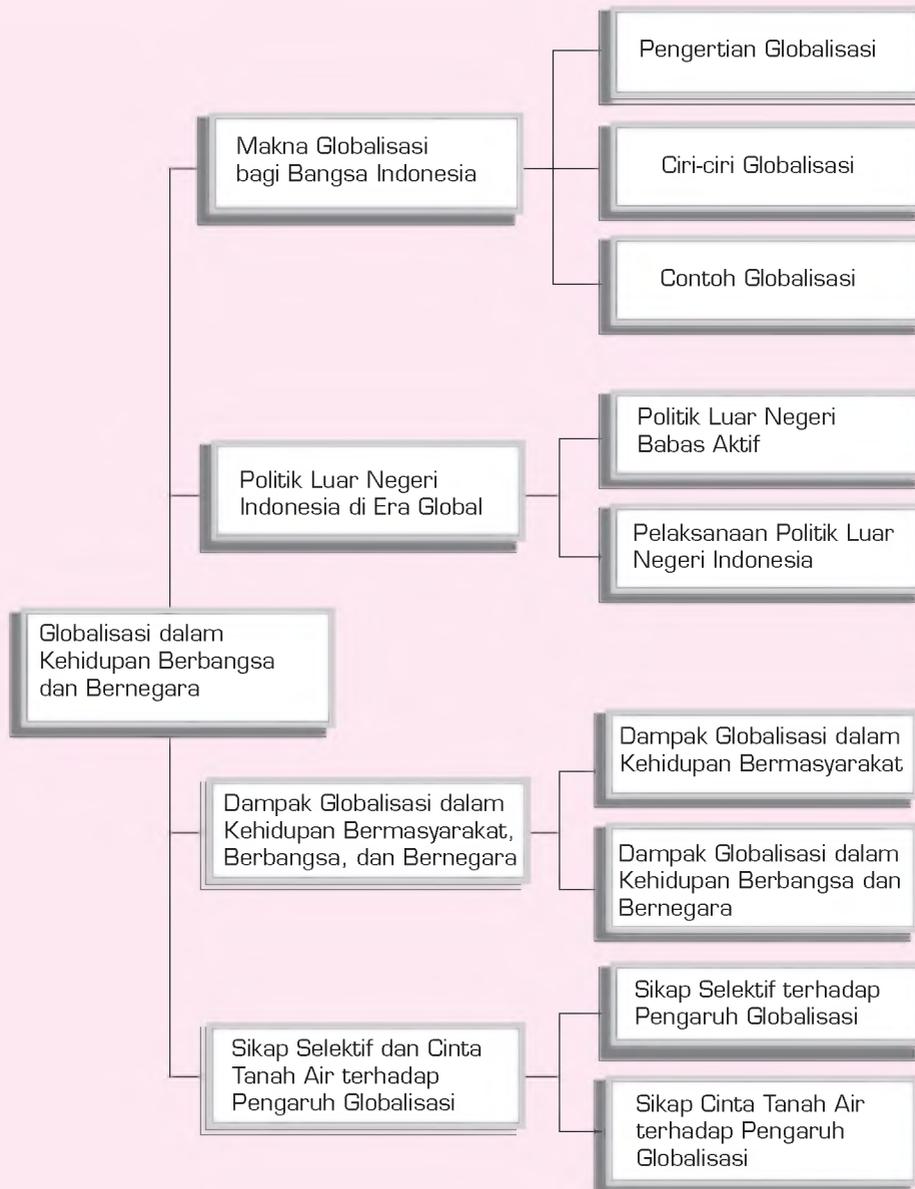
Globalisasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan makna globalisasi;
2. memahami pentingnya globalisasi bagi bangsa Indonesia.
3. menjelaskan makna politik luar negeri Indonesia;
4. memahami tentang bentuk kerja sama antar bangsa;
5. menguraikan dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
6. menampilkan sikap selektif terhadap dampak globalisasi;
7. menampilkan sikap cinta tanah air dari pengaruh globalisasi.

PETA KONSEP



Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global, sehingga kita sebagai bangsa tidak mungkin dapat menghindarkan diri dari pengaruh globalisasi. Oleh sebab itu, persiapan diri untuk mendapatkan sesuatu hal yang positif dari pengaruh globalisasi perlu dilakukan sejak dini.

Berikut ini akan kita bahas tentang makna globalisasi bagi bangsa Indonesia dan politik luar negeri Indonesia di era global. Selanjutnya akan diuraikan pula tentang dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sikap selektif dan cinta tanah air terhadap pengaruh globalisasi.

A. Makna Globalisasi Bagi Bangsa Indonesia

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, suatu bangsa tidak dapat menghindari diri globalisasi. Oleh sebab itu, perlu kita pahami bersama tentang pengertian, ciri-ciri dan contoh globalisasi, sebagai berikut:

1. Pengertian Globalisasi

Globalisasi berasal dari kata global yang dalam bahasa Inggris "*Concerning the whole earth*" yaitu sesuatu yang berkaitan dengan jagat raya/dunia. Sesuatu yang dimaksud adalah masalah, kejadian, kegiatan dan sikap.

Global dapat diartikan menyeluruh, di mana dunia ini tidak dibatasi lagi oleh batas-batas negara, wilayah, ras, warna kulit dan sebagainya. Menurut John Huckle (Miriam Steiner, 1996) *Globalisasi ialah "suatu proses dengan mana kejadian, keputusan dan kegiatan di salah satu bagian dunia, menjadi konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat yang jauh"*.

Albrow (Yaya, 1998) mengatakan bahwa globalisasi adalah "*Keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini (dimasukkan) diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia tunggal, masyarakat global.*" Oleh karena itu, proses ini bersifat majemuk sehingga kitapun memandang globalisasi di dalam kemajemukan. Globalisasi mengandung unsur dari proses, individu/manusia yang heterogen, tetapi memiliki kebutuhan yang sama. Joe Huckle berpendapat bahwa "*Globalisasi adalah suatu proses di mana kejadian, keputusan dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi bagi individu dan masyarakat di daerah lain*". Kesimpulan bahwa globalisasi adalah suatu proses tentang berbagai peristiwa/kejadian, kegiatan, dan atau keputusan yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat yang bersifat mendunia. Peristiwa/kejadian, kegiatan, dan atau keputusan tersebut berdampak pada masyarakat yang jauh dan melampaui batas-batas wilayah negara.

2. Ciri-ciri Globalisasi

Perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semua kejadian, kegiatan atau keputusan kita katakan sebagai globalisasi. Hal ini disebabkan oleh adanya ciri-ciri yang menunjukkan globalisasi atau hanya kejadian biasa saja. Berikut ini akan kita uraikan tentang ciri-ciri globalisasi.



7WODGT: Majalah T3

+CODCT#gte#Salah satu ciri globalisasi adanya kemajuan dan perkembangan di dunia komunikasi dan informasi.

Menurut Hamijoyo (*Mimbar*, 1990) ciri-ciri globalisasi ialah:

- Didukung oleh kecepatan informasi, teknologi canggih, transportasi, dan komunikasi yang diperkuat oleh tatanan dan manajemen yang tangguh.
- Telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut saat ini harus tunduk kepada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial politik, dan mempertemukan tatanan yang sebelumnya sulit dipertemukan.
- Adanya saling ketergantungan antara negara.
- Pendidikan merupakan bagian dari globalisasi.

Menurut Emil Salim (*Mimbar*, 1989) ada empat kekuatan yang menyebabkan dunia menjadi transparan yaitu *perkembangan Iptek yang semakin tinggi, perkembangan bidang ekonomi yang mengarah kepada perdagangan bebas, lingkungan hidup, dan politik.*

Menurut Tilaar ciri era globalisasi yaitu *adanya era masyarakat terbuka.* Keterbukaan tersebut meliputi bidang ekonomi yang ditandai dengan adanya pasar bebas dan bidang politik ditandainya dengan berkembangnya nilai demokratis. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi antara hak dan kewajiban.

Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa ciri-ciri globalisasi ditandai dengan adanya:



7WODGT: Tempo, 19 - 25 Juni 2006

+CODCT#gt.f# Dengan kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi, kini kita bisa mengakses keadaan di negara lain hanya dengan menggunakan internet.

- a. Kecanggihan teknologi/era digital khususnya pada bidang informasi dan komunikasi. Oleh sebab itu, kejadian, kegiatan dan atau keputusan individu/masyarakat di belahan dunia sangat mudah diakses dan dikomunikasikan atau disebarluaskan kepada masyarakat dunia.
- b. Kekuatan teknologi, ekonomi, sosial politik yang mampu menembus/melampaui batas-batas geopolitik.
- c. Penyebarluasan gagasan, pembaharuan dan penemuan hal-hal baru melalui pendidikan.
- d. Era kompetitif baik dalam hal jasa dan produk barang.
- e. Masyarakat yang aktif, kreatif, dan selalu mengikuti zaman.
- f. Era perdagangan bebas.
- g. Tuntutan transparansi, demokratisasi maupun penghormatan hak asasi manusia.
- h. Kehidupan bisnis yang semakin marak.

3. Contoh Globalisasi

Untuk lebih kongkritnya tentang globalisasi, berikut akan kita uraikan tentang beberapa contoh globalisasi.

a. Ekonomi

Bagi bangsa Indonesia globalisasi tidak akan memiliki arti apa-apa, apabila disikapi dengan acuh, atau menutup diri, apalagi menolaknya. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menghindarkan diri dari pengaruh globalisasi. Kita harus menyadari bahwa suatu bangsa yang mengisolasi diri dari percaturan dengan bangsa lain, tidak akan mampu mempertahankan hidup secara layak. Oleh karena tidak ada satu bangsa manapun melepaskan diri dari bantuan atau kerja sama dengan bangsa lain.

Hal penting yang perlu kita catat bersama bahwa kemajuan suatu bangsa juga tidak terlepas dari bantuan atau hasil kerja sama dengan bangsa lain.

Suatu bangsa tertentu merupakan bagian dari bangsa lain yang tidak bisa terpisahkan, karena telah terjadi hubungan timbal balik antara negara satu dengan negara lain. Dengan kata lain, adanya saling ketergantungan antara negara industri dengan negara agraris, antara produsen dengan konsumen dan sebaliknya. Contohnya negara maju sangat tergantung kepada negara yang berkembang atau miskin untuk menjual produknya, sebaliknya negara miskin atau berkembang merasa perlu membeli produk dari negara maju, baik untuk kebutuhan pokok maupun untuk kebutuhan pembangunan.

Bagi bangsa Indonesia era globalisasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, dalam menghadapi era globalisasi kita harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas jasa dan pariwisata. Di samping itu, pemerintah harus melakukan rencana dan strategi pembangunan secara seksama, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dengan demikian, dalam era globalisasi tersebut bangsa kita sudah siap untuk berkompetisi dengan bangsa lain.



TWODGT: Tempo, 19 - 25 Juni 2006

+CODCT#gtg# Globalisasi di bidang ekonomi, ditandai dengan sistem pembayaran menggunakan kartu kredit.

Kesimpulan bahwa globalisasi pada bidang ekonomi nampak pada berbagai barang atau produk. Suatu barang/produk tertentu, misalnya kurma, air zam-zam, kentucky, hamburger, batik, dan sebagainya, semula hanya berada di suatu daerah atau negara tertentu sekarang sudah tersedia di pusat-pusat perbelanjaan di penjuru dunia. Selanjutnya sistem pembayaran yang semula secara kontan sekarang bisa dilakukan melalui cek, maupun kartu kredit. Kemudian masalah tenaga kerja, telah terjadinya persaingan antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara Asia, Australia, Amerika maupun Afrika.

b. Sosial Budaya

Contoh globalisasi pada bidang sosial budaya akan sangat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kemasyarakatan telah terjadi perubahan dalam melakukan hubungan. Zaman dahulu komunikasi secara langsung dari anggota masyarakat satu dengan yang lain sering dilakukan,



7WODGT: Tempo, 1 - 7 Agustus 2005

+CODCT#gtt# Di era globalisasi ini, komunikasi antar orang per orang tidak harus secara langsung bertemu. Sekarang cukup dengan menggunakan handphone atau telpon.

namun dalam era global dewasa ini sudah jarang dilakukan. Mereka lebih senang menggunakan teknologi yang lebih canggih, misalnya melalui telpon, SMS, bahkan melalui email. Zaman dulu siswa ke sekolah naik sepeda bahkan jalan kaki, itu hal biasa walau tempat sekolahnya agak jauh. Di era global ini, para siswa pergi ke sekolah sudah banyak yang menggunakan sepeda motor. Dahulu penguasaan teknologi relatif sederhana sekarang sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih. Demikian pula masalah kesenian, bahasa maupun sistem mata pencaharian sudah mengarah kepada tata nilai yang lebih maju.

KEGIATAN 3.1

Carilah informasi dari berbagai media, baik cetak maupun elektronika, tentang pentingnya globalisasi bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan temuan kalian tuangkan dalam kertas kerja/ buku tugas untuk didiskusikan dengan temanmu! Kemudian buatlah kesimpulannya!

B. Politik Luar Negeri Indonesia di Era Global

Pada era globalisasi dewasa ini kebijakan politik luar negeri dalam suatu negara sangat penting, karena berada dalam tatanan global. Jika salah dalam menetapkan kebijakan politik luar negeri suatu negara, akan berdampak pada kurang baiknya hubungan dengan negara-negara di dunia. Hal ini jika terjadi dapat menimbulkan hubungan yang kurang harmonis, sehingga dapat menghambat pembangunan suatu bangsa.

1. Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Dasar hukum kebijakan politik luar negeri ialah Pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “. . . kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka

penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan “. Selanjutnya dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat: “ . . . ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “. Berdasarkan pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 September 1948 tentang kebijakan politik luar negeri kepada Badan Pekerja Komite Nasional menyatakan bahwa: “. . . Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia seluruhnya “.

Menurut Mohamad Hatta, dalam bukunya *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, merumuskan bahwa tujuan politik luar negeri kita adalah sebagai berikut:

- a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
- b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri. Misalnya, barang-barang untuk perbaikan bagian yang rusak, untuk pembangunan dan industrialisasi, dan barang-barang untuk keperluan hidup.
- c. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai lah bangsa Indonesia dapat membangun, demi memperbesar kemakmuran rakyat.
- d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar falsafah negara kita.



7WODGT: Media Indonesia, 7 September 2006

+CODCI#gti#Pasukan TNI menjadi pasukan perdamaian di Libanon (UNIFIL) PBB. Ini bukti negara kita ingin menciptakan perdamaian dunia.

Sejalan dengan kebijakan tersebut kebijakan politik luar negeri mulai dari awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi masih melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Hal ini nampak pada GBHN 1978 menyatakan bahwa dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Dalam GBHN 1999-2004, *memuat arah politik luar negeri Indonesia yang bebas*

aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Hal senada juga pernah disampaikan Presiden Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Ibu Megawati, dalam pidato kenegaraan di depan sidang DPR pada tanggal 16 Agustus 2004. Pidatonya merujuk pada Enam Program Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari:

- a. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI.
- b. Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka, arah, agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap HAM.
- c. Normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehidupan ekonomi rakyat.
- d. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tenteram dalam kehidupan masyarakat, dan melanjutkan pemberantasan KKN.
- e. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara.
- f. Mempersiapkan Pemilihan Umum tahun 2004 yang aman, tertib, bebas, rahasia, dan langsung.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tetap konsisten untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Oleh sebab itu, perlu kita pahami bersama tentang makna politik luar negeri yang bebas dan aktif. *Bebas* mengandung arti bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan sikap dan pandangannya terhadap masalah-masalah internasional, dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan dunia yang secara ideologis bertentangan dengan ideologi bangsa. *Aktif* mengandung arti memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia, aktif dalam memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif dalam memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Pokok-pokok politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Negara kita menjalankan politik damai. Dengan demikian, bangsa Indonesia bersama-sama dengan bangsa lain berusaha menegakkan perdamaian.
- b. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dan tidak mencampuri soal susunan serta corak pemerintahan negara masing-masing.
- c. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.

- d. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.
- e. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional.

Makna Politik Luar Negeri Indonesia

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif mengandung makna bagi bangsa Indonesia, antara lain:

- a. Meningkatkan kerja sama antarberbagai negara, sehingga saling menguntungkan untuk kemajuan bangsa dan negara, serta dapat meningkatkan citra Indonesia di forum internasional.
- b. Mempererat persaudaraan antarbangsa dan antarnegara sehingga terjalin semangat kekeluargaan, serta kerja sama.
- c. Memberikan peluang kepada Indonesia untuk melakukan kegiatan promosi produk dalam negeri maupun kekayaan budaya, serta keindahan alam Indonesia yang dapat meningkatkan devisa negara.
- d. Meningkatkan pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa dalam rangka menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan teknologi serta pada bidang olahraga.
- e. Melakukan antisipasi terhadap gejala, perkembangan dan perubahan dunia, agar pelaksanaan pembangunan tidak terganggu.
- f. Mendorong untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka berkompetisi dengan masyarakat global.
- g. Memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk melakukan ekspor terhadap produksi dalam negeri ke negara lain untuk meningkatkan devisa negara.

Uraian di atas menunjukkan bahwa di era global dewasa ini, bangsa Indonesia mampu melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan negara manapun. Pada percaturan politik dunia, bangsa Indonesia harus menjadi subyek dalam melakukan kerja sama dengan bangsa lain bukan sebagai obyek. Oleh sebab itu, Indonesia bebas dari tekanan atau ikatan dari negara manapun dalam melakukan kerja sama dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia harus mampu menjalin kerja sama dengan bangsa lain untuk mengatasi masalah ekonomi. Misalnya meningkatkan promosi pariwisata Indonesia dengan bangsa lain, mengatasi masalah pengangguran melalui pengiriman dan perlindungan/jaminan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pada bidang politik, meningkatkan kerja sama dengan bangsa lain dalam rangka memperbaiki citra bangsa Indonesia di forum internasional. Menyakinkan kepada dunia tentang jaminan kepastian hukum bagi penanam modal asing di Indonesia. Bidang sosial

meningkatkan kerja sama dengan bangsa lain untuk memberantas penyalahgunaan obat terlarang. Ini dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia yang sangat besar sehingga menjadi pasar empuk bagi produsen obat terlarang dari luar negeri ke Indonesia. Di samping itu, kerja sama di bidang sosial dengan negara lain dapat meningkatkan kesetiakawanan sosial antarbangsa di dunia, misalnya bila terjadi bencana alam. Pada bidang budaya meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, melalui kegiatan magang di luar negeri, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran pelajar, promosi tentang keragaman budaya bangsa sehingga menjadi sumber devisa negara. Bidang pertahanan dan keamanan negara meningkatkan kerja sama dengan bangsa lain untuk menjamin kemerdekaan Negara Republik Indonesia, keamanan dan keselamatan bangsa serta menjamin keutuhan wilayah negara Indonesia. Di samping itu, kerja sama ini juga bisa memperkuat sistem pertahanan serta keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7WODGT: Tempo, 18 - 24 Juli 2005

+CODCT#gt;j#Di era global dewasa ini, bangsa Indonesia bisa bekerja sama dengan bangsa lain guna mempromosikan tentang keragaman budaya bangsa.

Uraian di atas menunjukkan bahwa era globalisasi tidak bisa kita hindari, namun justru harus kita jadikan wahana dalam mengatasi permasalahan bangsa. Kita sepakat demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, tidak ingin terisolasi oleh bangsa lain akibat menentang arus globalisasi. Justru sebaliknya, melalui pergaulan dengan bangsa lain kita dapat belajar dari keberhasilan bangsa lain, tetapi sikap selektif perlu kita tingkatkan. Hal ini akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya.

2. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi

Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa di tingkat pemerintah lembaga yang berperan melaksanakan politik luar negeri Indonesia bukan saja lembaga eksekutif, bahkan DPR juga. Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Pemerintah Daerah juga memiliki wewenang untuk melakukan kerja sama internasional untuk memajukan daerah. Dalam UU No. 37 Tahun 1999 telah diatur tentang penyelenggaraan, pelaksanaan hubungan luar negeri maupun pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Untuk melaksanakan kebijakan politik luar negeri, Pemerintah membentuk Departemen Luar Negeri dan membuka hubungan diplomatik dengan negara lain.

Tugas Departemen Luar Negeri ialah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas di bidang politik dan hubungan luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya Departemen Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan politik luar negeri serta penyelenggaraan hubungan luar negeri.
- b. Pembinaan, koordinasi, dan konsultasi dalam pelaksanaan politik luar negeri serta penyelenggaraan hubungan luar negeri.
- c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi departemen.
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri.
- e. Pelaksanaan pengawasan fungsional.

Kewenangan Departemen Luar Negeri, antara lain:

- a. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- b. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- c. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya.
- d. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara.
- e. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya.

Bentuk hubungan luar negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dapat berupa:

- a. Hubungan individual, misalnya kunjungan sebagai wisatawan di negara lain sebagai mahasiswa di luar negeri atau melakukan transaksi jual beli dengan pedagang di negara lain.
- b. Hubungan antar kelompok, misalnya lembaga-lembaga sosial, keagamaan maupun lembaga perekonomian Indonesia dengan bangsa lain.
- c. Hubungan antar negara yang bersifat lebih luas lagi karena melibatkan kepentingan nasional dan politik.

Dalam perkembangan global dewasa ini bangsa Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktifnya, antara lain:

- a. Indonesia bebas mengadakan hubungan dengan bangsa lain, tanpa tekanan maupun keterikatan dengan bangsa lain. Contohnya:
 - 1) Melakukan kerja sama Indonesia dengan Singapura melalui pembangunan Politeknik Batam dan penandatanganan Persetujuan tentang kerja sama ekonomi di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun (25 Juni 2006). Kerja sama ini dilakukan oleh menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Boediono, dengan menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura. Tujuan dari persetujuan itu adalah mengembangkan kerja sama ekonomi dalam kawasan ekonomi khusus melalui pembangunan pabrik kimia, elektronika maupun pakaian jadi di Batam, Bintan, dan Karimun. Dengan kerja sama ini akan menguntungkan kedua negara dalam bidang pariwisata.
 - 2) Pada bidang pertanian antara Republik Indonesia dengan Ceko pada tanggal 10 Juni 2006, telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (Unita) dengan Universitas Pertanian Ceko. Bentuk kerja sama tersebut berupa pertukaran staf pengajar dan mahasiswa, pengembangan infrastruktur di universitas, pertemuan akademis, riset dan pengembangan potensi ekonomi rakyat. Pengembangan potensi ekonomi rakyat meliputi bidang pertanian dan peternakan.
 - 3) Pada bidang penanaman modal asing perusahaan-perusahaan Malaysia telah menanamkan investasinya ke Indonesia. Investasi tersebut dilakukan dalam beberapa sektor antara lain telekomunikasi, minyak dan gas. Di samping itu, terhadap produk berbasis kelapa sawit, otomotif, dan televisi kabel.
 - 4) Pada bidang sosial, misalnya bangsa Indonesia telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai negara. Bantuan tersebut berupa penanganan korban bencana alam yang terjadi di Indonesia baik yang terjadi di Aceh, Yogyakarta, maupun daerah Ciamis, dan sekitarnya.



7W0DGT: Tempo, 20 Maret 2003

+CODCT#gtk# Adanya kerja sama di bidang sosial dengan negara lain. Ini diwujudkan dengan bantuan penanganan terhadap korban bencana alam (Tsunami) yang terjadi di negara kita.

- 5) Pada bidang politik bangsa Indonesia juga ingin tetap mempertahankan hubungan baik dengan negara manapun, dan selalu menghormati kedaulatan negara-negara lain.
- 6) Pada bidang budaya diwujudkan melalui kerja sama pada bidang kesenian maupun ilmu pengetahuan teknologi dengan negara-negara di dunia ini.
 - b. Bangsa Indonesia juga aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian abadi maupun keadilan sosial melalui pengiriman pasukan perdamaian di Timur Tengah misalnya:
 - 1) Pada era sebelum reformasi bangsa Indonesia telah mengirimkan pasukan "Garuda" sebagai kontingen dari PBB untuk menciptakan perdamaian di beberapa negara misalnya: pada saat terjadi perang antara Inggris, Perancis, dan Israel melawan Mesir tahun 1956, Perang Saudara di Kongo tahun 1960, Vietnam tahun 1973, dan di Mesir tahun 1977.
 - 2) Dalam era reformasi, negara Indonesia akan mengirimkan pasukan perdamaian PBB di Lebanon dengan sebutan Kontingen "Garuda" XXIII. Ini atas permintaan Perdana Menteri Lebanon Fuad Siniora dan Presiden Perancis Jacques Chirac atas nama pasukan perdamaian PBB di Lebanon.
 - 3) Kegiatan lain yang dilakukan Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dunia, adalah melalui kerja sama dengan UNHCR dalam memberikan penanganan masalah pengungsi dari daerah konflik misalnya: Irak, Afganistan, dan Somalia.

KEGIATAN 3.2

Bentuklah kelompok maksimal 5 orang dan lakukan ringkasan tentang kerja sama antarbangsa! Pilih apakah dalam bentuk bilateral, regional maupun multilateral! Kerjakan dalam kertas kerja untuk didiskusikan di depan kelas!

C. Dampak Globalisasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Dalam pergaulan antarmanusia, antarmasyarakat bahkan antarbangsa dalam lingkup yang sekecil apapun sampai dengan yang bersifat global, pasti memiliki dampak positif maupun negatif. Oleh sebab itu, akan berturut-turut kita bahas tentang dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Dampak Globalisasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat



TWODGT: 28 Maret - 3 April 2005

+CODCI#gtL#Di era globalisasi ini, yang sangat mempengaruhi kaula muda di negara kita, adalah gaya hidup dan cara.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada bidang informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya arus globalisasi. Hal ini menyebabkan perubahan sikap, pola, dan gaya hidup antar masyarakat dalam suatu negara maupun lintas negara. Dengan kata lain, akan terjadi saling mempengaruhi. Secara kodrat manusia memiliki dua sisi yang berbeda yaitu menerima atau menolak (pro dan kontra). Bagi orang yang memiliki

landasan yang kuat dalam bidang keagamaan dan kepribadian yang baik, mereka akan menyaring apa yang mereka dengar, lihat, dan rasakan dari pengaruh globalisasi. Dengan demikian, mereka akan menerima pengaruh globalisasi yang bersifat positif dan sebaliknya menolak yang bersifat negatif.

Pengaruh positif yang diikuti dalam lingkungan keluarga, misalnya: mereka mengikuti apa yang mereka lihat dari globalisasi untuk produktivitas kerja anggota keluarga, kesehatan keluarga. Mereka juga melakukan percobaan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan komunikasi secara cepat dan ekonomis, melakukan bisnis, promosi produksinya, dan sebagainya.

Sebaliknya sisi negatif dari pengaruh globalisasi yaitu mengikuti gaya hidup orang barat yang bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Misalnya: kebiasaan meminum minuman keras, pergaulan bebas, hidup glamor, sikap konsumtif, dan cenderung berpikir instan. Pola hidup keluarga berkembang dalam masyarakat yang lebih luas. Dalam lingkungan masyarakat terjadi sikap saling mempengaruhi satu dengan yang lain, baik bersifat positif maupun negatif. Di samping itu, di lingkungan masyarakat terdapat kondisi yang beragam, misalnya ada lingkungan masyarakat yang agamis, sampai pada masyarakat yang tidak karuan. Hal tersebut merupakan dampak positif dan negatif dari era globalisasi.

2. Dampak Globalisasi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Berbicara masalah kehidupan berbangsa dan bernegara pada dasarnya kita sedang membicarakan tentang aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, berikut ini akan kita uraikan tentang dampak globalisasi terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.

a. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Politik

Sebelum membahas dampak globalisasi terhadap kehidupan politik, terlebih dahulu kita bahas tentang politik. Secara umum politik dapat kita katakan sebagai upaya untuk mendapatkan, melaksanakan, dan mempertahankan kekuasaan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan kekuasaan adalah politik.

Selanjutnya dampak globalisasi dalam kehidupan politik sangat besar, karena dalam era globalisasi dewasa ini transparansi merupakan tuntutan masyarakat dalam suatu bangsa. Hal ini diakibatkan dengan adanya kecanggihan teknologi terutama informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, peran serta warga negara dalam kehidupan politik mengalami perkembangan yang sangat bagus. Misalnya mengawasi jalannya perhitungan suara dalam pemilu, kecepatan perhitungan atau pengolahan hasil pemilihan umum. Kehidupan politik lebih demokratis menjadi tuntutan warga negara dalam suatu bangsa, dengan menolak kehidupan pemerintahan negara yang otokratis, sewenang-wenang dengan melakukan pelanggaran HAM.



7WODGT: Tempo, 1 - 7 Agustus 2005

+CODCT#gtm# Masyarakat menginginkan transparansi dalam penegakkan hukum di negara kita.

atau isu teroris juga merupakan dampak globalisasi karena dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya isu bom melalui pesan singkat/SMS bahkan melalui situs-situs tertentu dalam internet. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan dampak globalisasi dalam kehidupan politik. Di samping itu, kita juga harus mampu meningkatkan kehidupan politik yang demokratis, transparan dan tanggung jawab untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

b. Dampak Globalisasi pada Bidang Ekonomi

Masalah ekonomi sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan kita mengenai kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup tersebut meliputi kebutuhan pokok, sekunder, maupun kebutuhan mewah. Dalam konteks ini tidak terlepas pada masalah pertanian, industri, tenaga kerja, BBM, perbankan, perdagangan, transportasi, jasa, pasar, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat kita ungkapkan bahwa dampak positif globalisasi terhadap kehidupan ekonomi adalah sebagai berikut:



7WODGT: Tempo, 14 - 20 Agustus 2000

+CODCT#gtm# Produktivitas akan meningkat karena penggunaan teknologi yang lebih maju di bidang industri.

- 1) Terjadinya perubahan tata kehidupan tradisional menjadi yang lebih maju. Contohnya: intensifikasi lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.
- 2) Penjual jasa lainnya.
- 3) Terjadinya pergeseran sistem pembayaran yang lebih canggih dengan trend baru yaitu menggunakan kartu kredit, cek, dan sebagainya.

- 4) Adanya pergeseran dalam sistem komunikasi dari tradisional. Misalnya surat menyurat, kini sudah menggunakan teknologi canggih berupa telpon, HP, E-mail maupun *chatting*.
- 5) Meningkatnya produktivitas karena penggunaan teknologi yang lebih maju dalam melakukan kegiatan industri.

Dampak negatif globalisasi pada bidang ekonomi, antara lain:

- 1) Tersisihnya pasar tradisional akibat tidak mempunyai budaya saing dalam hal sarana dan kualitas barang pada pusat perbelanjaan.
- 2) Tersisihnya tenaga-tenaga kasar. Misalnya buruh tani dengan tenaga-tenaga yang profesional dan berpendidikan yang menyebabkan makin meningkatnya pengangguran.
- 3) Meningkatnya pencemaran udara dan air, akibat limbah industri baik rumah tangga maupun pabrik.
- 4) Meningkatnya kejahatan ekonomi dengan menggunakan teknologi yang canggih.
- 5) Makin menipiskan sumber bahan bakar minyak dan gas akibat meningkatnya penggunaan untuk dunia industri maupun usaha lainnya.

c. Dampak Globalisasi Pada Bidang Sosial Budaya



TWODGT: Tempo, 14 - 20 Agustus 2000

+CODCT#gte# Di kalangan remaja, dampak negatif globalisasi sudah mulai meresap. Terutama dalam hal gaya hidup, berpakaian, dan pergaulan bebas.

Pada dasarnya masalah sosial budaya sangat berkaitan dengan hasil cipta, karya serta karsa manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, dampak negatif globalisasi pada bidang sosial budaya dapat kita lihat adanya gejala di kalangan remaja. Mereka meniru gaya hidup bangsa lain yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini terjadi pada sebagian kelompok remaja, baik di kota-kota besar bahkan sampai di pelosok tanah air. Gaya

hidup yang mereka tiru, misalnya: model pakaian ketat/tidak menutup aurat, mode rambut memakai cat, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, tawuran, sadisme, brutal, melemahnya semangat kekeluargaan, dan sebagainya.

Di samping dampak negatif, terdapat pula dampak positif globalisasi terhadap sosial budaya antara lain: mendorong untuk melakukan budaya kompetitif dengan bangsa lain, jika tidak mau ketinggalan dengan bangsa lain, penggunaan alat komunikasi dan teknologi yang lebih maju, melakukan inovasi/penemuan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Dampak Globalisasi Pada Bidang Pertahanan dan Keamanan

Masalah pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab kita bersama, TNI dan POLRI merupakan kekuatan intinya. Kita menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah yang sangat luas.



7WODGT: Tempo, 20 Agustus 2005

+CODCT#gtef# Dengan teknologi persenjataan yang canggih, TNI bisa mengamankan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pengawasan terhadap bahaya yang mengancam kedaulatan negara perlu didukung pertahanan dan keamanan negara yang kuat. Perkembangannya sistem pertahanan di negara lain harus diikuti oleh negara lain. Jika sistem pertahanan dan keamanan negara kita tidak didukung peralatan yang canggih dalam mendeteksi ancaman dari luar, maka sangat membahayakan terhadap kedaulatan bangsa dan negara.

Perlu kita ketahui globalisasi dapat mempengaruhi terhadap munculnya gangguan keamanan baik dari dalam maupun dari luar. Contoh kasus meningkatnya kejahatan di dalam negeri akibat, menonton film keras, kemudian menirukannya seperti yang disaksikan dalam film tersebut. Hal lain yang merupakan dampak globalisasi adalah terjadinya kejahatan dengan teknologi canggih. Tidak seperti zaman dahulu yang namanya mencuri dengan mencongkel jendela. Saat ini bisa membobol bank melalui kartu kredit atau teknologi canggih lainnya.

Jadi, pada bidang hankam kita harus mengimbangi dan mengikuti perkembangan teknologi pertahanan dan keamanan. Jika tidak diimbangi dengan penggunaan teknologi canggih dalam pengamanan negara, globalisasi akan berdampak negatif terhadap keamanan dan keselamatan negara.

KEGIATAN 3.3

Bentuk kelompok maksimal 5 orang, masing-masing anggota kelompok melakukan analisis tentang dampak positif dan negatif globalisasi pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan di lingkungan tempat tinggal kalian berada! Langkah selanjutnya susunlah dalam bentuk laporan pada buku tulismu dan presentasikanlah di depan kelas, untuk mendapatkan penyempurnaan (tanggapan) dari kelompok lain!

D. Sikap Selektif dan Cinta Tanah Air terhadap Pengaruh Globalisasi

1. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Globalisasi

Telah kita uraikan di atas bahwa globalisasi memiliki dampak positif maupun negatif. Oleh sebab itu, sikap selektif adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena tidak mau terbawa arus negatif dari globalisasi. Pengertian selektif adalah kemauan dan kemampuan untuk memilih mana yang memiliki manfaat baik. Baik disini berarti baik bagi kemajuan kita sebagai bangsa Indonesia, dan mampu menghindarkan/menjauhkan dari pengaruh negatif yang dapat merugikan kita semua.

Makamin Makagiansar dalam *Mimber Pendidikan* (1950) mencoba mengaitkan globalisasi dengan mengutip sajak dari Mahatma Gandhi, antara lain:

*Biarkan jendela dan pintu rumahku
tetap terbuka lebar
sehingga semua angin
dari utara dan selatan
dari timur dan barat
dapat meniup ke rumahku
tetapi jangan sampai meruntuhkan
fondamen rumahku*

Sajak tersebut dapat memberikan pendidikan pada kita semua sebagai masyarakat global untuk mau menerima globalisasi. Akan tetapi, menerima globalisasi yang bersifat positif dan tidak sampai menghancurkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai bangsa Indonesia kita dapat menyaring pengaruh globalisasi dengan nasionalisme, agama, norma, dan nilai budaya bangsa.

a. Nasionalisme

Derasnya arus globalisasi akan mempengaruhi pada bidang politik, sosial budaya, ekonomi, bahkan suatu keyakinan. Akan tetapi, hal yang menjadi pilar utama adalah semangat untuk tetap mempertahankan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme di sini tidak dalam arti sempit yang mengarah *chauvinisme*, melainkan nasionalisme dalam arti luas dengan tetap menghormati bangsa lain.

Nasionalisme mencerminkan semangat cinta tanah air, baik atau buruk adalah negara kita, siap menerima keragaman yang ada pada komposisi masyarakat Indonesia. Kita mampu meningkatkan kesetiakawanan sosial yang tinggi, dan menjauhkan perbuatan yang berkhianat pada bangsa serta negara.

b. Agama dan Norma



7WODGT: Tempo, 14 - 20 Agustus 2000

+CODCT#gteg# Kita dapat menyaring dampak globalisasi dengan nilai-nilai keagamaan.

Untuk menyaring masuknya pengaruh global terhadap diri kita, masyarakat dan bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran yang kita anut. Hal ini berarti kita dituntut memiliki kemampuan untuk menyaring dampak globalisasi dengan nilai-nilai agama. Dengan kata lain, jika tidak bertentangan dengan ajaran agama yang kita anut dan membawa kemajuan, maka globalisasi dapat kita ikuti. Sebaliknya jika hal tersebut merupakan perbuatan dosa, maka harus kita hindari.

c. Nilai Budaya Bangsa Indonesia

Pengaruh globalisasi harus kita saring dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dengan demikian, ukuran untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sikap selektif kita, dalam menghadapi dampak perkembangan global sulit dihindari, karena kita merupakan bagian dari masyarakat global.

2. Sikap Cinta Tanah Air terhadap Pengaruh Globalisasi

Sebelum kita membahas tentang sikap cinta terhadap tanah air Indonesia terhadap pengaruh globalisasi, perlu kita pahami dulu tentang konsep cinta. *"Setinggi-tinggi terbang bangau jatuhnya ke pelimbahan juga,"* artinya

kemana pun orang pergi (merantau), akhirnya pulang juga ke tempat asalnya (kampung halamannya). Dengan demikian, jika kita analogikan dengan kecintaan terhadap tanah air, kita harus mampu menunjukkan sikap sebagai berikut:

- a. Walaupun bangsa Indonesia sedang dilanda berbagai krisis, namun tetap memiliki kecintaan terhadap tanah air Indonesia.
- b. Dengan kondisi bangsa Indonesia yang sedang membutuhkan bantuan pemikiran dan doa serta usaha kita untuk mengatasi krisis, kita harus rela berkorban untuk tanah air maupun kelangsungan hidup bangsa Indonesia.



7W0DGT: Tempo, 27 September- 3 Oktober 2004

+CODCT#gteh# Dengan kekayaan dan keragaman budaya kita, maka kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini.

- c. Melalui kekayaan budaya kita, maka untuk memberikan sesuatu yang dibutuhkan negara, kita harus mampu setidak-tidaknya mempromosikan kekayaan budaya bangsa dan mengembangkan budaya yang kita miliki sebagai sumber devisa negara.
- d. Menghindarkan diri dari sikap yang tidak terpuji, karena dapat memberikan citra buruk bangsa Indonesia di forum internasional.
- e. Sebagai rasa cinta tanah air kita juga harus memiliki semangat juang untuk membangun negara, serta memberikan sumbangan bagi penyelesaian masalah negara.
- f. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas, kita harus mampu menjaga keseimbangan lingkungan melalui program penghijauan, dan menghindarkan perusakan alam untuk kesejahteraan kita semua.
- g. Selanjutnya kita harus mampu memelihara lingkungan hidup dari berbagai polusi yang dapat mengganggu kesehatan kita bersama.
- h. Untuk mewujudkan sikap kecintaan terhadap tanah air, kita juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- i. Sebagai seorang pelajar kita harus terbiasa untuk belajar dari berbagai sumber baik buku, lingkungan sosial, bahkan mau belajar dari keberhasilan orang atau bangsa lain, serta mengembangkan potensi dan bakat yang telah kita miliki untuk meraih prestasi atau sukses.

KEGIATAN 3.4

Lakukan analisis tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi dan tuliskan dalam kertas kerjamu/buku tugas! Selanjutnya tuliskan bagaimana kalian menyikapi kasus tersebut!

Kata Kunci

1. Globalisasi
2. Dampak globalisasi
3. Politik luar negeri bebas dan aktif
4. Departemen Luar Negeri
5. Keluarga
6. Masyarakat
7. Budaya
8. Teknologi informasi dan komunikasi
8. Hankam
9. Bangsa
10. Negara
11. Selektif
12. Agama
13. Norma
13. Nasionalisme
14. Chauvinisme
14. Nilai budaya
15. Kejahatan ekonomi

RANGKUMAN

1. Kita merupakan bagian dari orang lain dalam masyarakat global. Dengan demikian, bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global. Kita tidak mungkin dapat menghindarkan diri dari pengaruh globalisasi.
2. Globalisasi ialah *“suatu proses dengan mana kejadian, keputusan dan kegiatan di salah satu bagian dunia, menjadi konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat yang jauh.”*
3. Dasar hukum kebijakan politik luar negeri Indonesia ialah Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, alinea keempat, dan pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 September 1948 kepada Badan Pekerja Komite Nasional.
4. Tujuan politik luar negeri kita menurut Moh. Hatta ialah:
 - a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.

- b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri, misalnya: barang-barang untuk perbaikan bagian yang rusak, untuk pembangunan dan industrialisasi dan barang-barang untuk keperluan hidup.
 - c. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai bangsa Indonesia dapat membangun, untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
 - d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar falsafah negara kita.
5. Bentuk kerja sama antara bangsa terdiri atas kerja sama bilateral, kerja sama regional, dan kerja sama multilateral.
 6. Globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat berdampak positif dan negatif. Hal ini sangat tergantung pada warga masyarakat dalam menyikapinya. Warga masyarakat yang kuat agamis dan memiliki kepribadian yang baik akan menyaring arus globalisasi.
 7. Dampak positif globalisasi terhadap kehidupan ekonomi, salah satu contohnya: Terjadinya perubahan tata kehidupan tradisional menjadi yang lebih maju. Pergeseran penggunaan alat tradisional kepada teknologi lebih maju dalam pengolahan lahan pertanian, produksi sandang, pangan dan papan.
 8. Dampak negatif globalisasi pada bidang ekonomi, salah satu contohnya: Makin terkikisnya sumber daya alam Indonesia akibat penggunaan yang berlebihan oleh dunia industri maupun usaha lainnya.
 9. Dampak positif globalisasi dalam kehidupan politik ialah adanya transparansi, meningkatnya pengawasan jalannya pemerintahan negara.
 10. Dampak negatif globalisasi pada bidang sosial budaya ialah adanya gejala pada kalangan remaja untuk meniru gaya hidup dan budaya barat, baik di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air.
 11. Dampak positif globalisasi terhadap sosial budaya di antaranya memberikan dorongan untuk berkompetisi dengan bangsa lain.
 12. Dampak positif globalisasi terhadap pertahanan dan keamanan negara adalah mendorong untuk memberikan pengamanan yang lebih maju dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih.
 13. Dampak negatif terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia yaitu dengan keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh angkatan laut Indonesia sehingga pengamanan di perairan kurang efektif.
 14. Sikap selektif terhadap globalisasi adalah dengan menggunakan penyaring berupa norma agama, nilai budaya bangsa, dan nasionalisme.

15. Sikap cinta tanah air terhadap pengaruh globalisasi ialah dengan menerima kondisi riil yang dialami bangsa Indonesia, dengan tidak melakukan penghujatan terhadap pemimpin bangsa, serta tidak melakukan tindakan destruktif (merusak) yang merugikan bangsa Indonesia.

Soal-Soal Latihan

A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

1. Suatu proses dengan mana suatu kejadian, keputusan di salah satu bagian dunia menjadi konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat jauh merupakan konsep
 - a. global
 - b. globalisasi
 - c. modernisasi
 - d. reformasi
2. Yang *tidak* termasuk ciri globalisasi ialah
 - a. kecepatan informasi
 - b. adanya saling ketergantungan antarnegara
 - c. terjadinya pembaharuan dan inovasi pendidikan
 - d. meningkatnya campur tangan dari luar
3. Dalam perkembangan dunia dewasa ini, alasan yang kurang tepat bangsa Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif ialah
 - a. tidak memihak blok barat dan blok timur
 - b. ingin menjadi subyek dalam hubungan luar negeri
 - c. tidak ingin menjadi obyek dalam percaturan dunia
 - d. ingin mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya
4. Bentuk kerja sama antara Indonesia dengan negara Arab Saudi merupakan bentuk kerja sama
 - a. bilateral
 - b. regional
 - c. multilateral
 - d. kawasan
5. Kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas mengandung makna bebas
 - a. memberikan pengaruh kepada negara lain
 - b. dipengaruhi oleh negara-negara maju
 - c. dari tekanan negara manapun
 - d. mendapatkan keuntungan

6. Contoh dampak positif dari globalisasi pada bidang politik ialah
 - a. meningkatnya jumlah partai politik
 - b. meningkatnya kesadaran warga negara berpolitik
 - c. menurunnya kegiatan warga negara dalam berpolitik
 - d. dihapuskannya praktek politik uang dalam kampanye
7. Contoh dampak negatif globalisasi pada bidang ekonomi ialah
 - a. menurunnya jumlah tenaga kerja Indonesia
 - b. sulitnya pengusaha lokal bersaing dengan hasil dari produk luar
 - c. meningkatnya produk-produk unggulan
 - d. meningkatnya pusat-pusat perbelanjaan
8. Belajar dari pendapat sajak yang disampaikan Mahatma Gandhi ialah
 - a. membiarkan arus globalisasi berjalan
 - b. menutup rapat-rapat dari globalisasi
 - c. mengikuti arus globalisasi yang terjadi
 - d. menyaring globalisasi dengan jati diri bangsa
9. Berdasarkan semangat dan nilai-nilai nasionalisme Indonesia dari dasarnya arus globalisasi adalah dengan tetap mempertahankan
 - a. tegaknya kemerdekaan Negara Kesatuan RI
 - b. pesatnya kemajuan perekonomian dunia
 - c. tegaknya kewajiban asasi manusia
 - d. tegaknya budaya campuran
10. Dampak negatif dari pengaruh globalisasi bagi para remaja yang harus dihindari ialah. . . .
 - a. kebiasaan nonton TV
 - b. seringnya mengakses informasi
 - c. belajar dari keberhasilan bangsa asing
 - d. mengikuti pola hidup bangsa asing
11. Contoh budaya bangsa lain yang patut kita contoh adalah

a. kedisiplinan	c. gaya hidup
b. loyalitas	d. pergaulan hidup
12. Untuk mengangkat posisi ekonomi Indonesia pada era globalisasi yang lebih baik ialah
 - a. menolak industrialisasi
 - b. memfokuskan bidang pertanian
 - c. peningkatan sumber daya manusia
 - d. swastanisasi perusahaan milik negara

13. Perbaikan kehidupan politik bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi adalah
 - a. sederhanakan jumlah parpol
 - b. menghilangkan kegiatan kampanye
 - c. menegakkan budaya sadar hukum
 - d. menghilangkan partai oposisi
14. Contoh pengaruh negatif dari globalisasi ialah
 - a. meningkatnya tindakan kriminalitas
 - b. meningkatnya sikap konsumtif warga
 - c. banyaknya kasus kenakalan remaja
 - d. bersaingnya mutu produktivitas
15. Dampak positif globalisasi dalam kehidupan politik ialah meningkatnya
 - a. kasus demonstrasi
 - b. transparansi
 - c. masalah politik
 - d. pengaruh politik negara maju
16. Sebagai penyaring globalisasi berdasarkan tata nilai budaya bangsa Indonesia ialah
 - a. kesenian daerah
 - b. Pancasila
 - c. kebiasaan nasional
 - d. perjanjian internasional
17. Unsur budaya asing yang dapat kita tiru untuk mempercepat pembangunan bangsa ialah
 - a. sistem mata pencaharian
 - b. sistem keagamaan
 - c. kesenian
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi
18. Sikap cinta tanah air untuk mengatasi masalah krisis ekonomi nasional dapat kita lakukan melalui kegiatan
 - a. menabung
 - b. menaati hukum
 - c. menjaga ketertiban
 - d. menggunakan barang mewah
19. Sebagai pelajar rasa kecintaan terhadap tanah air dapat diwujudkan melalui
 - a. belajar sambil bekerja
 - b. meningkatkan prestasi belajar
 - c. meningkatkan kegiatan belajar di luar kampus
 - d. membantu orang yang sangat membutuhkan

20. Sikap yang harus kita hindari dalam perkembangan global dewasa ini ialah
 - a. mengikuti arus globalisasi
 - b. menutup diri dari globalisasi
 - c. menonton film yang berjudul perjuangan
 - d. menyaring budaya asing

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar pada buku tulismu!

1. Jelaskan pengertian globalisasi!
2. Identifikasikan ciri-ciri globalisasi!
3. Jelaskan perbedaan antara globalisasi, reformasi, dan modernisasi!
4. Jelaskan dampak negatif globalisasi pada bidang sosial budaya!
5. Jelaskan dampak positif globalisasi pada bidang ekonomi!
6. Jelaskan sikap Anda dalam menghadapi arus globalisasi dewasa ini!
7. Berilah contoh sikap menyaring arus globalisasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila!
8. Bagaimana upaya kalian dalam meningkatkan kecintaan terhadap tanah air!
9. Identifikasikan segi positif dari globalisasi pada bidang budaya!
10. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan kita semua dalam rangka memperbaiki kemerosotan moral di sebagian kalangan remaja!

C. Tes Unjuk Kerja

Salin dan isilah tabel perbandingan antara sebelum dan sesudah globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan pada buku tulismu!

No.	Bidang	Sebelum	Sesudah
1.	Politik		
2.	Ekonomi		
3.	Sosial dan Budaya		
4.	Hankam		

D. Tugas

1. Amatilah lingkungan sekolahmu tentang bentuk Globalisasi yang kalian rasakan sebagai pelajar! Tulislah laporannya pada buku tulismu!
2. Carilah contoh bentuk hubungan kerja sama negara Indonesia dalam bentuk kerja sama bilateral, regional dan multilateral! Kemudian buat klipping dan berikan komentar! (Jawaban ditulis pada buku tulismu)

Bab IV

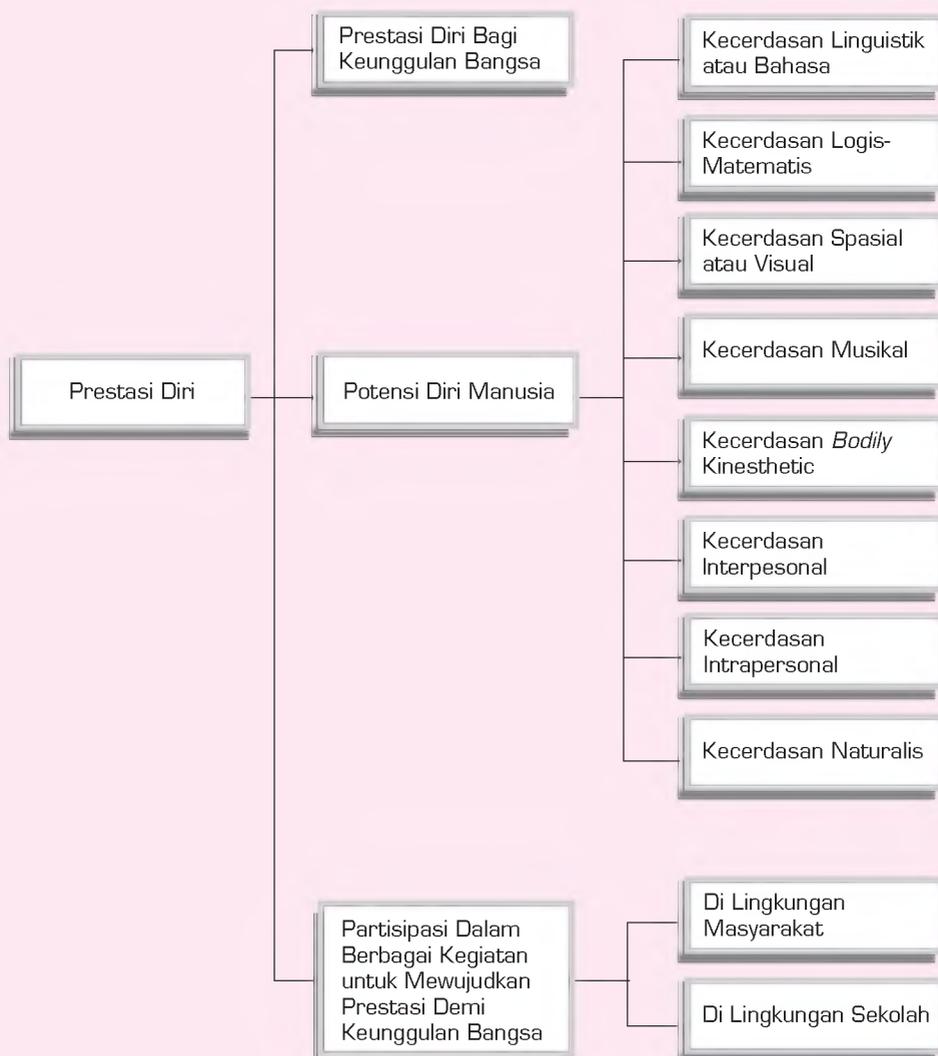
Prestasi Diri

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat:

1. menguraikan alasan bangsa Indonesia untuk meningkatkan prestasi diri;
2. menjelaskan dampak bagi suatu bangsa yang tidak mampu meningkatkan prestasinya;
3. menunjukkan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan prestasi diri sebagai bangsa;
4. menjelaskan pengertian prestasi diri;
5. mengidentifikasi bakat dan kecerdasan seseorang;
6. mengembangkan bakat dan kecerdasan yang dimiliki;
7. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk meraih prestasi;
8. mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa atas potensi yang telah diberikan.

PETA KONSEP



Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan berbagai masalah baik yang menyangkut ekonomi, sosial budaya, politik bahkan moral. Bangsa yang lemah akan menjadi lahan penjualan produksi dari negara-negara industri, tempat pembuangan limbah industri karena keterbatasan penguasaan IPTEK untuk menyelesaikan kasus tersebut.



7WODGT: Tempo, 7 - 13 Februari 2005

+CODCT#hte# Agar menjadi bangsa yang unggul dan berprestasi, kita harus bekerja kerja

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka sehingga perlu menghindarkan diri dari kejadian tersebut. Oleh sebab itu, kita harus bekerja keras untuk dapat menjadi bangsa yang berprestasi bahkan lebih unggul dari bangsa lain. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan potensi maupun bakat yang dimiliki bangsa kita sendiri. Berikut ini kita akan membahas tentang pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa, potensi diri, dan menampilkan peran serta dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan prestasi diri.

A. Prestasi Diri Bagi Keunggulan Bangsa

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, memiliki daerah yang subur. Akan tetapi, kemerdekaan yang diraih sejak tahun 1945 hingga sekarang belum dapat dinikmati sebagaimana yang diharapkan. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tentang tujuan negara (melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi) belum dapat terwujud.

Belum tercapainya tujuan tersebut tampak dalam berbagai masalah yang belum dapat terpecahkan, misalnya kemiskinan, kemerosotan moral, pengangguran intelek, kriminal, korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, penanganan bencana alam, dan lingkungan hidup. Hal ini menjadi tantangan, bagi penyelenggara pemerintahan negara, maupun warga negara biasa. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk meningkatkan prestasi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, agar tidak menjadi bangsa yang tertinggal dari bangsa lain. Berkaitan dengan hal tersebut, kita harus memiliki keteguhan hati untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga, masyarakat untuk menyiapkan generasi muda yang diharapkan.



7WGDST: Tempo, 12 - 18 September 2005

+CODCT#htf# Di sekolah setiap siswa dibentuk menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, serta cerdas.

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, cerdas, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, terampil serta sehat jasmani dan rohani (manusia yang berkualitas). Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, maka hal tersebut menjadi modal dasar dalam mewujudkan bangsa yang unggul dalam berbagai bidang. Misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik bahkan di bidang hankam maupun keagamaan.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. di dunia ini adalah sama dan sederajat, hanya lingkungan dan upayalah yang membedakan mereka. Untuk mewujudkan prestasi kita harus melakukan usaha, baik dalam menghadapi keberhasilan atau kegagalan. Keberhasilan yang diraih harus kita syukuri dengan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Sebaliknya kegagalan harus dijadikan sebagai keberhasilan yang tertunda, bukan menimbulkan frustrasi tanpa melakukan perbaikan yang berarti.

Sebagai bangsa yang besar kita harus siap dan mampu belajar dari keberhasilan bangsa lain. Misalnya kita bisa belajar dari bangsa Jepang yang wilayah negaranya kecil, tetapi bisa menjadi negara yang maju.



7WGDST: Tempo, 25-27 Februari 2005

+CODCT#htg# Salah satu ciri peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu memiliki etos kerja.

Sejalan dengan semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan negaranya, kita harus mau dan mampu mempelajari potensi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju. Dengan kata lain, kita harus mampu menganalisis dari segi kekuatan, kelemahan, tantangan maupun peluang yang mungkin timbul dalam pergaulan dunia.

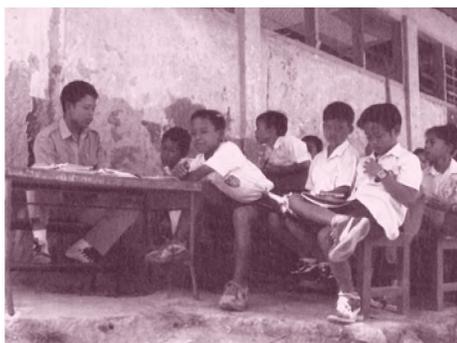
Berdasarkan uraian di atas, kunci pokok untuk menjadi bangsa yang unggul adalah kemampuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sum-

ber daya manusia (beriman dan bertaqwa, cerdas, disiplin, memiliki etos kerja, kreatif, inovatif, sehat jasmani dan rohani) merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai sejak dini melalui lingkungan keluarga. Hal ini merupakan pendidikan pertama bagi anak-anak.

Dimulai dari lingkungan keluarga kita tanamkan ketaatan ibadah, disiplin terhadap norma, kerja sama, kesetiakawanan sosial, sehat jasmani dan rohani serta perbaikan gizi. Penggalian potensi masing-masing anggota keluarga dapat dikembangkan untuk menjadi sebuah prestasi. Selanjutnya individu-individu dalam keluarga akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat yang maju dan kompetitif, akan mendorong seseorang untuk senang berlomba meraih prestasi.

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang lebih maju dibandingkan dengan keluarga. Oleh karena di sekolah telah dibangun suatu sistem pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, dan tenaga pendidik yang telah dipersiapkan secara baik. Oleh sebab itu, sekolah merupakan tumpuan orang tua agar putra-putrinya menjadi manusia yang berkualitas, serta memiliki prestasi di kemudian hari. Banyak terobosan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, misalnya memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) pada tingkat pendidikan dasar, dan mempersiapkan peningkatan kualitas pendidikan pada tingkat menengah. Dengan demikian, kita berharap, berusaha, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjadi bangsa yang unggul di kemudian hari.

Pada era mega kompetitif dewasa ini, kualitas sumber daya Indonesia sangat penting untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Suatu bangsa yang memiliki kualitas sumber daya manusia rendah, akan menjadi bangsa yang terjajah pada bidang ekonomi, sosial budaya oleh bangsa lain.



7W0DST: Tempo, 25-31 Juli 2005

+CODCT#htb#Akibat dana pendidikan yang belum sesuai harapan. Ini berdampak pada penyediaan sarana, prasarana, dan kualitas pendidikan yang jauh dari harapan.

Tantangan bangsa Indonesia dewasa ini dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah alokasi dana pendidikan yang belum mencapai 20% dari APBN. Kondisi tersebut berdampak pada penyediaan sarana dan prasana pendidikan maupun kesejahteraan guru. Oleh karena itu, kualitas pendidikan kita belum sesuai dengan harapan kita semua.

Hal lain yang menjadi kendala bagi kita sebagai bangsa Indonesia, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah masih

adanya budaya santai. Upaya yang harus kita lakukan bersama adalah membiasakan untuk hidup penuh semangat, kerja keras, senang berkompetisi. Budaya untuk meraih sukses walaupun di negeri orang dengan tetap memelihara kekeluargaan juga merupakan tantangan bagi kita semua.

KEGIATAN 4.1

Bentuklah kelompok maksimal terdiri dari lima orang. Setiap kelompok mencari/menggali informasi dari berbagai media tentang kondisi yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih tertinggal dengan bangsa lain.

Coba analisis dampak bagi suatu bangsa yang tergantung pada bangsa lain! Kemudian apa upaya pemerintah untuk mengatasi keteringgalan dengan bangsa lain?

Hasil kerja kelompok Anda tuliskan dalam kertas kerjamu! Kemudian tampilkan di depan kelas untuk mendapat tanggapan dari kelompok lain.

B. Potensi Diri untuk Berprestasi

Kita ketahui bersama bahwa dalam lingkungan masyarakat dan sekolah terdapat banyak orang yang memiliki potensi, namun orang tersebut belum mengetahui potensi yang ada pada dirinya. Sebaliknya orang yang potensi biasa-biasa saja, namun dengan kerja keras, ulet, belajar, berlatih dan berdoa dapat mengoptimalkan potensi sehingga meraih prestasi. Oleh sebab itu, kita perlu mengenali diri tentang potensi yang kita miliki untuk dikembangkan menjadi prestasi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia *potensi diri* adalah *kemampuan-kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal*. Menurut Prof. Dr. Buchori Zainun, MPA, potensi adalah daya. Daya ini dapat bersifat positif yaitu berupa kekuatan (*power*) dan dapat bersifat negatif yang berupa kelemahan (*weaknesses*). Istilah lain yang sangat berkaitan adalah bakat dan inteligensi atau kecerdasan.

Menurut Dr. Herminarto Sofyan bakat dan kecerdasan merupakan dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan. *Bakat* adalah kemampuan yang merupakan sesuatu yang melekat dalam diri seseorang yang dibawa manusia sejak lahir dan terkait dengan dengan struktur otak. *Kecerdasan* adalah modal awal bakat tertentu. Tingkat kecerdasan intelektualitas seseorang yang

berbakat biasanya cenderung di atas rata-rata. Selain kecerdasan intelektual (IQ) yang dapat menjadikan seseorang berbakat, juga kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual. Bakat seseorang 60% adalah diturunkan dari orang tua, selebihnya adalah faktor lingkungan.



TWODGT: Tempo, 7 - 13 November 2005

+CODCT#hti#Orang tua yang memiliki bakat, secara alami dapat diturunkan kepada anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut seseorang yang dilahirkan dari orang tuanya telah melekat suatu bakat yang merupakan warisan dari orang tua. Oleh sebab itu, orang tua yang memiliki bakat menari, menyanyi, pidato, dan sebagainya akan diwariskan kepada anaknya sekitar 60%. Ini modal awal yang dapat dibina dan dikembangkan dalam lingkungannya melalui kecerdasan yang dimiliki untuk meraih kesuksesan atau prestasi.

Seseorang yang berbakat akan mampu mencapai prestasi tinggi karena telah memiliki kemampuan yang unggul, antara lain:

1. Kemampuan intelektual umum.
2. Kemampuan akademis khusus.
3. Kemampuan berpikir kreatif produktif.
4. Kemampuan memimpin.
5. Kemampuan dalam salah satu bidang seni dan psikomotor.

Ciri-ciri bakat seseorang adalah memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Memiliki ingatan yang kuat.
2. Memiliki logika dan keterampilan analisis yang kuat.
3. Mampu berpikir abstrak.
4. Mampu membaca tata letak.
5. Mempunyai keterampilan mekanis.
6. Mempunyai bakat musik dan seni.
7. Luwes dalam atletik dan menari.
8. Pintar bersosialisasi.
9. Mampu memahami perasaan manusia.
10. Mampu memikat dan merayu.

Sebagai seorang pelajar SMP harus mampu memilih jenis sekolah lanjutan yang akan dipilih berdasarkan potensi yang dimiliki. Harapan kesesuaian antara jenis sekolah dengan potensi yang dimiliki mampu mengantarkan kesuksesan di kemudian hari.

Hal penting untuk diperhatikan bahwa sebagai umat yang beragama harus mampu mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa atas prestasi sekecil apapun. Sebaliknya mampu mengevaluasi diri atas kegagalan yang dialami untuk menjadikan prestasi di kemudian hari. Hindarkan perbuatan yang merusak dan frustrasi jika mengalami suatu kegagalan.

Kita ketahui bersama bahwa manusia tidak ada yang sempurna artinya memiliki keunggulan, tetapi juga banyak kekurangan. Oleh sebab itu, berikut ini merupakan ciri-ciri orang yang berbakat, di antaranya:

1. Kadang-kadang mengaktualisasikan pernyataan secara fisik berdasarkan pemahaman pengetahuan yang sedikit.
2. Dapat mendominasi diskusi.
3. Tidak sabar untuk segera maju ke tingkat berikutnya.
4. Suka ribut.
5. Memilih kegiatan membaca daripada berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, atau kegiatan fisik.
6. Suka melawan aturan, petunjuk-petunjuk atau prosedur tertentu.
7. Frustrasi disebabkan tidak jalannya aktivitas sehari-hari.
8. Menjadi bosan karena banyak hal yang diulang-ulang.
9. Menggunakan humor untuk memanipulasi sesuatu.
10. Melawan jadwal yang hanya didasarkan atas pertimbangan waktu saja, bukan atas pertimbangan tugas.

Uraian di atas menyadarkan kepada kita bahwa di samping keunggulan bakat kita, terdapat pula keunggulan bakat orang lain. Oleh sebab itu, harus kita kembangkan sikap toleran dan menghormati orang lain.

Menurut Howard Gardner kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur kecerdasan matematika logika, kecerdasan bahasa, kecerdasan musikal, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetika, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan natural.

Dengan berbagai kecerdasan yang kita miliki, pada umumnya seseorang mendambakan keterampilan kerja yang dapat mendukung keberhasilan terhadap profesi kita. Berikut ini akan kita uraikan keterampilan kerja dan profesi sesuai dengan kecerdasan yang kita miliki.

1. Kecerdasan Linguistik atau Bahasa

Seorang siswa yang memiliki kecerdasan pada bidang bahasa akan memiliki keterampilan kerja seperti: berbicara, menginformasikan, memberi perintah, menulis, mengungkapkan dengan kata-kata, menafsirkan, menerjemahkan, mengajar, berceramah, berdiskusi, berdebat, meneliti, mengoreksi, mengolah kata, melaporkan.



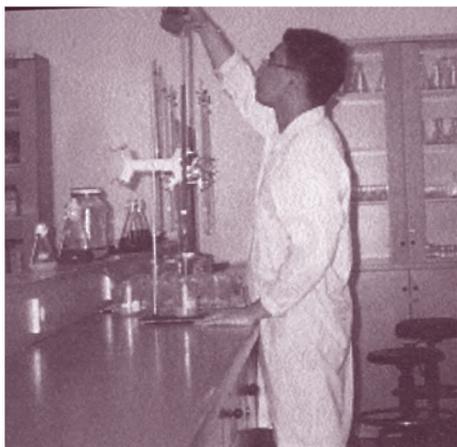
7W0DGT: Tempo, 9 - 15 Agustus 2004

+CODCI#htj#Menjadi reporter atau jurnalis merupakan profesi yang relevan dengan kecerdasan bahasa.

Profesi yang relevan dengan kecerdasan bahasa ialah penyiar radio/TV, jurnalis, pengacara, sekretaris, kurator, editor, korektor, guru bahasa Inggris, pustakawan, pengarsip, reporter dan penerjemah.

Dari uraian di atas kalian dapat melakukan penilaian diri terhadap kecerdasan yang dimiliki. Dengan demikian, kita dapat memilih jenis profesi yang akan ditekuni nanti sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki.

2. Kecerdasan Logis-Matematis



7W0DGT: Tempo, 19 Juni 2006

+CODCI#htk#Menjadi seorang ilmuwan dibutuhkan kecerdasan Logis-Matematis.

Siswa yang memiliki kecerdasan logis - matematis memiliki keterampilan kerja seperti: merancang keuangan, menyusun anggaran, melakukan penelitian ekonomi, menghitung, menganalisis, mengelompokkan, mengurutkan dan membuat teori. Contoh profesi yang sesuai dengan kecerdasan tersebut ialah akuntan, ahli matematika, ilmuwan, ahli statistik, juru taksir, analis/programer komputer, ekonom, teknisi, dan guru ilmu alam.

Gambaran di atas mudah-mudahan membantu kalian untuk melakukan perencanaan pendidikan lanjutan untuk mempersiapkan kesuksesan di masa depan. Berdasarkan keserasian antara keinginan, keterampilan kerja serta profesi yang diharapkan, kalian bisa menentukan jenis pendidikan yang akan dipilih. Dengan demikian, profesi yang sejalan dengan kecerdasan yang dimiliki akan menimbulkan kesenangan terhadap pekerjaan yang dipilihnya. Hal inilah yang dapat memberikan peluang besar untuk mencapai kesuksesan.

3. Kecerdasan Spasial atau Visual

Keterampilan kerja yang sesuai dengan kecerdasan spasial/visual ialah menggambar, melukis, merancang, membayangkan, menemukan, mewarnai, membuat peta, memotret, menghias, dan membuat film.



TMODST: Tempo, 2 - 8 Agustus 2004

+CODCT#ht1 Menjadi seorang fotografer harus mempunyai kecerdasan spasial/visual.

Profesi yang relevan dengan kecerdasan spasial ialah insinyur, arsitek, ahli tata letak, seniman grafis, desainer, fotografer, pilot, seniman rupa, dan pematung.

Dari gambaran di atas kita perlu menemukan bakat yang kita miliki sesuai dengan kecerdasan dalam menggunakan/memanfaatkan visual yang dapat mendukung keberhasilan kita di masa depan. Jika kalian memiliki kemampuan menggambar, memotret atau menghias merupakan modal untuk mampu hidup mandiri. Akan tetapi, pada usia kalian lebih baik meningkatkan kecerdasan dan bakat yang kalian miliki melalui pendidikan. Baik melalui jalur formal maupun kursus-kursus sebagai bekal hidup di kemudian hari yang lebih baik.

4. Kecerdasan Musikal

Keterampilan kerja yang sesuai dengan kecerdasan musikal ialah bernyayi, memainkan alat musik, merekam, menggubah lagu, menyusun aransemenn, mendengarkan, membedakan nada, menyotel nada.



Tempo, 21 - 27 April 2003

Keterampilan yang sesuai dengan kecerdasan musikal, salah satunya memainkan alat musik.

Profesi yang sesuai dengan kecerdasan musikal ialah musisi, pembuat alat musik, penyatelj piano, penulis lagu, teknisi studio musik, penyanyi, dan guru musik.

Bangsa Indonesia memiliki kepribadian khas daripada bangsa lain (kekeluargaan musyawarah, mufakat, serta iman dan takwa) sehingga kecerdasan musikal yang kita miliki perlu dipadukan dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Dengan demikian, seni musik yang dilantunkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa maupun agama yang kita anut.

5. Kecerdasan *Bodily Kinesthetic*



Tempo, 21 - 27 April 2003

Penari memiliki keterampilan khusus dan sesuai dengan kecerdasan *bodily kinesthetic*.

Keterampilan kerja dimiliki seorang siswa yang memiliki kecerdasan *bodily kinesthetic* meliputi menyusun, menyeimbangkan, mengangkat, membawa, berjalan, berlari, membuat prakarya, membersihkan, mengirimkan, mengantarkan, berpanthomim, mendramatisasi, berolahraga, menari, memperagakan busana.

Contoh profesi yang sesuai dengan kecerdasan tersebut misalnya sebagai: penari, model, petani, montir, tukang kayu, pengrajin, guru olahraga, pegawai pabrik, penata tari, atlet profesional, ahli permata, dan jagawana.

Kecerdasan *bodily kinesthetic* dalam era teknologi canggih dewasa ini, dapat menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan gerakan erotis yang dilakukan oleh penari, karena bertentangan dengan tata nilai budaya bangsa. Oleh sebab itu, kita perlu menyesuaikan dengan norma agama maupun tata nilai budaya bangsa.

6. Kecerdasan Interpersonal



7WODGT: Tempo, 17 - 24 April 2003

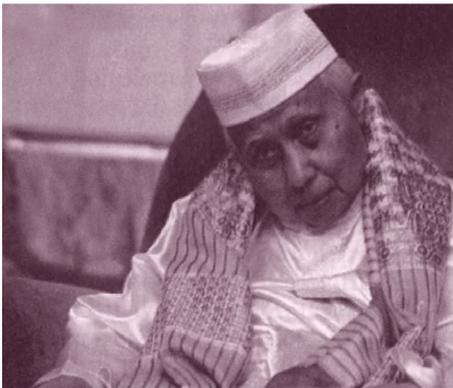
+CODCT#htee# Menjadi seorang pedagang dibutuhkan kecerdasan interpersonal.

sekolah, pegawai personalia, konselor, psikolog, agen wisata, dan direktur sosial. Kecerdasan interpersonal bagi seorang individu sangat penting. Ini dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk memiliki kemampuan mengadakan komunikasi dengan orang lain demi keberhasilan dalam hidupnya.

Keterampilan kerja yang dimiliki bagi siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal ialah melayani, menjadi tuan rumah, berkomunikasi, berempati, berdagang, mengajar, melatih, konseling, membimbing, menilai orang, mengawasi, berunding, mendelegasikan, bekerja sama, dan mewawancarai.

Contoh profesi yang sesuai dengan kecerdasan interpersonal ialah direktur, manajer, kepala

7. Kecerdasan Intrapersonal



7WODGT: Tempo, 19 - 25 September 2005

+CODCT#htef# Menjadi seorang pemuka agama dibutuhkan kecerdasan intrapersonal.

Seseorang yang memiliki kecerdasan intrapersonal akan memiliki keterampilan kerja sebagai berikut: memutuskan bekerja sendiri, mempromosikan diri, menetapkan tujuan, menyusun sasaran, menilai, memahami diri. Profesi yang relevan dengan kecerdasan tersebut ialah psikolog, pemuka agama, guru psikologi, terapis, perencana program, pengusaha.

Pada dasarnya pendidikan yang dialami siswa dari pendidikan dasar, menengah sampai ke perguruan

tinggi merupakan upaya mendewasakan anak. Seseorang yang telah dewasa akan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri. Kemandirian yang dimaksud adalah dalam berpikir, bertindak serta menyelesaikan masalah hidupnya.

8. Kecerdasan Naturalis



TWODGT: Tempo, 13 - 19 Februari 2006

+CODCT#hteg# Kecerdasan natural banyak dimiliki oleh seorang peneliti.

Keterampilan kerja yang dimiliki seseorang yang memiliki kecerdasan natural ialah: peka terhadap lingkungan alam, mengobservasi lingkungan alam. Profesi yang relevan dengan kecerdasan tersebut ialah: peneliti, ilmuwan, astronot. Melalui kecerdasan alam tersebut, seorang individu dapat menjadikan wahana untuk dapat mensyukuri atas anugerah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia.

Teori di atas selanjutnya dikembangkan oleh Daniel Goleman dalam bukunya *Emotional Intelligence* atau kecerdasan emosional. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa orang yang sukses tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, namun perlu didukung adanya kecerdasan emosional. Terdapat lima kemampuan yang berkaitan dengan kecerdasan emosional yaitu kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain serta kemampuan membina hubungan. Menurut Reuven Bar-On kecerdasan emosional mengandung lima ranah yaitu:

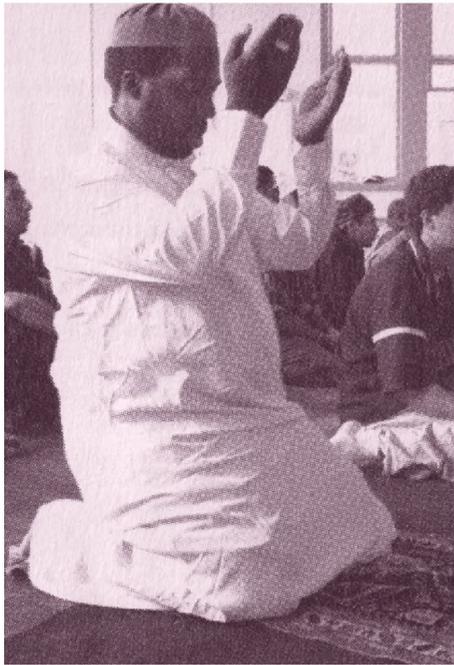
a. Ranah Intrapribadi

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Ruang lingkupnya meliputi:

- 1) *Kesadaran diri* yaitu kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa kita merasakan seperti itu dan dampak perilaku kita terhadap orang lain.
- 2) *Sikap asertif* yaitu kemampuan untuk menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan kita, membela diri dan mempertahankan pendapat.
- 3) *Kemandirian* artinya kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri serta mandiri atau tidak lagi tergantung pada orang lain.
- 4) *Penghargaan diri* yaitu kemampuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita serta dapat menyenangkan diri, walaupun kita memiliki berbagai kelemahan.

- 5) *Aktualisasi diri* artinya kemampuan untuk mewujudkan potensi yang kita miliki dan merasa puas dengan prestasi yang telah kita raih.
- b. Ranah antarpribadi
Aspek ini berkaitan dengan kemampuan kita bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Ranah ini meliputi tiga skala antara lain:
 - 1) *Empati* merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain serta kemampuan melihat dunia atau jagat raya ini dari sudut pandang orang lain.
 - 2) *Tanggung jawab sosial* merupakan kemampuan kita untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang mau dan mampu bekerja sama serta hidupnya bermanfaat untuk masyarakat.
 - 3) *Hubungan antarpribadi* merupakan kemampuan untuk mengadakan dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan. Ini ditandai dengan adanya sikap mau memberi dan menerima dari orang lain, tentunya dalam situasi yang harmonis atau dalam kedekatan emosional diantara mereka.
- c. Ranah penyesuaian diri
Ranah penyesuaian diri sangat berkaitan dengan kemampuan kita untuk bersikap lentur dan realitis, serta dapat memecahkan masalah yang timbul. Ranah tersebut meliputi tiga skala antara lain:
 - 1) *Uji realitas* artinya kemampuan kita untuk melihat sesuatu berdasarkan kenyataan bukan yang kita inginkan atau yang kita takuti/tidak kita inginkan.
 - 2) *Sikap fleksibel* artinya kemampuan kita untuk dapat menyesuaikan dengan perasaan, pikiran bahkan tindakan dengan keadaan yang berubah-ubah.
 - 3) *Pemecahan masalah* yaitu kemampuan untuk memberikan batasan tentang masalah, melakukan tindakan atau tidak diam dalam rangka mencari solusi atau pemecahannya.
- d. Ranah pengendalian stres
Ranah pengendalian stres sangat berkaitan dengan ketahanan menghadapi stres dan mengendalikan impuls. Kedua skalanya meliputi:
 - 1) *Ketahanan menanggung stres* artinya ketahanan untuk tetap tenang dan konsentrasi secara konstruktif menghadapi keadaan yang gawat dan tetap tegar menghadapi konflik.
 - 2) *Pengendalian impuls* artinya kemampuan untuk menunda atau menahan keinginan bertindak.

- e. Ranah suasana hati umum
Ranah tersebut memiliki dua skala antara lain:
- 1) *Optimisme* yaitu kemampuan untuk mempertahankan sikap positif yang realistis, terutama dalam mengatasi masa-masa sulit.
 - 2) *Kebahagiaan* adalah kemampuan untuk bersyukur kehidupan, menyukai diri sendiri dan orang lain, untuk bersemangat dan bergairah dalam melakukan setiap kegiatan.



7WODGT: Tempo, 3 - 9 Desember 2001

+CODCT#hte# Manusia hanya berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Untuk itu, jangan lupa kita selalu berdoa kepada-Nya.

Berdasarkan uraian di atas kecerdasan intelektual maupun emosional yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kita harus memiliki kecerdasan spiritual yaitu dengan selalu menjalankan segala perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Harus kita akui bersama bahwa segala upaya yang telah kita lakukan dengan berbagai cara, jika Tuhan tidak meridhoi jangan harap dapat terwujud. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia biasa hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak kalah penting bahkan sangat penting. Dengan berbagai kecerdasan yang telah kita miliki, kita berharap menjadi orang yang sukses dalam hidupnya, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat.

Di atas telah kita uraikan panjang lebar tentang prestasi diri, selanjutnya perlu kita ketahui bersama tentang makna prestasi diri. Menurut kamus besar bahasa Indonesia *prestasi diri adalah hasil yang dicapai oleh seseorang*. Kita mengenal istilah prestasi akademik yang meliputi prestasi pada mata pelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Sedangkan prestasi non akademik adalah prestasi yang berdasarkan pengembangan diri seorang siswa, misalnya meraih juara dalam kegiatan pertandingan pencak silat, MTQ, Pramuka, PMR, Paskibra se-Kota atau Kabupaten.

KEGIATAN 4.2

Perhatikan kasus di bawah ini!

Dalam suatu keluarga yang banyak anaknya, namun memiliki beragam kecerdasan dan prestasi. Hal ini menimbulkan kebahagiaan bagi orang tua yang anaknya berprestasi yang baik, namun kesal juga terhadap anaknya yang berprestasi buruk. Anak tersebut selalu menjengkelkan dan selalu membuat kenakalan baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah.

Coba berikan penilaian terhadap kasus tersebut, kemudian lakukan analisis terhadap munculnya kasus kenakalan anak tersebut agar menjadi anak yang berprestasi, seperti yang lain! (Jawaban ditulis pada kertas kerjamu)

C. Partisipasi Dalam Berbagai Kegiatan untuk Mewujudkan Prestasi Demi Keunggulan Bangsa

Pepatah mengatakan *"dimana ada kemauan, disitu ada jalan,"* namun kemauan yang tidak dibarengi dengan usaha dan doa sama dengan jangan mengharapkan suatu hasil.

Dewasa ini bangsa Indonesia berada dalam posisi terpuruk pada bidang kehidupan, baik yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, moral, pertahanan dan keamanan. Masalah tersebut merupakan tanggung jawab kita semua, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Prestasi pada bidang politik bisa diwujudkan oleh para aktor politik atau politikus, dan aparatur pemerintah. Keberhasilan tersebut diukur berdasarkan pada aturan main yang berlaku, penegakkan HAM, kemampuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.



7W0DGT: Gatra, 19 Agustus 2000

+CODCT#htei# Seorang yang berprestasi di bidang ekonomi, akan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Prestasi pada bidang ekonomi nampak pada kemampuan seseorang untuk menciptakan lapangan kerja baru, melakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, peningkatan produktivitas kerja, kemampuan menembus pasar dunia bagi produk dalam negeri, dan mampu mengatasi berbagai macam krisis.

Prestasi pada bidang sosial budaya akan nampak dalam meningkatkan kualitas pendidikan baik pada tingkat pendidikan dasar (SD, SMP), pendidikan menengah, dan pada tingkat pendidikan tinggi. Penguasaan iptek, kesetiakawanan sosial sesama anggota masyarakat maupun warga bangsa, juga merupakan prestasi pada bidang sosial budaya.

Prestasi pada bidang pertahanan keamanan akan nampak pada kemampuan memelihara pertahanan dan keamanan negara. Di samping itu, harus mempunyai kemampuan memiliki alat-alat yang diperlukan bagi pertahanan negara.

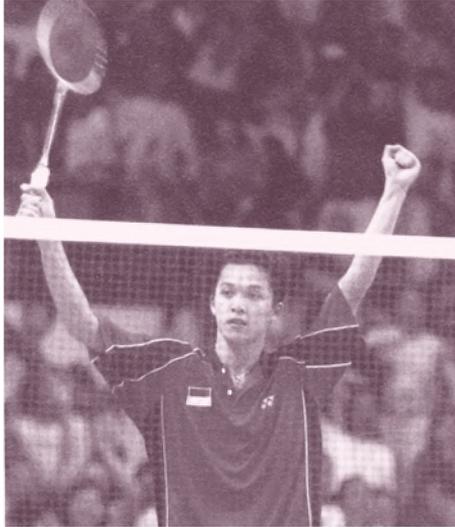
Berdasarkan uraian tersebut di atas, kita dapat berperan serta dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan prestasi sesuai dengan fungsi dan peranan kita masing-masing. Berikut ini partisipasi pelajar untuk mewujudkan prestasi dalam berbagai kegiatan.

1. Di Lingkungan Masyarakat

Kita ketahui bersama bahwa pelajar memiliki peran ganda yaitu sebagai pelajar juga sebagai anggota masyarakat. Untuk meraih suatu prestasi terdapat beberapa peluang, misalnya dalam berbagai perlombaan senam, bela diri, bola basket, bola volly, sepak bola, catur, pentas seni, memasak, tata busana dan lain sebagainya. Melalui kegiatan tersebut seorang siswa dapat mengukur sejauhmana kemampuan mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki. Dengan demikian, melalui kegiatan tersebut kita bisa meraih prestasi, atau belajar dari keberhasilan orang lain.

Orang yang sukses tidak selalu berpendidikan tinggi, namun dengan kemauan dan kerja keras serta meningkatkan potensi diri secara maksimal seseorang bisa menjadi sukses. Oleh sebab itu, tidak perlu kecil hati bagi siswa yang tidak beruntung mengenyam pendidikan tinggi. Kita bisa mengembangkan potensi yang kita dimiliki untuk meraih prestasi.

Kita harus mau belajar dari keberhasilan orang lain baik di masyarakat maupun di sekolah. Contohnya ada seseorang menjadi sukses hanya dari mendaur ulang sampah, ada seseorang yang menjadi sarjana dari jasa sebagai penarik becak. Pembelajaran lain dari masyarakat banyak orang sukses karena prestasi pada bidang olahraga. Kasus lain, melalui prestasi pada bidang seni baik seni rupa, lukis, teater, drama suara, musik dan gamelan. Bahkan dari kecerdasan bahasa seseorang bisa keliling dunia, karena masyarakat luas



7WODGT: Tempo, 9 - 15 Agustus 2004

+CODCT#htej# Taufik Hidayat merupakan contoh anak berprestasi pada bidang olahraga.

mebutuhkannya. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda harus senang mencoba dan selalu ingin mengetahui serta mengembangkan bakat yang kita miliki sehingga menjadi orang yang sukses.

Kebiasaan malu untuk tampil dalam berbagai kegiatan baik tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun sekolah karena takut gagal, harus kita buang jauh-jauh. Jadikan kegiatan atau kesempatan tersebut sebagai peluang untuk meraih prestasi. Harapan kita semua adalah mendambakan untuk menjadi orang atau bangsa yang berprestasi, bahkan unggul dari orang atau bangsa lain. Kita jangan takut atau malu untuk mencoba dan mengembangkan

potensi diri yang kita miliki. Kita harus terbiasa untuk menampilkan potensi diri dalam berbagai kegiatan baik di lingkungan masyarakat, sekolah maupun tingkat yang lebih luas.

Sebagai pribadi maupun anggota masyarakat kita harus mau dan mampu mengenali diri kita, mengendalikan diri, memiliki ketahanan diri serta menyesuaikan diri sebagai anggota masyarakat di manapun kita berada. Kita harus selalu mengembangkan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu berdoa, minta didoakan oleh orang tua, saudara, teman-teman kita agar mampu meraih suatu prestasi. Sebaliknya kita harus mau dan mampu untuk menjauhkan dari sikap dan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, apalagi merugikan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, kita sudah mampu memadukan antara kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, untuk menjadi orang yang berprestasi dan sukses dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Di Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta bakat yang dimiliki siswa. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan lanjutan setelah pendidikan keluarga. Di samping itu, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal atau resmi yang dirancang, dipersiapkan baik kurikulum, sarana



7W0D3T: Tempo, 26 Oktober 2006

dan prasarana serta tenaga pendidik yang sedemikian rupa, sehingga mampu mengembangkan kedewasaan anak dalam berpikir, sikap maupun bertindak.

Di lingkungan sekolah ini siswa memiliki peluang untuk meraih prestasi melalui berbagai kegiatan. Berikut kegiatan yang dilakukan di sekolah.

+CODCT#htek# Di sekolah siswa memiliki peluang untuk meraih prestasi melalui berbagai kegiatan.

a. Seleksi Siswa Berprestasi

Pada jenjang pendidikan tertentu dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA/K, dari tingkat kabupaten/kota, provinsi bahkan nasional atau internasional, setiap tahun selalu diadakan lomba siswa yang berprestasi. Kegiatan ini berupa olimpiade mata pelajaran matematika, fisika, kimia, maupun teknologi informatika dan komunikasi. Peluang ini harus dijadikan ajang untuk mengukur prestasi, belajar berkompetisi dengan siswa dari sekolah sendiri maupun sekolah lain.

Pelajaran yang penting untuk kita resapi bersama adalah menolak peluang yang ada, berarti sudah menghilangkan kesempatan atau waktu untuk berprestasi. Untuk menghadapi peluang tersebut kita harus mempersiapkan diri dengan mengembangkan bakat yang dimiliki, baik kecerdasan intelektual, emosional dan spritual/keagamaan. Misalnya dengan mengembangkan potensi pada mata pelajaran Matematika, IPA, Biologi, Kimia, Bahasa Inggris, komputer, dan pada bidang seni maupun olahraga.

b. Pekan Olahraga dan Apresiasi Seni

Pada setiap akhir semester terdapat jeda waktu antara setelah ujian semesteran sampai dengan pembagian laporan pendidikan. Pengurus OSIS yang penuh kreatif dan inisiatif, sudah membuat program kegiatan dengan bimbingan Guru Pembina OSIS atau Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Program tersebut diisi dengan Pekan Olahraga dan Pekan Apresiasi Seni, atau disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kesempatan ini merupakan peluang baik bagi seluruh siswa untuk memperkenalkan diri dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki sehingga meraih prestasi.

Melalui kegiatan tersebut akan muncul bakat-bakat siswa di bidang olahraga, misalnya: sepak bola, bola voly, bola basket, atletik, senam maupun bidang seni baik lukis, tari, musik, suara, film, dan atau pada bidang keagamaan. Kegiatan ini merupakan media atau sarana untuk mengembangkan diri sehingga merupakan modal awal untuk meraih sukses di masa depan. Pada saat ini, siswa SMP yang memiliki prestasi pada bidang tertentu baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, apalagi pada tingkat nasional disertai dengan surat keterangan dari yang berwenang mempunyai kesempatan masuk pada sekolah tingkat lanjut tertentu melalui jalur prestasi. Dengan cara ini, akan mendapatkan kemudahan atau peluang untuk dapat masuk sebagai siswa di sekolah tersebut.

c. Kegiatan Pengembangan Diri Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler

Program kegiatan pengembangan diri/kegiatan ekstrakurikuler di setiap sekolah sangat beragam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi atau fasilitas yang dimiliki masing-masing sekolah. Berangkat dengan keragaman tersebut serta sejalan dengan keragaman potensi maupun bakat yang dimiliki setiap siswa, maka minat dan bakat atau keterampilan siswa harus menjadi perhatian pihak sekolah. Dengan demikian, bakat dan keterampilan serta kecerdasan yang dimiliki siswa dapat dibina dan dikembangkan secara optimal. Melalui kegiatan ini siswa dapat menyalurkan bakat atau keterampilan yang dimiliki, baik melalui kegiatan PMR, Pramuka, Paskibra, Seni maupun Keagamaan. Kegiatan yang dilakukan dengan senang akan mempermudah tercapainya suatu tujuan.

d. Kelompok Ilmiah Remaja

Sekolah yang mendambakan keunggulan baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional selalu membangun kelompok-kelompok ilmiah remaja, yang meliputi bidang matematika, IPA, bahasa dan komputer. Melalui kegiatan ini siswa sudah bercita-cita akan melanjutkan sekolah dan program studi tertentu. Bahkan mereka sudah memilih profesi yang diminati ke depan. Keikutsertaan siswa dalam kegiatan tersebut merupakan arena untuk dapat mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki sehingga menjadi orang yang berprestasi di kemudian hari. Dalam era teknologi dewasa ini, kompetensi bidang Matematis, Fisika, Kimia, Biologi, dan bahasa Inggris sangat penting, sehingga kegiatan sekolah tersebut harus kita sikapi secara positif.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi bangsa yang unggul, peran serta dari seluruh warga negara baik dari ting-



7WODGT: 50 Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia

+CODCT#hteL#Adanya kelompok Ilmiah Remaja dapat menggali dan mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki siswa

tersebut dapat kita bina dan kembangkan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas sehingga dapat mengukir prestasi. Bisa dibayangkan jika setiap siswa atau warga negara Indonesia mempunyai prestasi/keunggulan dalam salah satu bidang, atau bahkan banyak bidang. Tentunya hal ini akan memberi kita keyakinan akan menjadi bangsa yang unggul. Dengan keunggulan tersebut, tingkat kesejahteraan kita sebagai bangsa Indonesia akan dapat dirasakan sebagaimana yang diharapkan.

kat masyarakat kecil sampai pejabat tinggi sangat penting. Sebagai warga negara yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa, maka untuk mengatasi berbagai masalah bangsa kita harus cerdas. Baik itu cerdas dari segi intelektual, emosional maupun spiritual/keagamaan. Dengan kecerdasan tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa kita. Peran serta kita sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah menjadikan diri kita mengetahui tentang bakat dan keterampilan atau potensi yang kita miliki. Dengan identifikasi diri

KEGIATAN 4.3

Coba kalian merenung sejenak tentang diri kalian masing-masing! Setelah itu, tuliskan potensi atau bakat yang Anda miliki pada kertas kerjamu!

Dengan potensi yang telah Anda miliki tersebut, sudahkah dikembangkan secara baik. Jika sudah, kegiatan apa yang telah kalian lakukan, jika belum mengapa demikian/alasannya?

Sampai dengan kelas IX sekarang ini, tuliskan kegiatan/pertandingan/lomba yang pernah kalian ikuti dari tingkat RT, RW, Desa, Sekolah, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Nasional bahkan mungkin sudah sampai pada tataran internasional. Bagaimana hasil yang telah kalian raih, dan bagaimana menyikapi keberhasilan tersebut? Setelah itu, bacakan di depan kelas untuk saling memberi dan menerima pengalaman dari masing-masing! Siswa yang lain untuk memperbaiki kekurangan yang dapat disempurnakan pada kesempatan yang lain.

Melalui kegiatan tersebut mudah-mudahan kita mau dan mampu belajar dari keberhasilan orang lain, serta berbagi pengalaman keberhasilan kita semua untuk keberhasilan orang lain. Kita harus sepakat dengan batin kita bahwa keunggulan bangsa dapat terwujud melalui kesuksesan kita semua. Perlu dicatat oleh kita semua bahwa orang yang sukses selalu melalui perjuangan yang keras, disiplin waktu, kreatif, selalu memunculkan ide-ide baru/inovatif, pandai menyesuaikan diri, dan selalu menyenangkan dengan profesi yang sedang ditekuni.

Kata Kunci

1. Potensi diri
2. Bakat
3. Prestasi diri
4. Kecerdasan intelektual (IQ)
5. Kecerdasan emosional (EQ)
6. Kecerdasan spiritual (SQ)
7. Kecerdasan logis-matematis
8. Kecerdasan linguistik/bahasa
9. Kecerdasan interpersonal
10. Kecerdasan intrapersonal
11. Kecerdasan visual/spasial
12. Kecerdasan musikal
13. Kecerdasan *bodily kinesthetic*
14. Kecerdasan natural

RANGKUMAN

1. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Alloh SWT adalah sama dibekali dengan berbagai kecerdasan baik intelektual, emosional, dan spiritual.
2. Manusia dilahirkan, dibesarkan dan dididik pada lingkungan yang berbeda, sehingga berpengaruh pada perkembangan kecerdasan seorang anak.
3. Kondisi bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami keterpurukan di berbagai bidang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kerja keras dari berbagai pihak untuk mengatasinya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Pemecahan masalah bangsa tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah/pemimpin bangsa saja, namun perlu kerja sama dari berbagai pihak dari pemerintah sampai pada kita sebagai warga negara.
5. Keunggulan suatu bangsa menjadi tanggung jawab kita semua, bukan oleh pemerintah saja. Hal yang perlu diingat, adalah *Alloh tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu bangsa, jika yang bersangkutan atau bangsa tersebut tidak mau mengubahnya.*

6. Modal penting agar kita dapat meraih prestasi adalah adanya kemauan untuk berusaha dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa.
7. Kesuksesan sekecil apapun harus kita sikapi dengan senang hati, dan perlu dicatat bahwa orang yang sukses/berprestasi tidak selalu berprestasi pada bidang tertentu saja.
8. Orang yang sukses/berprestasi tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja, tetapi perlu didukung oleh faktor lainnya, salah satunya harus memiliki kecerdasan spritual/keagamaan.
9. Seorang yang berprestasi memiliki kecenderungan untuk selalu berperan serta dalam berbagai kegiatan yang ada di lingkungannya, baik dalam lingkungan masyarakat, sekolah dan dimana mereka berada.
10. Keikutsertaan seseorang dalam berbagai kegiatan dapat dijadikan sebagai arena untuk mengukur sejauhmana kemampuan mengembangkan potensi yang dimiliki, serta berkompetisi untuk dapat menentukan juara.
11. Kita sepakat bahwa bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju dan unggul dengan bangsa lain. Oleh karena itu, harapan tersebut harus mulai ditanamkan dari tingkat keluarga, masyarakat, sekolah, maupun aparat pemerintah sendiri.

Soal-Soal Latihan

A. Tuliskan salah satu jawaban yang paling benar pada buku tulismu!

1. Tujuan negara Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat ialah . . .
 - a. mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa
 - d. mengembangkan ilmu pengetahuan
2. Masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah. . .
 - a. korupsi
 - b. kolusi
 - c. nepotisme
 - d. pengangguran
3. Kelemahan bangsa Indonesia dalam mengejar ketinggalan dengan bangsa lain adalah lebih disebabkan oleh masalah . . .
 - a. sumber daya manusia
 - b. sumber daya alam
 - c. kesuburan tanah Indonesia
 - d. padatnya jumlah penduduk di Indonesia

4. Contoh negara kecil dibanding dengan negara Indonesia, namun menjadi negara maju adalah
 - a. Jepang
 - b. Amerika Serikat
 - c. Inggris
 - d. Perancis
5. Pernyataan di bawah ini yang *tidak* termasuk manusia yang berkualitas ialah
 - a. cerdas
 - b. sehat jasmani dan rohani
 - c. berbudi pekerti yang luhur
 - d. memiliki gaya seperti orang asing
6. Slogan yang mengatakan "*biar lambat asal selamat*", dalam era dewasa ini harus kita ubah menjadi
 - a. target waktu merupakan idola pertama
 - b. utamakan keselamatan dalam bekerja
 - c. dengan cepat, tepat dan selamat
 - d. biar lambat kualitas jitu
7. Suatu anggapan bahwa orang yang pintar/memiliki kecerdasan intelektual selalu berhasil dalam hidupnya. Sikap kami terhadap pernyataan tersebut ialah
 - a. sangat tidak setuju
 - b. sangat setuju
 - c. kurang setuju
 - d. setuju
8. Profesi seorang Direktur lebih tepat dipegang oleh orang yang memiliki kecerdasan
 - a. natural
 - b. matematika
 - c. interpersonal
 - d. intrapersonal
9. Kemampuan yang melekat pada diri seseorang berkaitan dengan struktur otak ialah
 - a. daya positif manusia
 - b. prestasi diri
 - c. potensi diri
 - d. bakat
10. Seseorang yang memiliki daya ingat tinggi, berpikir logis, memiliki keterampilan mekanis dan lain sebagainya merupakan ciri . . . seseorang.
 - a. potensi diri
 - b. prestasi diri
 - c. kemampuan
 - d. bakat
11. Hal yang negatif perlu diperbaiki bagi seseorang yang berbakat ialah sikap untuk
 - a. cepat bosan dengan sesuatu yang berulang-ulang
 - b. suka mengkritisi kebijakan pemerintah yang keliru
 - c. selalu mematuhi peraturan hukum yang berlaku
 - d. tampak beda dengan orang lain sesuai dengan kebolehnya

12. Salah satu ciri seseorang yang memiliki kecerdasan matematika ialah senang melakukan
- percobaan
 - memerintah
 - menyusun kata-kata
 - mempertahankan pendapat
13. Keterampilan kerja bagi seorang siswa yang memiliki kecerdasan *bodily kinesthetic* ialah
- melakukan penelitian
 - menyetel piano
 - menari
 - teknisi
14. Menurut kamus besar bahasa Indonesia istilah potensi diri ialah
- kualitas yang dimiliki seseorang
 - sesuatu yang melekat pada dirinya
 - kekuatan
 - kelemahan
15. Profesi sebagai pengacara lebih tepat dipegang oleh orang yang memiliki kecerdasan
- bahasa
 - interpersonal
 - intrapersonal
 - bodily kinesthetic*
16. Pernyataan di bawah ini yang *tidak* termasuk kecerdasan emosional ialah
- mengelola emosi
 - menahan emosi
 - menyesuaikan diri
 - menganalisis masalah
17. Kemampuan kita untuk dapat menyesuaikan dengan perasaan, pikiran bahkan tindakan dengan keadaan yang berubah-ubah merupakan sikap
- supel
 - fleksibel
 - realistis
 - maju
18. Kemampuan untuk mempertahankan sikap positif yang realistis, terutama dalam mengatasi masa-masa sulit ialah sikap
- idealis
 - optimis
 - pesimis
 - reformis
19. Kemampuan untuk menunda atau menahan keinginan bertindak merupakan pengendalian
- inpuls
 - sosial
 - pribadi
 - kerja
20. Bentuk partisipasi kita dalam rangka mengembangkan kecerdasan *bodily kinesthetic* dapat kita lakukan melalui kegiatan lomba
- membaca puisi
 - olahraga
 - olimpiade
 - cerdas cermat

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar pada buku tulismu!

1. Jelaskan perbedaan antara potensi diri, bakat dan prestasi!
2. Berikan lima contoh yang menunjukkan bangsa Indonesia masih tertinggal dengan bangsa lain!
3. Bagaimana sikap kalian terhadap berbagai kegiatan baik di tingkat RT, RW maupun di sekolah dan berilah alasannya?
4. Jelaskan faktor yang menghambat untuk meraih prestasi!
5. Tuliskan ciri-ciri orang yang memiliki prestasi tinggi!
6. Identifikasikan faktor yang menghambat kegagalan bangsa Indonesia dalam mewujudkan menjadi bangsa yang unggul dari bangsa lain!
7. Jelaskan dampak ketidakmampuan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul dalam era dewasa ini!
8. Identifikasikan ciri-ciri manusia yang berkualitas!
9. Bagaimana upaya kalian untuk meraih prestasi/sukses sesuai dengan harapan kita semua?
10. Bagaimana sikap kalian terhadap kegagalan dan keberhasilan yang telah kalian alami?
11. Jelaskan dampak bagi seorang yang tidak melihat realita yang ada!
12. Jelaskan alasan mengapa kita harus optimis bukan pesimis!
13. Bagaimana cara kita agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang positif?
14. Uraikan alasan seseorang bisa terbawa arus negatif dalam pergaulannya!
15. Identifikasikan upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosional!

C. Diskusikanlah

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ditulis pada buku tulismu!

1. Setujukah kalian bahwa Bangsa Indonesia saat ini mengalami ketertinggalan dengan bangsa lain terutama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara? Jelaskan alasan-alasanmu!
2. Dapatkah kalian tunjukkan/sebutkan kelebihan bangsa Indonesia dengan bangsa lain?
3. Jelaskan menurut pendapatmu, faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan prestasi bangsa Indonesia?

D. Tes Unjuk Kerja

Tulislah pada buku tulismu laporan kegiatan berdasarkan pengalamanmu tentang prestasi diri dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat. Bila perlu lengkapi dengan bukti fisik, misalnya foto-foto kegiatan piagam penghargaan, sertifikat dan sebagainya

? Soal-Soal Akhir Semester Genap

A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

1. Suatu organisasi sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan disebut
 - a. negara
 - b. bangsa
 - c. masyarakat
 - d. warga negara

2. Perhatikan pernyataan dalam bagan berikut ini!

1	2	3	4
Gotong royong	Keadilan	Cinta tanah air	Chauvinisme
Kekeluargaan	Solidaritas	Rela berkorban	Patriotisme
Musyawaharah dan mufakat	Kerja sama	Nasionalisme	Individualisme
Persamaan hak	Kepentingan sama	Kemampuan bela negara	Nasionalisme
Keadilan	Kesetiaan	Yakin terhadap kesaktian Pancasila	Rela berkorban

Bagan yang menunjukkan asas wawasan nusantara ditunjukkan oleh bagan dengan nomor

- a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
3. Tujuan negara Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 4. Batas wilayah laut yang ditetapkan sejauh 24 mil dari pantai, dimana negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak yang melanggar ketertiban negara. Batas wilayah laut ini disebut
 - a. Batas Teritorial
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif
 - c. Zona Bersebelahan
 - d. Batas Ekstratoritorial
 5. Batas wilayah negara yang berupa pagar kawat, tembok, dan tiang pancang disebut batas
 - a. buatan
 - b. alam
 - c. geofisika
 - d. geostrategis

6. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Perkembangan ilmu komunikasi dan transportasi.
 - 2) Penduduk menjadi modal dasar pembangunan.
 - 3) Indonesia memiliki posisi strategis dalam tata hubungan internasional.
 - 4) Indonesia diapit oleh dua samudera.
 - 5) Indonesia terletak diantara dua benua.
- Pernyataan yang menunjukkan kedudukan geografis dan geogstrategis Indonesia adalah
- a. 1, 2, dan 3
 - b. 3, 4, dan 5
 - c. 2, 3, dan 4
 - d. 1, 2, dan 5
7. *"Setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara"*. Hal ini sejalan dengan isi UUD 1945 pasal
- a. 27 ayat (1)
 - b. 27 ayat (2)
 - c. 27 ayat (3)
 - d. 28
8. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara. Pernyataan ini merupakan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan
- a. idiologi politik
 - b. ekonomi
 - c. sosial budaya
 - d. pertahanan dan keamanan
9. Contoh bentuk partisipasi bela negara dalam kehidupan bernegara adalah
- a. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum
 - b. terlibat dalam program wajib militer
 - c. terlibat sebagai rakyat terlatih
 - d. turut serta dalam mobilisasi umum
10. Unsur terpenting suatu negara adalah
- a. wilayah
 - b. rakyat
 - c. konstitusi
 - d. pemerintah
11. Mereka yang berada dalam suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara, namun ia tunduk dan patuh pada pemerintah dimana ia berada disebut
- a. warga negara
 - b. penduduk
 - c. bukan warga negara
 - d. rakyat
12. Pemerintah memiliki kekuasaan dalam melaksanakan kebijakan negara. Hal ini merupakan pengertian pemerintah dalam arti
- a. luas
 - b. sempit
 - c. utuh
 - d. absolut

13. Rakyat terlatih dalam upaya pertahanan keamanan nasional. Hal ini merupakan komponen
- khusus
 - penunjang
 - utama
 - dasar
14. Keikutsertaan kalian sebagai pelajar dalam upaya bela negara ditunjukkan dengan
- menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya
 - mengikuti wajib militer
 - mengikuti perlawanan rakyat
 - turut serta menjaga ketertiban masyarakat
15. Contoh bentuk ancaman yang datangnya dari dalam negeri adalah
- agresi militer
 - pemberontakan
 - penjajahan
 - modernisasi
16. Menurut UUD 1945 pasal 18 ayat (5), untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, maka Pemerintah Daerah berhak menetapkan
- Peraturan Daerah
 - Instruksi Gubernur
 - Keputusan Kepala Daerah Tingkat I
 - Keputusan Kepala Daerah Tingkat II
17. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi nyata maksudnya ialah
- keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama serta kewenangan lainnya yang ditetapkan peraturan pemerintah
 - keleluasaan daerah untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang secara nyata telah ada berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai dengan potensi serta kekhasan daerah
 - wujud pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi
 - keleluasaan daerah yang memiliki kewenangan yang utuh dalam penyelenggaraannya mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
18. Kebijakan politik luar negeri, dapat dikategorikan kedalam bentuk kebijakan publik
- substansif
 - distributif
 - simbolik
 - konservatif

19. Berikut ini contoh pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan masyarakat yaitu
- siswa melaksanakan program sekolah
 - anggota keluarga melaksanakan hasil keputusan musyawarah keluarga
 - masyarakat RT/RW melaksanakan program pemerintahan desa
 - media masa menampung suara pembaca atau dialog interaktif
20. “Kebijakan publik mengenai langsung atau tidak langsung semua anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu”. Ini merupakan pernyataan dari
- Thomas R. Sye
 - James E. Anderson
 - A. Hoogerwerf
 - Dror
21. Berikut ini *bukan* merupakan faktor yang memperbaiki kualitas kebijakan publik, yaitu
- peka terhadap kebutuhan masyarakat
 - pembentuk kebijakan publik didukung oleh penyempurnaan sistem informasi yang berguna
 - lembaga pengesah kebijakan publik yang bertindak otoriter terhadap kebebasan masyarakat
 - kebijakan jangka panjang guna menghindari krisis yang terkait dengan perkembangan dunia
22. Berikut ini *bukan* salah satu proses perumusan kebijakan publik yang dilakukan para pembuat kebijakan publik ialah
- mencari dan menentukan identitas permasalahan secara benar
 - mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan kebijakan
 - melakukan gerakan-gerakan proses dan kekerasan
 - mengajukan usulan kebijakan untuk memperoleh pengesahan dari lembaga legislatif
23. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut
- otonomi
 - daerah otonomi
 - otonomi daerah
 - desentralisasi
24. Tugas pembantuan ialah penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu dari
- pemerintah desa kepada pemerintah daerah

- b. pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa
 - c. pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi
 - d. pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten
25. Meningkatkan peran serta masyarakat, merupakan salah satu dari
- a. pengertian otonomi daerah
 - b. masalah otonomi daerah
 - c. prinsip otonomi daerah
 - d. tujuan pembentukan otonomi daerah
26. Kebijakan-kebijakan substantif, distributif, material, barang-barang kolektif dan liberal, merupakan beberapa kategori kebijakan publik yang dikemukakan oleh
- a. Dror
 - b. A. Hoogerwerf
 - c. James E. Anderson
 - d. Thomas R. Dye
27. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
- 1) Proses pengambilan keputusan.
 - 2) Memperbaiki kualitas kebijakan publik.
 - 3) Memahami proses pembuatan kebijakan publik.
 - 4) Menemukan dan merumuskan secara benar permasalahan kebijakan.
 - 5) Menyampaikan permasalahan kebijakan publik kepada pembuat kebijakan.
- Pernyataan-pernyataan di atas merupakan suatu langkah-langkah dari
- a. proses perumusan kebijakan publik
 - b. bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah
 - c. prinsip kebijakan publik dan otonomi daerah
 - d. pertimbangan-pertimbangan para pembuat kebijakan
28. Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan pilihan. Yang termasuk urusan pilihan misalnya
- a. pendidikan dasar
 - b. potensi unggulan dan kekhasan daerah
 - c. kesehatan
 - d. prasarana lingkungan dasar
29. Kebijakan untuk mengoreksi kelemahan dalam peraturan-peraturan sosial, merupakan salah satu contoh kebijakan
- a. liberal
 - b. konservatif
 - c. simbolik
 - d. material

30. Untuk mencapai kualitas kebijakan publik perlu didukung oleh partisipasi masyarakat dalam perumusan dan proses pembentukan kebijakan publik. Bila masyarakat tidak berperan dalam kebijakan publik, maka akibatnya
- masyarakat harus menerima sebagian keputusan, meskipun kurang memenuhi kepentingan publik atau tidak berkualitas
 - masyarakat itu termasuk kelompok yang acuh tak acuh
 - kebijakan publik harus diganti dengan kebijakan individu
 - setiap kebijakan itu akan memenuhi aspirasi publik
31. Dalam era globalisasi dewasa ini tidak terdapat hubungan timbal balik antara negara produsen dan konsumen karena adanya sikap saling
- menghormati
 - ketergantungan
 - berlomba untuk maju
 - berkompetisi terhadap produk
32. Sikap positif yang harus kita kembangkan untuk memanfaatkan era globalisasi adalah melalui peningkatan
- penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - penguasaan bahasa daerah
 - kesejahteraan
 - sumber dana
33. Makna aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah untuk
- meningkatkan persahabatan dengan bangsa lain
 - memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian abadi
 - mewujudkan tujuan pembangunan nasional
 - meningkatkan kesetiakawanan sosial dengan bangsa lain
34. Contoh sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi pada bidang budaya adalah
- meniru mode pakaian yang sedang *"ngetrend"*
 - menolak semua unsur kebudayaan asing
 - meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - meningkatkan bantuan terhadap korban bencana alam
35. Peluang bangsa Indonesia dalam memanfaatkan era globalisasi adalah
- promosi produk dalam negeri
 - peningkatan kesejahteraan rakyat
 - peningkatan impor bahan baku
 - peningkatan mutu tenaga kerja Indonesia

36. Contoh kerja sama bilateral pada bidang sosial adalah
- pemberantasan penyelundupan narkoba
 - peningkatan kegiatan penelitian
 - peningkatan kerja sama penyelenggaraan olympiade
 - pertukaran kegiatan magang
37. Dampak positif era globalisasi dalam bidang politik adalah
- tidak adanya masalah korupsi
 - makin banyaknya partai politik
 - meningkatnya kesadaran berpolitik warga negara
 - meningkatnya kegiatan pemilihan umum di Indonesia
38. Dampak negatif globalisasi ada bidang budaya ialah
- kemerosotan moral
 - meningkatnya keberanian
 - meningkatnya ketergantungan
 - meningkatnya budaya meniru
39. Tayangan TV yang memiliki dampak positif bagi generasi muda adalah yang mengandung
- pendidikan
 - kesenian
 - perjuangan
 - kesetiaan
40. Senang melakukan percobaan pada bidang ilmu pengetahuan alam merupakan dampak globalisasi pada bidang
- | | |
|------------|-----------|
| a. politik | c. sosial |
| b. ekonomi | d. budaya |
41. Nasionalisme Indonesia merupakan paham kebangsaan yang menjadi alat penyaring pengaruh globalisasi, namun tidak mengarah pada *chauvinisme*, maksudnya adalah suatu paham yang menganggap bangsa lain
- | | |
|---------------|-----------------|
| a. lebih maju | c. beragam |
| b. sejajar | d. lebih rendah |
42. Dampak positif pada kehidupan agama dengan adanya era globalisasi adalah ditandai dengan
- meningkatnya media siar agama
 - meningkatnya jumlah penganut agama
 - meningkatnya jumlah agama yang ada
 - berkembangnya kegiatan diskusi tentang agama

43. Kecintaan kita terhadap tanah air dapat kita wujudkan melalui
- penolakan produk dari luar
 - peningkatan kualitas produksi dalam negeri
 - tidak mau menggunakan produk dalam negeri
 - kebiasaan merendahkan produksi dalam negeri
44. Dampak positif globalisasi pada bidang sosial adalah
- menurunnya masalah-masalah sosial
 - meningkatnya kesetiakawanan sosial
 - menurunnya penyalahgunaan narkoba
 - meningkatnya kritik-kritik sosial
45. Peran serta kita sebagai generasi muda untuk memberikan sesuatu kepada negara dalam mengatasi masalah krisis moral, adalah melalui peningkatan
- prestasi
 - kesetiakawanan sosial
 - pengembangan bakat
 - keimanan dan ketakwaan
46. Bangsa Indonesia dewasa ini sedang berupaya meningkatkan prestasi dalam berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan semangat Pembukaan UUD 1945 alenia keempat tujuan negara Indonesia yang antara lain
- mewujudkan masyarakat adil dan makmur
 - mewujudkan masyarakat yang lebih maju
 - mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia
 - mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa lain
47. Pernyataan berikut ini yang *tidak* termasuk ciri manusia yang berkualitas adalah
- cerdas
 - kreatif
 - sehat jasmani dan rohani
 - selalu terpenuhi kehidupannya
48. Jika seseorang memiliki kemahiran dalam bidang olahraga, maka yang bersangkutan memiliki kecerdasan
- matematika
 - kinestetika
 - musikal
 - interpersonal
49. Dampak bagi suatu bangsa yang tidak mampu meningkatkan prestasinya adalah menjadi bangsa yang
- terjajah
 - tertindas
 - terbelakang
 - terdepan

50. Kunci untuk menjadi bangsa yang unggul adalah adanya peningkatan
- | | |
|------------------------|---------------------------|
| a. sumber daya alam | c. sumber daya manusia |
| b. sumber daya mineral | d. sumber keuangan negara |
51. Seseorang yang senang bekerja sendirian dan menciptakan karya yang unik dan orisinal sangat berkaitan dengan kecerdasan
- | | |
|------------|------------------|
| a. natural | c. kinestetika |
| b. visual | d. intrapersonal |
52. Jika kalian bercita-cita ingin menjadi seorang desainer, maka kecerdasan yang harus kita kembangkan adalah
- | | |
|--------------|----------------|
| a. matematis | c. kinestetika |
| b. spasial | d. linguistik |
53. Kemampuan memahami perasaan dan pikiran orang lain mencerminkan kecerdasan emosional, istilah lain adalah
- | | |
|------------|----------|
| a. simpati | c. luwes |
| b. empati | d. supel |
54. Contoh kecerdasan spiritual bagi seseorang individu nampak dalam sikap dan perbuatan yang selalu didasarkan kepada
- | |
|----------------------------------|
| a. keimanan dan ketakwaan |
| b. kesabaran menghadapi masalah |
| c. kepedulian pada orang lain |
| d. kesederhanaan dalam bertindak |
55. Prestasi bangsa Indonesia yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah krisis sosial budaya adalah melalui
- | |
|--------------------------------------|
| a. peningkatan pendapatan negara |
| b. pemberdayaan potensi daerah |
| c. peningkatan mutu pendidikan |
| d. pemberdayaan sumber alam yang ada |
56. Bentuk partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah adalah
- | |
|---|
| a. mengikuti pelajaran yang disenangi |
| b. menjadi tutor dalam proses pembelajaran |
| c. mengikuti ujian perbaikan karena belum mencapai ketuntasan |
| d. memarahi teman yang terlambat hadir |
57. Pelajaran yang dapat kita peroleh dari keberhasilan orang lain adalah berdasarkan pada
- | | |
|---------------|-------------------|
| a. pendidikan | c. kedisiplinan |
| b. ketekunan | d. semangat juang |

58. Kendala yang dihadapi generasi muda dalam mewujudkan prestasi ialah
- rendahnya tingkat kecerdasan yang dimiliki
 - kebiasaan malu untuk tampil
 - terbatasnya peluang yang ada untuk berprestasi
 - banyaknya masalah yang dihadapi generasi muda
59. Upaya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang unggul harus dimulai dari lingkungan keluarga, antara lain melalui pendidikan dan
- pelajaran keterampilan
 - pembiasaan kerja walaupun sederhana
 - keseimbangan hak dan kewajiban
 - pelajaran tambahan
60. Prestasi yang dapat kita kembangkan sejalan dengan perkembangan global adalah
- penguasaan bahasa dan iptek
 - penguasaan pasar dunia
 - pengurangan kadar pencemaran
 - pemberantasan masalah korupsi

GLOSARIUM

A

- Agama 5, 7, 22, 24, 25, 40, 43, 61, 92, 93, 96, 111, 112, 115 = ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.
- Agenda pemerintah 55, 56, 59 = catatan permasalahan yang membutuhkan keaktifan dan keseriusan pembuat keputusan (*decision makers*) untuk mempertimbangkannya.
- Agresi 22 = penyerangan suatu negara terhadap negara lain (serangan).
- Aktualisasi diri 108, 114 = kemampuan untuk mewujudkan potensi yang kita miliki dan merasa puas dengan prestasi yang telah kita raih
- Akuntabilitas, 41, 68 = pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih dekat/langsung dengan dampak dari urusan yang ditangani tersebut.

B

- Bakat 46, 94, 101, 103, 106, 107, 108, 110, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126 = kemampuan yang merupakan sesuatu yang melekat dalam diri seseorang yang dibawa manusia sejak lahir dan terkait dengan struktur otak.
- Bangsa 3, 4, 7, 8, 15, 26, 29, 75, 77, 82, 86, 93, 95, 103, 111, 116, 126, 134, 186 = sekelompok manusia yang hidup dengan adanya kehendak bersama yang dilandasi oleh rasa persatuan, dan kesatuan tanah air, bahasa, dan cita-cita.

- Bela negara 1, 3, 4, 19, 20, 24, 25, 26, 30, 32 = sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- Bestuur* 35 = pemerintahan.
- Budaya 79, 90, 93, 95, 100, 106, 181 = hasil cipta karya dan karsa manusia yang memiliki unsur-unsur, misalnya seni, bahasa, adat istiadat, sistem nilai, sistem kepercayaan dan sistem mata pencaharian.

D

- Daerah otonomi 38, 59, 62, 130, 175 = kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dekonsentrasi 36, 43, 57, 58, 59, 68 = pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- Dinas daerah 40, 60 = unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas.
- Disentralisasi 36, 39, 42, 58, 68, 130 = penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E

- Efisiensi 41, 68, 117 = suatu urusan yang penanganannya lebih berdaya guna dilaksanakan oleh strata pemerintahan tertentu, maka strata pemerintahan itulah yang lebih tepat untuk menangani urusan pemerintahan.
- Eksternalitas 41, 68 = pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
- Era otonomi 35 = masa berlangsungnya pemerintahan/perundang-undangan sendiri (masa mengatur rumah tangganya sendiri bagi setiap pemerintah daerah).

G

Globalisasi 73, 75, 76, 77, 78, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 100 = proses dimana kejadian, keputusan dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi konsekuensi bagi individu dan masyarakat di daerah lain.

Grafik 64, 65, 66 = gambar atau diagram yang memberikan kesan visual tentang gagasan-gagasan porto folio.

I

Isu 53. 89 = masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi)

K

Kebijakan 39, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 69, 97 = rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan alternatif 64, 65 = sejumlah kemungkinan cara bertindak untuk mengatasi kebutuhan khusus atau masalah.

Kebijakan barang-barang kolektif dan barang-barang pribadi 49 = kebijakan tentang pelayanan dan penyediaan barang-barang kepentingan orang banyak dan untuk kepentingan perorangan.

Kebijakan barang-barang pribadi (*Private goods policies*) 49 = kebijakan penyediaan barang-barang atau pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas. Misalnya penyediaan tempat hiburan, sarana kesehatan.

Kebijakan distributif (*Distributive policies*) 48 = kebijakan tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk. misalnya *tax holiday* (bebas pajak) bagi perusahaan yang baru berdiri.

Kebijakan liberal dan konservatif 49 = kebijakan yang menganjurkan pemerintah untuk mengadakan perubahan sosial dan melarang adanya perubahan sosial.

Kebijakan material (*Material policies*) 48 = kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para

- penerimanya. Misalnya kebijakan yang mewajibkan majikan untuk membayar upah minimum bagi para pekerjanya.
- Kebijakan pembatasan bagi sekelompok orang
(*Self regulatory policies*) 48 = pembebasan/pengawasan perbuatan pada masalah tertentu bagi sekelompok orang. Misalnya mengemudi kendaraan bermotor.
- Kebijakan prosedural
(*Procedural policies*) 48 = kebijakan tentang pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang.
- Kebijakan publik
(*Public policies*) 48 = suatu cara pemerintah kita yang telah disepakati untuk memenuhi tanggung jawabnya, seperti melindungi hak-hak individu warga negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Kebijakan redistributif
(*Redistributive policies*) 49 = kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memindahkan pengalokasian pendapatan atau hak-hak atas kelompok-kelompok penduduk. Misalnya kebijaksanaan untuk pemberian dana sosial.
- Kebijakan regulator
(*Regulatory policies*) 48 = pelarangan/pembatasan perbuatan bagi seseorang. Misalnya larangan penggunaan senjata api tanpa surat-surat resmi.
- Kebijakan simbolik 49 = kebijakan yang tidak bersifat memaksa karena hanya memiliki dampak yang relatif kecil bagi masyarakat.
- Kecerdasan bodily kenestetika 111,112 = kemampuan untuk melakukan gerak atau sentuhan.
- Kecerdasan emosional 111, 112, 113, 125, 126 = kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, serta mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual.
- Kecerdasan intelektual 107, 113 = ukuran kemampuan intelektual, analisis, logika dan rasio seseorang.

- Kecerdasan interpersonal 112, 122 = kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, mendelegasikan dan membimbing orang lain.
108
- Kecerdasan intrapersonal 108, 112 = kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi tentang dirinya, serta mampu memutuskan dan bekerja sendiri.
- Kecerdasan linguistik /bahasa 108, 109, 117 = kemampuan berbicara, membaca dan menulis.
- Kecerdasan matematika /logika 108, 109 = kemampuan berpikir logis dan matematis, melakukan eksperimen atau percobaan serta membuat teori.
- Kecerdasan natural 113, 122 = kemampuan untuk melakukan observasi lingkungan alam.
- Kecerdasan visual /spasial 108 = kemampuan menggunakan visual atau alat.
- Kemandirian 7, 12, 21, 38, 81, 113 = kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri serta mandiri atau tidak lagi tergantung pada orang lain.
- Ketahanan ekonomi 21 = kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila
- Kesadaran diri 113 = kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa kita merasakan seperti itu dan dampak perilaku kita terhadap orang lain.
- Ketahanan ideologi 21 = kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional.
- Ketahanan nasional 14, 15, 16, 21, 27, 31, 70 = adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional, menghalau dan menindaklanjuti secara efektif segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang ada, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat fisik maupun non-fisik.
- Ketahanan politik 21 = kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- Ketahanan pertahanan keamanan 22 = kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat.
- Koordinasi 84 = perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

L

- Landas benua 10 = wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut.
- Lembaga eksekutif 185, 189, 196, 197 = lembaga yang membuat dan melaksanakan undang-undang.
- Lembaga legislatif 185, 186, 196, 197 = lembaga membuat undang-undang.
- Lembaga pemerintah 47 = bagian pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan peraturan hukum dan kebijakan publik.
- Lembaga yudikatif 185, 191, 196, 197 = lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu.

N

- Nasionalisme 5, 15, 16 = paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.
17, 20, 21, 26, 30, 92
93, 95, 71, 96, 98
- Nilai 93, 95, 99, 111, 112 = sesuatu yang dianggap sangat penting seperti kebebasan, keadilan atau loyalitas. Nilai memberikan standar untuk menilai perilaku. Misalnya kejujuran merupakan nilai yang digunakan untuk menilai perilaku seseorang.

O

- Optimisme 115 = kemampuan untuk mempertahankan sikap positif yang realistis, terutama dalam mengatasi masa-masa sulit.
- Otonomi daerah 33, 35, = hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
36, 39, 43, 44, 57, untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
58, 66, 84

- Otokrasi 88 = pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri sendiri (kediktatoran)
- Otoriter 53, 55 = bertindak sewenang-wenang; berkuasa sendiri

P

- Partisipasi masyarakat = ikut sertanya masyarakat dalam pemerintahan.
47
- Patriotisme 16, 20, 30, 26, 127 = sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya; semangat cinta tanah air.
- Pemerintah daerah 37, 38 = satuan kekuasaan politik di daerah yang melayani kebutuhan warga masyarakat di daerah.
- Pemerintahan 35, 37, 38, 39, 40, 50, 58, 63, 175 = alat kelengkapan pemerintah yang melaksanakan fungsi negara.
- Pemerintahan daerah 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 58, 63, 175 = penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
- Penduduk 6, 7, 14, 26, 29, 36, 40, 48, 83, 72, 128, 183, 199 = mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara.
- Penghargaan diri 113 = kemampuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita serta dapat menyenangkan diri, walaupun kita memiliki berbagai kelemahan.
- Politik 79, 80, 82, 84, 88, 95, 100 = ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan keinginan kita. Atau ilmu pengetahuan yang mempelajari/memfokuskan pada masalah kekuasaan.
- Politik luar negeri 75, 79, 80, 81, 82, 84 = suatu tindakan dan atau kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam hubungannya dengan bangsa lain.
- Potensi daerah = kemampuan yang dimiliki daerah baik dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
- Potensi diri 103, 106, 117, 118 = kemampuan-kemampuan dan kualitas diri, atau daya yang berupa kekuatan atau berupa kelemahan.
- Prestasi diri 103, 115 = hasil yang telah dicapai oleh seseorang melalui pemberdayaan potensi dan kecerdasan yang dimiliki secara optimal.

R

- Regeling* 35 = perundangan.
Res communis 9, 70 = bahwa lautan itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.
Res nullius 8, 70 = konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

S

- Sekretariat daerah 39 = lembaga yang dipimpin sekretaris daerah yang diangkat oleh gubernur atas persetujuan DPRD.
Selektif 15, 73, 75, 83, 92, 93, 95, 96, 132 = dengan melalui seleksi atau penyaringan (secara dipilih).
Sikap asertif 113 = kemampuan untuk menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan kita, membela diri dan mempertahankan pendapat.

T

- Teritorium 36 = luas teritorial/wilayah.
Traktat 9, 11, 30 = perjanjian antarbangsa (misalnya perjanjian persahabatan, perjanjian perdamaian).

U

- Undang-undang 35, 43, 45, 57, 60, 61, 84 = peraturan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya dan untuk melaksanakan UUD.
Undang-Undang Dasar 179, 184, 186, 200 = peraturan negara yang tertinggi dalam negara, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi sumber daripada peraturan perundangan lainnya.
Unsur deklaratif 6, 12, 26, 29, 71 = bahwa dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional yang bersifat formalitas suatu negara haruslah memperoleh pengakuan dari negara lain.
Unsur konstitutif 6, 26, 27, 32 = bahwa dalam suatu negara haruslah memiliki unsur rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.
Upaya bela negara 3, 24, 26 = kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan.

W

Warga negara 1, 3, 4, 7, = mereka yang berdasarkan hukum tertentu adalah
12, 15, 19, 20, 21, 23, anggota dari suatu negara atau mereka yang
24, 25, 26, 27, 28, 29 menurut undang-undang diakui sebagai warga
30, 31, 32, 49, 50, 67, negara atau dapat melalui proses naturalisasi.
70, 88, 89, 98, 103,
120, 121, 122, 127,
128, 133, 192, 193

Z

Zona ekonomi
eksklusif (ZEE) 9, 30, = wilayah laut dari suatu negara pantai yang
71 batasnya 200 mil laut diukur dari pantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul. 1995. *Zona Ekonomi Eksklusif di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. 2004. *Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu SLTP.
- Djajoeki, Djam'an Drs., S.H. 1999. *Sistem Pemerintahan di Daerah Dikembangkan dan Disesuaikan dengan Kurikulum/GBPP 1994*. Bandung: Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung.
- Friedman, Thomas L. 2002. *Memahami Globalisasi*. Bandung: Penerbit ITB.
- Gie, The Liang. 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Joeniarto, R. S.H. 1992. *Perkembangan Pemerintah Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karsono, Dedi. 1999. *Kewiraan: Tinjauan Strategi dalam Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kaelan, M.S. Drs. 1996. *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- _____. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen Disahkan 10 Agustus 2002: Analisis Filosofis dan Yuridis*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaho, Josef Riwu, Drs., MPA. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia--Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C.S.T. Drs., S.H. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lemhanas. 1997. *Buku Induk Pendidikan Kewiraan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kerja sama Lemhanas, Depdikbud, dan Dit. PKBN Persmanvet Dephankam.

- Mallarangeng, Andi Dr. 2003. *Daerah Mesti Diberi Kewenangan Kebijakan Politik (Artikel)*. Bandung: Galamedia.
- Muchsin, H., Prof., DR., S.H. 2004. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta : STIH "IBLAM".
- Poespowardojo, Soerjanto. 1989. *Pendidikan Wawasan Kebangsaan*. Jakarta: Kerja sama Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan dan Penerbit Gramedia.
- Sekretariat Jendral MPR RI. 2002. *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*. Jakarta.
- Sofyan, Herminarto. 2004. *Pedoman Khusus Penelusuran Potensi Siswa, Kurikulum 2004 SMA*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Sumaatmadja, Nursid dkk. 1999. *Perspektif Global*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sunggono, Bambang S.H., M.S. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta.
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedeh. 2005. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

DAFTAR INDEKS

A

A. Hoogerwerf 47, 130, 131
Afganistan 8, 86
Afrika 78
agamis 88, 96
agenda pemerintah 55, 56, 59
Aktualisasi 114
aktualisasi 108
Akuntabilitas 41
akuntabilitas 68
Albrow 75
Anderson 48, 55, 58, 62, 130, 131
Andi Mallarangeng 56
arogansi 89
asas otonomi 36, 38, 40, 58
Asia 78
Australia 78
Amerika 78
aspirasi 7, 36, 39, 45, 46,
52, 53, 55, 56, 57, 59,
130, 132, 175, 194

B

Bakat 106, 107, 122
bakat 134, 46, 94, 101, 103, 106,
107, 108, 110, 117, 118,
119, 120, 121, 124, 126
Bangsa 3, 4, 7, 8, 15, 26,
29, 75, 77, 82, 86, 93,
95, 103, 111, 116, 126,
134, 186
Batam 85
Bela Negara 1, 3, 4, 19, 20, 24,
25, 30, 32

Bela negara 3, 26
bela negara 1, 3, 4, 12, 13, 18,
19, 20, 22,, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 32, 72,
128, 129,
Benua Asia 14
Benua Australia 14
bestuur 35
bilateral, 87, 100
regional 87, 100
Budaya 78, 90, 93, 95, 100,
106, 181

C

chating 90
Chauvinisme 95, 127
chauvinisme 30, 92, 133

D

daerah otonomi 38, 59, 62, 130,
175
Daniel Goleman 113
Davis 47
Dekonsentrasi 36, 57, 58
dekonsentrasi 36, 43, 58, 59, 68
Demografis 14
demografis 14, 27
Desentralisasi 36, 57, 58
desentralisasi 36, 39, 42, 58, 68,
130
devisa 82, 83, 94
diplomatik 6, 12, 29, 84
Dr. Herminarto 106
Dr. Ira Primiana Sagir, S.E., M.T. 57

E

Efisiensi 41
efisiensi 117, 68
eksploitasi 10, 16, 42, 71
eksplorasi 10, 42, 71
Eksternalitas 41
eksternalitas 68
Emil Salim 76
Empati 114
empati 135

F

falsafah 80, 96
Friedrick Hertz 7
Frustrasi 108
frustrasi 104, 108

G

Gaya hidup 90
gaya hidup 87, 88, 90, 96, 98
GBHN 70, 80
gejolak nasional 16
Geografis 14
geografis 14, 27
geopolitik 76, 77
Geostrategis 14
geostrategis 27, 127
Globalisasi 73, 75, 76, 77, 78,
84, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 95, 96, 100
globalisasi 19, 73, 75, 76, 77, 78,
79, 83, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93,
95, 96, 97, 98, 99, 100,
132, 133, 134,

H

HAM 71, 81, 88, 116
ham 13
Hamijoyo 76
heterogen 75
Howard Gardner 108
Hugo de Groot 9

I

Ideologi 180
ideologi 16, 21, 22, 26, 29, 81
Ideologi Pancasila 180
ideologi Pancasila 21
individualitas 7
infrastruktur 85
Inggris 9, 75, 86, 109, 119, 120,
124
interaksi sosial 15
internet 63, 65, 77, 89
IPTEK 15, 27, 103
Iptek 76, 117, 136
Irak 86
Israel 86

J

James E. Anderson 58, 62, 130,
131, 48,
jati diri 21, 92, 98
Joe Huckle 75
John Huckle 75
John Sheldon 9

K

Karimun 85
kartu kredit 78, 89, 91
kebudayaan nasional 21
Kecerdasan 106, 108, 109, 110,
111, 112, 113
kecerdasan 101, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113,
134, 135, 136
kecerdasan bahasa 108, 109, 117
Kecerdasan emosional 122
kecerdasan emosional 111, 113,
125, 126
Kecerdasan Interpersonal 112
Kecerdasan interpersonal 112, 122
kecerdasan interpersonal 108, 112
kecerdasan kinestetika 108
kecerdasan matematika 108, 125

Kecerdasan Musikal 111
Kecerdasan musikal 122
kecerdasan musikal 108, 111
Kecerdasan Natural 113
Kecerdasan natural 113, 122
kecerdasan natural 108, 113
Kecerdasan spiritual 122
kecerdasan spiritual 135, 107, 115
kecerdasan visual spasial 108
Kejahatan ekonomi 95
kejahatan ekonomi 90
Kemandirian 113
kemandirian 7, 12, 21, 38, 81
Kepolisian 17, 18, 20, 190
kepolisian 17, 18, 26, 27, 51
Kesadaran diri 113
Ketahanan ekonomi 21
Ketahanan ideologi 21
Ketahanan Nasional 15, 27
Ketahanan nasional 16
ketahanan nasional 14, 16, 21,
31, 70
Ketahanan pertahanan keamanan 22
Ketahanan politik 21
KKN 22, 81
kodrat 87, 178, 196
Komponen cadangan 23
komponen cadangan 23, 28
komponen pendukung 23, 28
komponen utama 23, 28
Kongo 86
konservatif 49, 59, 69, 129, 131
konsumtif 88, 99
Konvensi Chicago 10

L

Landas Benua 10
Lebanon 86
limbah industri 90, 103
LSM 46, 67

M

madani 17

Mahatma Gandhi 92, 98
mahluk sosial 112, 68
makro 84
Malaysia 85
maritim belt 8
Media massa 46
media massa 32, 46, 175, 189, 192
Mesir 86
mobilisasi umum 128, 24
Mohamad Hatta 80
multilateral 9, 87, 96, 97, 100

N

Nasionalisme 15, 26, 92, 93, 95
nasionalisme 5, 16, 17, 20, 21, 30,
71, 92, 96, 98,
naturalisasi 7
negara agraris 78
Nilai Budaya 93
Nilai budaya 95
nilai budaya 92, 96, 99, 111, 112
NKRI 12, 15, 18, 20, 22, 81
Normalisasi 81

O

Optimisme 115
Orde Baru 80
orde baru 56
Orde Lama 80
Orde Reformasi 80
otokratis 88
Otonomi 33, 35, 36, 39, 43, 44,
57, 58, 66, 84
otonomi 33, 35, 36, 38, 39,
40, 43, 44, 45, 46, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63,
67, 68, 69, 129, 130,
131, 175, 188, 189, 200,
Otonomi Daerah 33, 35, 39,
43, 44, 66, 84
Otonomi daerah 36, 57, 58
otonomi daerah 33, 35, 38, 39, 43,
44, 45, 46, 55, 56, 58,

59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69
129, 130, 131,
188, 189, 200
otoriter 53, 55, 130

P

pamong praja 51
Pancasila 3, 16, 17, 20, 21,
22, 26, 28, 30, 45, 60,
80, 93, 96, 99, 100, 70, 127
Patriotisme 26, 127
patriotisme 16, 20, 30
PBB 9, 80, 86
Pemerintahan Daerah 35, 37,
39, 41, 63
Pemerintahan daerah 37, 38
pemerintahan daerah 35, 36, 37,
38, 39, 40, 50, 58, 63, 175
Penduduk 6, 26, 29, 128
penduduk 6, 7, 14, 29,
36, 40, 48, 72, 83, 123,
183, 199, 128
pengejawantahan 4
Penghargaan diri 113
Perancis 86, 124, 175, 178, 179
Pertahanan negara 26
pertahanan negara 3, 4, 12, 15,
19, 23, 71, 72, 117
POLRI 5, 14, 31, 32, 91, 202
Polri 72
polusi 94
Potensi 14, 16, 106, 122
potensi 12, 14, 15, 16, 18,
25, 26, 27, 37, 39, 40,
42, 43, 57, 58, 85, 94, 103,
104, 105, 106, 107, 114,
117, 118, 119, 120, 121,
123, 124, 125, 126
129, 131, 135,
Potensi Diri 106
Potensi diri 122
potensi diri 103, 106, 117, 118,
124, 125, 126

power 106
PPBN 20
Prestasi 101, 103, 116, 117, 122,
135, 136,
prestasi 94, 99, 101, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 114,
115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 123, 124, 126,
134, 136,
Prestasi Diri 101, 103
Prestasi diri 122
prestasi diri 101, 103, 115,
124, 126
produktivitas 88
Prof. Dr. Buchori Zainun, MPA 106
profesional 84, 90, 111
psikomotor 107
public interest 54

R

Rakyat Terlatih 24, 31
Rakyat terlatih 129
rakyat terlatih 16, 31, 70, 128
Ranah 113, 114, 115
ranah 113
regeling 35
Res Communis 9
res communis 70
Res Nullius 8
res nullius 70
Reuven Bar-On 113
riset 85

S

sadisme 90
Samudera Indonesia 14
Samudera Pasifik 14
Selektif 92, 95
selektif 15, 73, 75, 83, 92, 93, 96,
132,
Shipis territory 11
Sikap asertif 113
sistem politik 53, 175

Somalia 86
Sosial Budaya 78, 90
sosial budaya 6, 21, 128, 135,
26, 40, 72, 78, 88, 90, 92,
96, 100, 103, 105, 116,
117
spiritual 16, 25, 31, 107, 135,
111, 115, 118, 121, 122
struktur politik 53

T

Tanggung jawab 114
tanggung jawab 3, 4, 15, 44, 45,
50, 72, 89, 91, 105, 116, 122,
192, 202
tax holiday 48
Teknologi 95
teknologi 5, 15, 72, 75, 76,
77, 78, 79, 82, 83, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 96, 99,
103, 104, 112, 119, 120,
132,
teritorial water, teritorial sea 8
Teroris 22
teroris 15, 89
The Liang Gie 36
Thomas R. Dye 47, 131
Tilaar 76
Timur Tengah 86
TNI 5, 14, 16, 23, 28, 31, 72,
80, 91, 190, 202
tradisional 39, 76, 89, 90, 96
traktat 9, 11, 30
transparansi 77, 88, 89, 96, 99
Tugas pembantuan 36, 58, 130
tugas pembantuan 36, 38, 40, 58,
61, 68, 129

U

UNHCR 86
Unsur Deklaratif 6, 27
Unsur deklaratif 26, 71
unsur deklaratif 12, 29
Unsur Konstitutif 6, 27
Unsur konstitutif 6, 26
unsur konstitutif 6, 32

V

Van der Pot 36
Vietnam 86

W

Warga Negara 24
Warga negara 7, 26, 29, 51
warga negara 1, 3, 4, 7, 12, 15
19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 49, 50, 67, 70,
72, 88, 89, 98, 103, 120, 121
122, 127, 128, 133, 178, 192
193
weaknesses 106
Wilayah ekstrateritorial 11
wisatawan 85

Y

Yunani 35, 57

Z

ZEE 9, 30, 71

PKn 3

Kelas IX SMP dan MTs

Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini dirancang untuk membangun dan merefleksikan kemampuan peserta didik dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang setiap saat.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan 3 mengupas masalah Bela Negara, Otonomi Daerah, Globalisasi dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara, Prestasi Diri. Kemudian dari segi pembelajarannya menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Sedangkan dari segi penilaiannya menggunakan model penilaian berdasarkan perbuatan atau juga dikenal dengan penilaian otentik.

Kelebihan buku ini:

- Materi disusun secara sistematis.
- Dilengkapi dengan gambar-gambar yang sesuai sehingga dapat memperjelas substansi yang dikuasai oleh peserta didik.
- Dilengkapi dengan soal-soal yang berbasis kelas.
- Bentuk-bentuk soalnya disesuaikan dengan sistem pengujian berbasis kemampuan.

ISBN : 978-979-068-878-0 (no. jilid lengkap)
978-979-068-889-6

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp8.551,-